

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP PGRS/PARAKU DI KALIMANTAN BARAT  
1963–1967**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:

M. S. MITCHEL VINCO

NIM: 041314018

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2009**

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP PGRS/PARAKU DI KALIMANTAN BARAT**

**1963–1967**

Oleh:

**M.S. MITCHEL VINCO**

**NIM: 041314018**

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.

Tanggal 19 Januari 2009

Pembimbing II



Drs. B. Musidi, M.Pd.

Tanggal 19 Januari 2009

SKRIPSI

KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP PGRS/PARAKU DI KALIMANTAN BARAT  
1963-1967

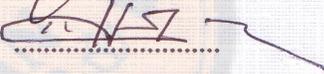
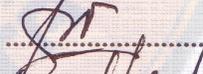
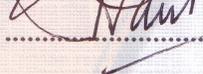
Dipersiapkan dan ditulis oleh

M.S. Mitchel Vinco

NIM: 041314018

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
pada tanggal 05 Februari 2009  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua : Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si.	
Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota : Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.	
Anggota : Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota : Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.	

Yogyakarta, 05 Februari 2009  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sanata Dharma



Dehan  
arsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PERSEMBAHAN

*Kutertawa... saat terbayang kebersamaan...*

*Kita di hari natal, di saat arisan,  
dan saat - saat intim lainnya.*

*Aku menjadi Jenderal saat itu...*



*Untuk kalian yang mendahuluiku...  
untuk kalian yang jadi penentu hari esok...*

*kupersembahkan semua hidupku,  
permenungan dan perjuangan  
demi masa lalu, untuk masa depan.*

*Ijinkan kutoreh tanah ini...*

*Kepada para bocah "benih" perjuangan.*

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## MOTTO

*"Bagaimanapun keadaanmu, jadikan sebagai sumber pengalaman bagi dirimu sendiri..."* (Friedrich Nietzsche)

*"Buanglah kekecewaan tentang ciri-cirimu, karena bagaimanapun, kau punya sebuah tangga dengan ratusan anak tangga untuk naik ke tujuanmu..."* (Friedrich Nietzsche)

*"...jangan pernah punya keinginan untuk diperlakukan spesial. Tapi cobalah untuk tetap bertahan hidup dalam setiap nafas dan terus melakukan hal yang spesial..."* (July di bulan Juni)

*"Masalah seperti angin selalu berhembus, seperti cahaya selalu terbit di pagi hari. Karenanya aku bersyukur adanya gelap dan kehampaan yang membuatku tertidur sejenak."* (Bukan-Dewa)

*"Cintailah dan lakukanlah apa yang kau kehendaki"* (St. Augustinus)

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

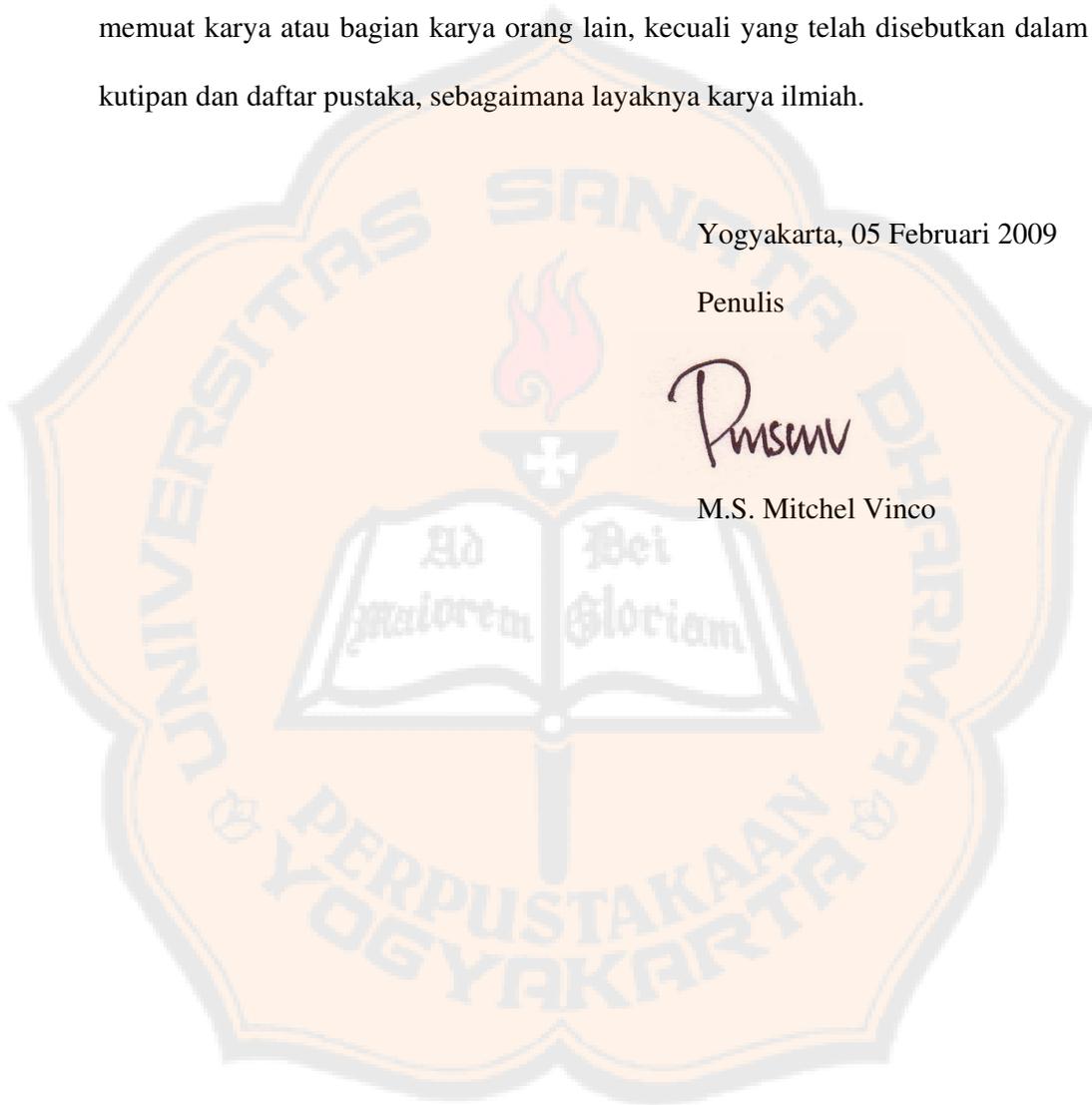
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 05 Februari 2009

Penulis



M.S. Mitchel Vinco



**ABSTRAK**

**M.S. Mitchel Vinco  
041314018**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP PGRS/PARAKU DI KALIMANTAN BARAT 1963 – 1967**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis; 1) latar belakang terbentuknya PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat; 2) sikap dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terhadap PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat 1963-1967; 3) pengaruh dari kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terhadap PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat 1963-1967.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dan ditulis secara deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan politik.

Hasil penelitian ini adalah: 1) pembentukan Federasi Malaysia tidak memperhatikan aspirasi masyarakat Kalimantan Utara dan negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Filipina, sehingga pihak yang menentang membentuk dan mendukung PGRS/PARAKU; 2) sikap Pemerintah Republik Indonesia pada masa Orde Lama menentang pembentukan Federasi Malaysia dan mendukung PGRS/PARAKU. Sedangkan sikap Pemerintah Republik Indonesia pada masa Orde Baru menerima berdirinya Federasi Malaysia dan menentang PGRS/PARAKU; 3) pengaruh kebijakan Pemerintah Republik Indonesia pada masa Orde Lama yang mendukung PGRS/PARAKU, membuat PGRS/PARAKU dapat bertahan dalam perjuangannya menentang Federasi Malaysia. Sebaliknya kebijakan Pemerintah Republik Indonesia pada masa Orde Baru yang menentang PGRS/PARAKU, membuat PGRS/PARAKU ditumpas karena mengancam integritas Pemerintah Republik Indonesia.

**ABSTRACT**

**M.S. Mitchel Vinco  
041314018**

**THE POLICY OF THE REPUBLIC OF THE INDONESIAN  
GOVERNMENT TOWARDS SARAWAK PEOPLE GUERRILLA  
TROOPS / NORTH KALIMANTAN PEOPLE TROOPS  
IN WEST KALIMANTAN 1963-1967**

This study aims to describe and analyze; 1) the background of the emerge of Sarawak People Guerrilla Troops/North Kalimantan People Troops in West Kalimantan; 2) the attitude of the Republic of the Indonesian Government towards Sarawak People Guerrilla Troops/North Kalimantan People Troops in West Kalimantan 1963-1967; 3) the influence of the policy of the Republic of the Indonesian Government towards Sarawak People Guerrilla Troops/North Kalimantan People Troops in West Kalimantan 1963-1967.

The method that was employed was historical descriptive analysis by employing sociological and political approaches.

The results of this study are: 1) the establishment of Malaysian Federation did not consider the aspiration of North Kalimantan People and neighbouring countries like Indonesia and Phillipine. It effected the opponents supported Sarawak People Guerrilla Troops/North Kalimantan People Troops; 2) the Old Order refused the establishment of Malaysian Federation and supported Sarawak People Guerrilla Troops/North Kalimantan People Troops. On the contrary, the New Order accepted the establishment of Malaysian Federation and refused Sarawak People Guerrilla Troops/North Kalimantan People Troops; 3) the Old Order's policy in supporting Sarawak People Guerrilla Troops/North Kalimantan People Troops influenced the ability of Sarawak People Guerrilla Troops/North Kalimantan People Troops to endure their struggle of opposing Malaysian Federation. On the contary, the New Order's policy in refusing Sarawak People Guerrilla Troops/North Kalimantan People Troops influenced its decision to exterminate Sarawak People Guerrilla Troops/North Kalimantan People Troops for being a threat to the Indonesian government.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : M. S. Mitchel Vinco

Nomor Mahasiswa : 041314018

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:  
Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat 1963-1967  
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memmemberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 26 Februari 2009

Yang menyatakan



( M. S. Mitchel Vinco )

## KATA PENGANTAR

Pembelajaran sejarah dalam hukum kausalitas membawa penulis menyadari campur tangan Sang Maha Pengada. Terima kasih Sang Maha Pengada, Allah Bapa Semesta Raya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Kebijakan Pemerintah RI Terhadap PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat 1963-1967", sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sejarah.

Sejak masa pra penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan.. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma.
2. Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Drs. B. Musidi, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II bagi penulis.
3. Drs. A.A. Padi selaku Pembimbing Akademik angkatan 2004.
4. Drs. Y.R. Subakti, M.Pd., Drs. A.K. Wiharyanto, M.M., Drs. Adisusilo J.R., S.Th., Dra. Th. Sumini, M.Pd., Drs. Ign. Sandiwan, Drs. Hery Santosa, M.Hum., Drs. Silverio R.L. Aji Sampurno, M.Hum., Drs. H. Purwanto, M.A., dan Robertus Marsidiq.
5. Kedua Orang Tua penulis, Cosmas Damianus Yan Kay dan Emiliana Christina, yang sudah memberikan hampir seluruh "kebebasannya". Saudara-saudara sedarahku, Even, Ito, Theo, dan Dede.
6. Teman-temanku setelah tujuh tahun berlalu, Agum, Ardian "Pak Gub", Edu Hengki, Dede', Dydut "Bikang", Sandi, Amad, Nizar, Bom2, Jito, Kojek, Abah, Odie, Wisnu dan semua sahabatku eks-Colink dan eks-Surya Nila.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Teman-teman Pendidikan Sejarah yang tidak dapat disebutkan semua, karena kalian semua spesial bagiku. Para *tetua* seperti: Pak Leo "Sejarawan Pemuda", *Mas Bayu* "Sejarawan Mataram", *Pa'ce Longgi*, dan *Mas Njo. Bang Hendrikus Christianus* yang menjadikan penulis seorang blogger.
8. Teman-teman Unit Kegiatan Pers Mahasiswa **natas** Universitas Sanata Dharma dan tidak lupa sang inspirator Soe Hok Gie dan TAS alias Minke.
9. Teman-teman Forum Komunikasi Efektif Kepemudaan - Kemahasiswaan (FKEKK) Keuskupan Agung Semarang wilayah Yogyakarta.
10. Teman-Teman *nge-Band*, seperti Jojon, Sigit, Bendot, Rico (*reng nalaw najeb sabubuy*), serta Beb Willy "Botax" sekeluarga.
11. Teman-teman guru "dadakan" di SDN Kali Kuning, Oki, Acong, Ponco, Astri, Tere, Puji, dan Regina.
12. Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Departemen Informasi dan Kearsipan Daerah Kalimantan Barat, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Kalimantan Barat, dan Majalah Kalimantan Review.
13. Bapak L.H. Kadir dan *Bang Aju* yang memberi buku-buku yang sangat berguna dalam penulisan skripsi.
14. *Bang Willy* sekeluarga atas bantuan selama penelitian di Arsip Nasional RI di Jakarta. *Mas Arif Fadillah* atas hadiah dua buku tentang Soekarno yang menemani penulis di kereta api "Senja Utama" Jakarta-Yogyakarta.
15. Nasto, Alex, Kak Dian, serta Nopi yang pernah "hidup" bersama penulis.
16. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas masa lalu, masa sekarang dan semoga kita bersahabat di masa depan. Saran dan pendapat dapat dikirim via e-mail di alamat [vinco\\_khapone@yahoo.com](mailto:vinco_khapone@yahoo.com) atau dapat mengunjungi blog penulis di <http://kamudaponti.blogspot.com>.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>Bab I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A : Latar Belakang Masalah.....	1
B : Perumusan Masalah.....	9
C : Tujuan dan Manfaat.....	9
D : Kajian Pustaka.....	10
E : Landasan Teori .....	15
F : Hipotesis .....	28
G : Metodologi Penelitian .....	29
<b>Bab II : TERBENTUKNYA PGRS/PARAKU.....</b>	<b>44</b>
A : Usaha Pembentukan Federasi Malaysia.....	44
B : Reaksi Dari Dalam Federasi Malaysia .....	53
C : Reaksi Indonesia .....	56
D : Reaksi Negara Lainnya Terhadap Federasi Malaysia.....	60
E : Terbentuknya PGRS/PARAKU .....	63
<b>Bab III: KEBIJAKAN PEMERINTAH RI TERHADAP PGRS/PARAKU</b>	
<b>DI KALIMANTAN BARAT 1963 - 1967.....</b>	<b>70</b>

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

A : Gagalnya Perundingan Penyelesaian Masalah “Malaysia” .....	70
B : Politik Konfrontasi: Dukungan Terhadap PGRS/PARAKU 1963-1966 .....	81
C : Penumpasan PGRS/PARAKU oleh Pemerintah Orde Baru 1966-1967 .....	93

## **Bab IV : PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH RI TERHADAP**

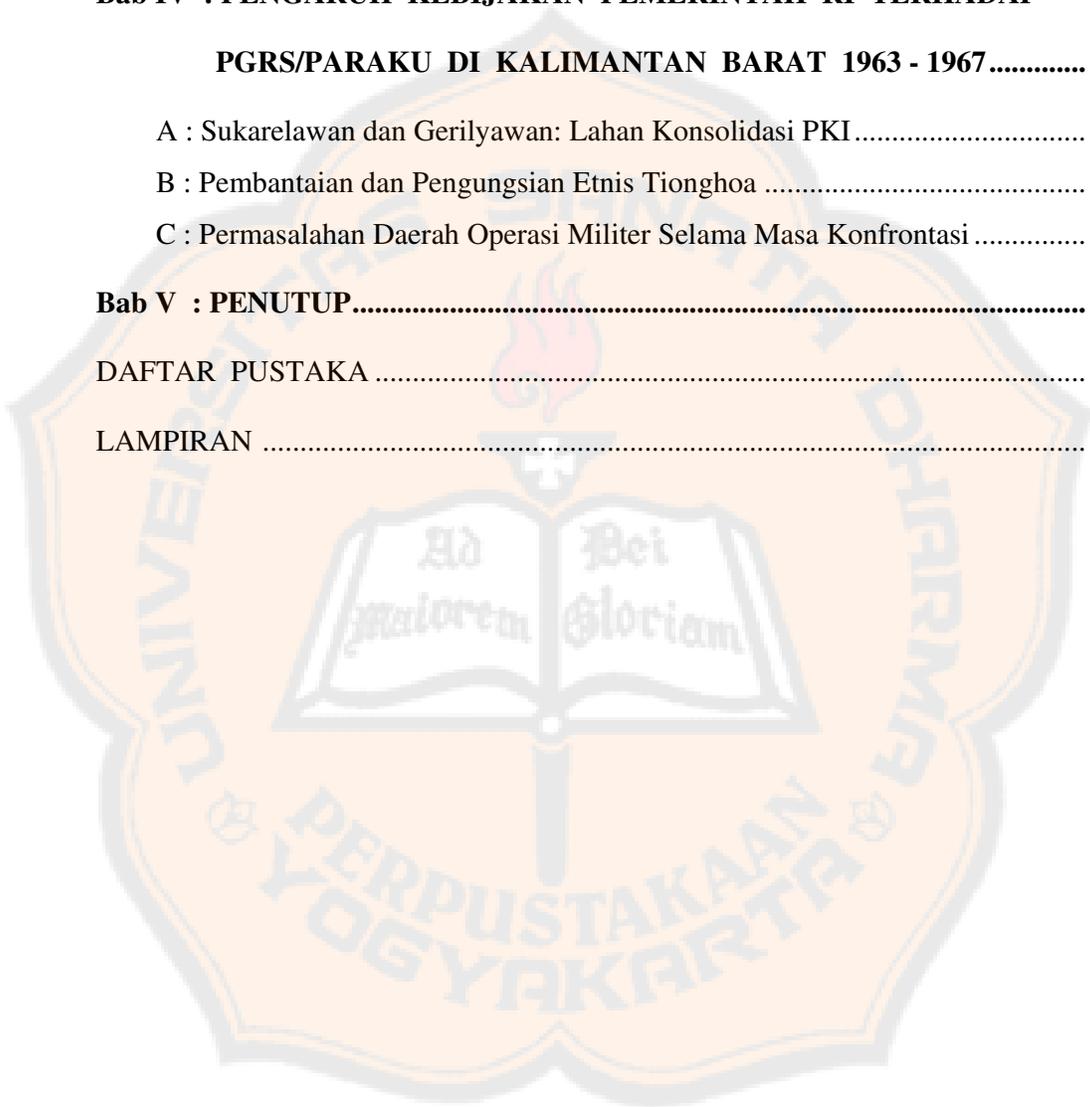
### **PGRS/PARAKU DI KALIMANTAN BARAT 1963 - 1967..... 112**

A : Sukarelawan dan Gerilyawan: Lahan Konsolidasi PKI.....	112
B : Pembantaian dan Pengungsian Etnis Tionghoa .....	116
C : Permasalahan Daerah Operasi Militer Selama Masa Konfrontasi .....	119

## **Bab V : PENUTUP..... 123**

## **DAFTAR PUSTAKA .....**

## **LAMPIRAN .....**



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Penghentian Tembak Menembak antara Inggris/Malaysia dengan Indonesia. ....	130
Lampiran 2: Persetujuan Normalisasi Hubungan antara Indonesia dan Malaysia.....	131
Lampiran 3: Surat Pengumuman Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No. 1 Tahun 1964. ....	133
Lampiran 4: Instruksi Presiden No.03/KOTI/Tahun 1964. ....	135
Lampiran 5: Instruksi Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No. 04/KOTI Tahun 1964. ....	139
Lampiran 6: Instruksi Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No. 07/KOTI Tahun 1964. ....	142
Lampiran 7: Transkrip Wawancara dengan Nara Sumber.....	145
Lampiran 8: Peta: Situasi PGRS/PARAKU 1966-1968 .....	147
Lampiran 9: Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. ....	149

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Friedrich Nietzsche, seorang filsuf berkebangsaan Jerman (1844 – 1900), pernah memberi "peringatan" yang sangat cocok dengan kondisi historiografi di Indonesia saat ini. Pernyataan yang dilontarkan Nietzsche lebih dari satu abad silam, ternyata dapat ditemukan di Indonesia saat ini.

"Penulisan sejarah kita yang sedemikian maju, mengandung bahaya bahwa masa silam dijadikan sebuah obyek belaka, yang kita jadikan obyek tidak lagi merupakan bagian dari kita sendiri, melainkan terletak di muka kita sebagai suatu benda yang mati... karangan historis demikian banyak, sehingga kenyataan itu saja menjadikan kita acuh tak acuh terhadap masa silam".<sup>1</sup>

Banyaknya karya sejarah, yang terbit pasca Reformasi 1998, di sisi lain diikuti dengan gelombang apatis dan pragmatis yang sangat besar. Sejarah hanya menjadi dongeng pengantar tidur atau menjadi permainan teka-teki baru dalam interaksi di masyarakat. Buku-buku sejarah dapat disejajarkan dengan karya fiktif populer yang "bisa" sangat menarik dibaca, tapi tanpa mengetahui makna dan keinginan melakukan internalisasi nilai terhadap kehidupannya.

Salah satu jawaban sementara yang bisa diajukan dalam menjawab gejala "amnesia" sejarah adalah tidak adanya keterikatan dan kepentingan bagi individu dan masyarakat terhadap historiografi yang dibacanya. Sejarah yang dibaca masyarakat merupakan sejarah "orang lain", sejarah yang jauh dan asing baginya. Demikianlah ramalan Nietzsche bisa menjadi benar bahwa "masa silam dijadikan

---

<sup>1</sup> Ankersmit, *Refleksi Tentang Sejarah*, Jakarta, Gramedia, 1987, hlm.355.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2

sebuah obyek belaka, yang kita jadikan obyek tidak lagi merupakan bagian dari kita sendiri, melainkan terletak di muka kita sebagai suatu benda yang mati”.<sup>2</sup>

Pasca Reformasi 1998 di Indonesia yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru, geliat penulisan sejarah mulai menunjukkan grafik yang ”sangat” menanjak. Penulisan sejarah tidak lagi dikuasai oleh penguasa seperti halnya pada jaman Orde Baru. Kalau dulu sejarah ditulis dari perspektif pemenang, kini sejarah bisa ditulis oleh pihak yang kalah atau korban.<sup>3</sup> Penulisan sejarah saat ini menjadi lebih beragam dari berbagai perspektif. Asvi Warman Adam menamakan fenomena ini dengan ”pelurusan sejarah” atau penulisan sejarah alternatif.

Di sisi lain ternyata suburnya fenomena demikian dikritik oleh Bambang Purwanto. Penulisan sejarah yang berkiblat pada Indonesiasentris menurut Bambang telah membuat para sejarawan mengulang kesalahan yang sama pada penulisan sejarah kolonial atau Nerlandosentris. Menurut Bambang banyak dari pengkritik historiografi Orde Baru sebenarnya menggunakan pola pikir yang menuntut pelurusan sejarah, namun ”kebenaran” sejarah menurut versi masing-masing. Terutama mereka yang merasa dirugikan oleh keberadaan wacana dan penulisan sejarah Orde Baru, untuk mempertahankan versi sejarah mereka yang lama.<sup>4</sup>

Menimbang peringatan Nietzsche, maka penulisan sejarah yang akan penulis lakukan pada dasarnya memiliki keterikatan dengan masyarakat lokal hingga saat ini. Karya ini tidak sekedar menjadi ”benda mati”, melainkan mampu memberi

---

<sup>2</sup> *Loc. cit.*

<sup>3</sup> Bambang P. & Asvi W. A., *Menggugat Historiografi Indonesia*, Yogyakarta, Ombak, 2005, hlm. 66.

<sup>4</sup> Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi IndonesiaSentris?!*, Yogyakarta, Ombak, 2006, hlm.xvi.

sumbangsih pada dinamika masyarakat di sekitar tema penelitian ini. Menimbang gagasan Asvi Warman Adam, maka penulisan sejarah ini dapat menjadi sejarah alternatif di samping penulisan sejarah yang telah dilakukan saat Orde Baru berkuasa. Menimbang kritik Bambang Purwanto, maka penulisan sejarah ini tidak didasarkan pada sentimen pribadi atau kepentingan kelompok tertentu.

Historiografi yang akan penulis sajikan pada dasarnya merupakan Sejarah Nasional Indonesia, terutama terkait dengan Politik Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, pada periode 1963-1967. Namun, secara khusus akan membahas tentang sikap Pemerintah Republik Indonesia terhadap sebuah organisasi militer yang bernama PGRS/PARAKU atau Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di perbatasan Indonesia-Malaysia. Sikap pemerintah RI menyangkut dua pemerintah yang bertolak belakang yaitu Orde Lama dan Orde Baru.

PGRS/PARAKU merupakan organisasi yang dibentuk untuk menentang pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963. PGRS/PARAKU memiliki basis operasi yang berlokasi di sekitar perbatasan Provinsi Kalimantan Barat-Republik Indonesia dengan Sarawak-Malaysia.<sup>5</sup> PGRS/PARAKU didirikan pada bulan Desember 1963 sebagai hasil kompromi antara tiga pihak yang kontra dengan Federasi Malaysia yaitu Pemerintah Republik Indonesia, Partai Rakyat Brunei dan dari Sarawak yaitu *Sarawak United People Party/Serawak Advance Youth Association*/Partai Komunis Sarawak.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Soemadi, *Peranan Kalimantan Barat Dalam Menghadapi Subversi Komunis Asia Tenggara*, Pontianak, Yayasan Tanjungpura, 1974, hlm. 54. Lihat juga SEMDAM XII/Tanjungpura, *Tanjungpura Berjuang*, Pontianak, Kodam XXI Tanjungpura, 1970, hlm. 182.

<sup>6</sup> *Serawak United People Party, Serawak Advance Youth Association* dan Partai Komunis Sarawak sebenarnya tiga organisasi yang berbeda. Namun, dalam sumber-sumber dari Soemadi dan

Berbicara tentang PGRS/PARAKU tidak dapat terlepas dari situasi dan kondisi perpolitikan Internasional, Republik Indonesia (luar dan dalam negeri), Federasi Malaysia, dan hubungan antara etnis-etnis di Kalimantan Barat. Selain itu pembahasan PGRS/PARAKU juga harus memperhatikan posisi gerakan ini dalam periode 1963-1967, yang dalam perjalanannya mengalami perlakuan dari dua era pemerintahan yang berbeda dan saling bertolak belakang. Seperti yang dikatakan Bambang Purwanto "...pelurusan sejarah tidak dapat dilihat secara parsial dan sekedar mengambil salah satu episode dari masa lalu itu untuk melegitimasi eksistensi sesuatu dan untuk menyatakan kebenaran historis. Realitas masa lalu tidak hanya bisa dibalik begitu saja, dari yang sebelumnya buruk kemudian diubah menjadi baik. Sejarah harus dilihat sebagai sebuah proses holistik"<sup>7</sup>

Melihat situasi politik internasional di sekitar tahun 1960-an, munculnya PGRS/ PARAKU berada di "moncong meriam" pertarungan dua blok besar di dunia yaitu Blok Timur atau Blok Komunis yang dipimpin Uni Soviet dan Blok Barat atau Blok Kapitalis yang dipimpin Amerika Serikat. Pasca Perang Dunia ke-II hingga tahun 1990-an, para pemenang yang mewakili dua ideologi yaitu Liberal-Kapitalis dan Sosialis-Komunis, saling "berebut" menanamkan pengaruh di negara-negara seluruh dunia. Dalam acara bedah buku Indonesia Melawan Amerika karya Baskara T. Wardaya tanggal 31 Mei 2008, Dr. George Junus Adicondro memberikan pendapat bahwa "Perang Dingin bukanlah semata-mata

---

Tandjungpura Berjuang ketiga organisasi tersebut dianggap sama karena sudah dimasuki unsur komunis dari Partai Komunis Cina.

<sup>7</sup> Bambang Purwanto, *op. cit.*, hlm 16.

persaingan ideologi, melainkan perebutan sumber daya alam di seluruh dunia. Ideologi hanya menjadi alasan dalam perang tersebut”

Sebagai negara yang baru merdeka Indonesia lebih memilih untuk tidak terlibat dalam konflik global tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Dasa Sila Bandung yang disepakati pada Konferensi Asia Afrika di Bandung 18-25 April 1955.<sup>8</sup> Namun, Dasa Sila Bandung juga tidak melarang negara-negara yang menandatangani untuk bekerja sama dengan negara-negara lain, baik Blok Timur maupun Blok Barat, sehingga memang posisi Indonesia masih terbuka dalam bekerja sama dengan Blok Barat ataupun Blok Timur. Hal ini tentu saja terlihat dalam kebijakan Indonesia terhadap dua negara pemimpin dunia saat itu, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Setelah mencapai keberhasilan dalam masalah Papua, Amerika Serikat mendapat banyak muhibah dari kalangan elit Indonesia yang non-komunis. Dalam bukunya *Cold War Shadow*, Baskara T. Wardaya menuliskan adanya indikasi Amerika Serikat, pada Pemerintahan J.F. Kennedy, akan bekerja sama dengan Indonesia pasca bergabungnya Papua ke Indonesia.

*”...Kennedy administration intended to help rebuild Indonesia as a politically and economically stable nation, neutral in Cold War rivalries but nonetheless inclined toward the U.S. and its Free World allies...President John F. Kennedy’s willingness to approve the recommended assistance to Indonesia and the Plan of Action for assisting provided the firm basis for the stabilization program. The Action Plan was intended to provide Indonesia with assistance to emergency basis, food aid, spare parts, raw material, technical as well as military assistance”<sup>9</sup>*

---

<sup>8</sup> Lihat G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20*, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hlm. 91-92. Poin yang menjadi indikasi tidak “berpihaknya” Indonesia dalam *Cold War* adalah poin (2) hidup berdampingan secara damai atas dasar persamaan dan kedudukan; (3) saling menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing; (4) tidak campur tangan dalam urusan negara lain.

<sup>9</sup> Baskara T. Wardaya, *Cold War Shadow*, Yogyakarta, Galang Press, 2007, hlm.359-560.

[“...Pemerintahan Kennedy berniat untuk membantu membangun kembali Indonesia sebagai bangsa yang stabil secara ekonomi dan politik, netral dalam persaingan Perang Dingin tapi meskipun demikian mencondongkan ke arah Amerika Serikat dan ini adalah persekutuan Dunia Bebas... kesediaan Presiden John F. Kennedy untuk menyetujui usulan bantuan pada Indonesia dalam Rencana Aksi adalah untuk membantu menyajikan basis yang kuat untuk program stabilisasi. Rencana Aksi berniat untuk memperlengkapi Indonesia dengan bantuan untuk dasar keadaan darurat, bantuan makanan, onderdil, bahan mentah, bantuan teknik seperti bantuan militer yang baik”]

Sebenarnya keinginan Amerika Serikat untuk membantu Indonesia masih dalam rangka “perang dingin” melawan pengaruh komunisme. Stabilitas ekonomi yang diharapkan Amerika Serikat dari Indonesia melalui kerja sama ini, di satu sisi akan menjadi pembendung bagi pengaruh komunisme terutama dari Uni Soviet dan Cina. Baskara T. Wardaya juga berpendapat demikian “*A failure to stabilize Indonesia’s economy, on the other hand, could increase the country’s dependence on the Soviet Union or China, or both.*”<sup>10</sup> [“Kegagalan untuk menstabilkan ekonomi Indonesia, di sisi lain, bisa meningkatkan ketergantungan negara ini pada Uni Soviet atau Cina atau keduanya”].

Dari penelusuran historis di atas, dapat dilihat bagaimana Blok Barat yang diwakili Amerika Serikat dan Blok Timur yang diwakili Uni Soviet (Cina kemudian turut ambil peran), berusaha menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Melihat fenomena tersebut, bukan tidak mungkin pengaruh “perang dingin” juga mempengaruhi sekitar berdirinya PGRS/PARAKU dan mempengaruhi kebijakan Pemerintah RI terhadap PGRS/PARAKU. Bila melihat peristiwa lain di sekitar tahun 1960-an, memang akan semakin kuat indikasinya.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 360.

Mengkaji kebijakan Pemerintah RI terhadap PGRS/PARAKU berarti juga harus mengkaji latar belakang Pemerintahan Presiden Soekarno (Orde Lama) pada masa tersebut. Pemerintah Orde Lama mengeluarkan pernyataan yang menentang Imperialisme dan Kolonialisme, dengan demikian menentang juga rencana pembentukan Federasi Malaysia. Sikap ini kemudian akan berpengaruh pada kebijakan RI terhadap PGRS/PARAKU.

Permasalahan Federasi Malaysia yang terjadi selama pemerintahan Presiden Soekarno ternyata disikapi berbeda ketika pemerintahan Orde Baru berkuasa. Pada tanggal 11 Agustus 1966 Presiden Soeharto sebagai pemimpin "baru" mengadakan kesepakatan dengan pemerintahan Malaysia untuk menghentikan politik konfrontasi. Pemerintahan RI saat ini sudah mengakui berdirinya Negara Federasi Malaysia yang terdiri dari PTM (Persekutuan Tanah Melayu), Singapura, Sarawak, Brunei dan Sabah. Kebijakan-kebijakan pemerintah RI saat ini juga mengacu pada pemulihan hubungan antara kedua negara tersebut, termasuk pengurangan militer dari kantong-kantong strategis di perbatasan dan penumpasan gerakan separatis anti Malaysia yang ada di wilayah perbatasan kedua negara.<sup>11</sup>

Penumpasan gerakan anti Malaysia oleh pemerintah RI dengan "ujung tombak" gerakan adalah etnis Dayak, menyebabkan terjadi kerusuhan etnis yang meluas di sekitar Kabupaten Pontianak. Gerakan massa yang seharusnya politis menjadi gerakan anti ras tertentu. Pengungsian secara besar-besaran terjadi dari daerah pedalaman dan perbatasan menuju Kota Pontianak. Bahkan banyak juga yang lari keluar pulau menuju kota-kota lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soemadi, *op. cit.*, hlm. 67-69. Lihat juga G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 149. Pada M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Serambi: Jakarta, 2005, hlm. 571, penandatanganan perjanjian pemulihan hubungan antara RI-Malaysia tertulis tanggal 11 Desember.

<sup>12</sup> Soemadi, *op.cit.*, hlm. 67-69.

Perbedaan kebijakan antara pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru mengenai persoalan Federasi Malaysia, secara khusus tampak pada kebijakan kedua pemerintahan ini terhadap Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS)/ Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU). Penelitian ini membahas lebih mendalam mengenai kebijakan Pemerintah RI dalam kurun waktu 1963-1967 terhadap PGRS/PARAKU. Kurun waktu 1963-1967 merupakan kurun waktu yang membatasi terbentuknya PGRS/PARAKU hingga penumpasan gerakan ini yang ditandai dengan keterlibatan etnis Dayak dalam penumpasannya yang terjadi tahun 1967. Dengan demikian kurun waktu 1963-1967 berada dalam masa dua pemerintahan yang berbeda dan saling bertolak belakang.

Penulisan sejarah mengenai Konfrontasi Malaysia dan PGRS/PARAKU belum banyak ditemukan dan belum mendapatkan tempat dalam kurikulum sejarah Indonesia. Padahal sejarah PGRS/PARAKU merupakan Sejarah Nasional yang bila diketahui masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Barat, akan memberikan "penerangan" yang bermanfaat dalam hubungan antar etnis Dayak, Melayu dan Tionghoa.

Dengan menyadari potensi konflik yang selalu mengancam hubungan antar etnis, justru seharusnya dapat mempererat hubungan antar ketiga etnis ini di masa yang akan datang. Seperti yang dikatakan Sartono Kartodirjo "penulisan kembali biasa dilakukan, karena penemuan fakta-fakta baru, atau sejarawan membuat interpretasi baru terhadap fakta yang sudah ada berdasarkan kerangka teoritik konseptual dan jiwa jaman yang baru".<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Bambang P.& Asvi W.A., *op. cit.*, hlm.13.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang terbentuknya PGRS/PARAKU?
2. Bagaimana sikap dan kebijakan Pemerintah RI terhadap PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat 1963-1967?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan Pemerintah RI terhadap PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat 1963-1967?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Umum**

Menganalisis secara mendalam, tentang Kebijakan Pemerintah RI terhadap PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat pada periode 1963-1967.

#### **b. Tujuan Khusus**

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang terbentuknya PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat.
- 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sikap Pemerintah RI terhadap PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat 1963-1967.
- 3) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh dari kebijakan Pemerintah RI terhadap PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat 1963-1967.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi penulisan sejarah Indonesia, yaitu untuk memperkaya khasanah penulisan sejarah di Indonesia.

- b. Bagi Universitas Sanata Dharma, untuk melaksanakan salah satu butir Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian untuk Ilmu Pengetahuan Sosial.
- c. Bagi dunia keguruan dan ilmu pendidikan, penelitian ini akan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan sejarah Indonesia khususnya Sejarah Indonesia Baru.
- d. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.

#### **D. Kajian Pustaka**

Menurut Kuntowijoyo sumber primer adalah kesaksian yang disampaikan oleh pelaku sejarah atau saksi mata yang hidup sejaman dengan peristiwa tersebut.<sup>14</sup> Menurut Louis Gottschalk dalam bukunya *Mengerti Sejarah*, sumber primer adalah kesaksian dari seseorang yang melihat dengan mata kepala sendiri atau dengan menggunakan alat mekanis yang dapat merekam peristiwa itu. Dengan demikian sumber primer harus dihasilkan oleh orang yang hidup sejaman dengan peristiwa tersebut. Sumber primer tidak perlu “asli” dilihat dari keaslian dokumen (bukti fisik). Sumber primer hanya harus “asli” dalam artian, kesaksiannya tidak berasal dari sumber lain, melainkan berasal dari tangan pertama. Sedangkan sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapa pun yang bukan saksi pandangan mata atau seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Lihat Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Benteng Budaya, 2001, hlm 98.

<sup>15</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1985, hlm 35-36.

Dalam penelitian ini sumber primer adalah pidato-pidato Presiden Soekarno dan arsip-arsip yang penulis dapat di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Serta sumber lisan yang didapat penulis melalui wawancara dengan saksi sejarah.

*Amanat PJM Presiden Soekarno Pada Appel Besar Sukarelawan Berhubung Dengan Konfrontasi Dengan Malaysia Di Depan Istana Merdeka, Djakarta, 13 April 1964.* Pidato yang disampaikan presiden Soekarno berisi tentang himbauan agar sukarelawan, yang berjumlah lebih dari satu juta, bersiap-siap untuk menerima komando dari Presiden Soekarno, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, dalam rangka mengganyang Malaysia. Selain itu, dalam pidato ini, Presiden Soekarno menjelaskan alasannya mengambil politik konfrontasi terhadap Malaysia.

*Amanat Komando Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Pada Appel Besar Sukarelawan Pengganjangan Malaysia Di Depan Istana Merdeka, Djakarta, 3 Mei 1964.* Pidato yang disampaikan Presiden Soekarno ini merupakan penguatan terhadap pidatonya pada tanggal 13 April 1964. Pidato ini dibacakan untuk 21 juta sukarelawan Indonesia, untuk menerima langsung Komando Aksi dari Presiden Soekarno. Komando Aksi yang dimaksud adalah Dwikora yaitu ” Perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia”.

*Pengumuman Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No:1 Tahun 1964 tanggal 18 Maret 1964.* Pengumuman ini berisi tentang mekanisme pendaftaran

sukarelawan/sukarelawati dalam rangka menghadapi konfrontasi dengan Malaysia.

*Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No: 03/ KOTI/ Tahun 1964 tanggal 21 Maret 1964.* Instruksi presiden ini berisi tentang kebijaksanaan umum serta pelaksanaan pengerahan sukarelawan/sukarelawati.

*Instruksi Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No: 04/ KOTI/ Tahun 1964 tanggal 25 Maret 1964.* Instruksi ini berisi tentang pelaksanaan dari Instruksi Presiden No.03/KOTI/Tahun 1964 mengenai kebijaksanaan dan pelaksanaan pengerahan sukarelawan/sukarelawati.

*Instruksi Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No: 07/ KOTI/ Tahun 1964.* Instruksi ini berisi tentang kebijaksanaan pengerahan atau penggunaan sukarelawan/ sukarelawati.

*Gelora Konfrontasi Mengganjang "Malaysia".* Buku yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1964, berisi tentang pidato-pidato dari Presiden Philipina Diosdado Macapagal dan Presiden Soekarno; Laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang Pemastian Kehendak Rakyat Sabah dan Serawak; serta dokumen-dokumen seperti Persetujuan Manila, Deklarasi Manila, Pernyataan Bersama Manila, Surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Resolusi Sidang Umum PBB No. 1541 (XV), Aide Memoire Indonesia kepada Misi PBB, Aide Memoire Philipina kepada Misi PBB, dan Pernyataan Bersama Indonesia-Philipina.

Wawancara langsung dengan L.H. Kadir, pada hari Minggu, 20 Juni 2008 sekitar pukul 17.00 Wib lokasi di kediaman L.H. Kadir, jalan M.T. Haryono No. 40 Pontianak, Kalimantan Barat.

Selain sumber primer, dalam penelitian ini juga digunakan sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapa pun yang bukan saksi pandangan mata atau seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Sumber sekunder yang penulis gunakan antara lain:

SEMDAM XII/Tanjungpura, *Tandjungpura Berdjuang*, Kodam XXI Tandjungpura, 1970. Buku ini merupakan buku sejarah Kodam XII/Tanjungpura dari masa ke masa. Secara kronologis isi buku ini dimulai dari abad ke-19 hingga 1969. Pada Bab VI dibahas mengenai Kodam XII/Tandjungpura dan Konfrontasi terhadap Malaysia. Sedangkan pada Bab VIII dibahas tentang Kodam XII/Tandjungpura dan Penumpasan Gerombolan Tjina Komunis PGRS-PARAKU.

Soemadi, *Peranan Kalimantan Barat Dalam Menghadapi Subversi Komunis Asia Tenggara*, Pontianak, Yayasan Tanjungpura, 1974. Buku ini merupakan hasil penelitian Mayor Jenderal Drs. Soemadi mengenai organisasi militer yang bernama PGRS/PARAKU. Pembahasan buku ini dimulai dengan Indonesia Dalam Kancan Situasi Internasional hingga Operasi Penumpasan PGRS/PARAKU. Buku karya Soemadi ini lebih menfokuskan PGRS/PARAKU sebagai organisasi komunis yang mengancam integritas Indonesia.

Machrus Effendy, *Penghancuran PGRS-PARAKU dan PKI di Kalimantan Barat*, Jakarta, P.T. Dian Kemilau, 1995. Buku ini merupakan penelitian Machrus Effendy mengenai PGRS/PARAKU. Buku ini menggambarkan PGRS/PARAKU sebagai organisasi "Cina" komunis. Hal yang perlu dikritik dari buku ini adalah penulisan yang tidak menggunakan metode penulisan ilmiah, seperti tidak adanya kutipan sumber dan catatan kaki.

Hidayat Mukmin, *TNI Dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991. Buku ini berisi tentang latar belakang konfrontasi Indonesia-Malaysia dan penyelesaiannya. Di mana dalam buku ini juga dibahas mengenai peran serta ABRI di bidang politik luar negeri Indonesia.

Majalah Bulanan Kalimantan Review: Dagang Suku Dalam Pemilu 1999, "Perkongsi Tionghoa dan Sarang PGRS-PARAKU", No.47/Juli, Istitute Dayakologi Research and Development, Pontianak, 1999, halaman 28. Berupa liputan khusus tentang sejarah komunitas Tionghoa di Kalimantan Barat. Dalam beberapa paragraf dibahas juga mengenai tempat persembunyian PGRS/PARAKU.

Majalah Bulanan Kalimantan Review: Pengakuan Korban PGRS/PARAKU dan DOM di Kalbar, "Menguak Tabir PGRS/PARAKU", No.49/September, Istitute Dayakologi Research and Development, Pontianak, 1999, halaman 8-9. Merupakan berita investigatif yang berisi tentang pengalaman-pengalaman korban Daerah Operasi Militer di Kalimantan Barat yang diakibatkan politik Konfrontasi dengan Malaysia dan penumpasan PGRS/PARAKU.

Muhlis Suhaeri, Koran Harian Borneo Tribune, “The Lost Geneation (1)” sampai “The Lost Generation (19), Minggu/10 Februari – Kamis/28 Februari 2008, edisi *soft copy* dapat ditemukan di <http://muhlissuhaeri.blogspot.com>. Merupakan berita investigatif dalam bentuk *feature* yang ditulis dalam sembilan belas edisi selama sembilan belas hari. Berisi tentang pengalaman-pengalaman dan pendapat-pendapat para saksi sejarah sekitar peristiwa PGRS/PARAKU.

Pembayun Sulistyorini, Jurnal Sejarah dan Budaya Kalimantan Barat, “Pemberontakan PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat”, edisi 03/2004, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Pontianak, 2004, halaman 39. Merupakan penelitian Pembayun Sulistyorini yang berisi tentang sejarah PGRS/PARAKU selama periode 1963-1972.

## E. Landasan Teori

Berbagai definisi teori menurut kamus Webster’s seperti dikutip dalam Metodologi Sejarah karya Helius Sjamsudin adalah:<sup>16</sup>

1. a: kebijakan yang diyakini, atau prosedur yang diusulkan atau diikuti sebagai dasar tindakan: suatu prinsip atau rencana bertindak... b: suatu perangkat ideal atau hipotesis dari fakta-fakta, prinsip-prinsip, atau kondisi-kondisi...
2. a (1): keseluruhan dari generalisasi (*the body of generalizations*) dan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam hubungan dengan praktek dalam suatu bidang kegiatan...  
2: seperangkat prinsip-prinsip hipotesis, konseptual, dan pragmatis yang koheren yang membentuk kerangka acuan kerja umum (*general frame of*

---

<sup>16</sup> Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta, Ombak, 2007, hlm. 61.

*reference*) untuk suatu bidang penyidikan (seperti untuk deduksi prinsip-prinsip, memformulasi hipotesis untuk testing, melaksanakan tindakan)...

... c (1): suatu bidang dari penyidikan intelektual (2): suatu analisis sistematis, penjelasan atau definisi dari sebuah konsep...

3. Suatu pertimbangan (*judgment*), konsepsi, proposisi atau formula (bagaimana hubungannya dengan hakikat, tindakan, sebab, atau asal-mula dari sebuah fenomena atau kelompok fenomena) dibentuk oleh spekulasi atau deduksi atau oleh abstraksi dan generalisasi fakta-fakta...seperti a: suatu keberadaan (*entity*) atau struktur hipotesis yang menjelaskan atau menghubungkan suatu perangkat fakta-fakta yang teramati...b: suatu hipotesis kerja yang diberikan kemungkinan (probabilitas) oleh evidensi eksperimental atau oleh analisis faktual atau keonseptual tetapi belum ditegakkan secara konklusif atau diterima sebagai sebuah hukum (*law*)...

Kamus *The New Lexion* dalam Metodogi Sejarah memberikan definisi teori sebagai berikut:

"Suatu kumpulan terorganisasi dari ide-ide (*organized body of ideas*) mengenai kebenaran sesuatu, biasanya ditarik dari kajian sejumlah fakta-fakta yang berhubungan dengan itu, tetapi kadang-kadang seluruhnya merupakan hasil dari latihan imajinatif spekulatif;...suatu keseluruhan umum (*general body*) dari asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip; suatu dugaan...(conjecture)"<sup>17</sup>

Menurut Mely G. Tan (dalam Koentjaraningrat, 1989:19 seperti yang dikutip dari Dudung Abdurahman, 2007:62) teori merupakan pernyataan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 62.

mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dan faktor-faktor tertentu dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Teori dalam disiplin sejarah biasanya dinamakan "kerangka berpikir" atau "skema pemikiran". Dalam pengertian lebih luas, teori adalah suatu perangkat kaidah yang memandu sejarawan dalam menyusun bahan-bahan (data) yang diperolehnya dari analisis sumber dan juga mengevaluasi hasil penemuannya.<sup>19</sup> Teori akan dipandang sebagai bagian pokok ilmu sejarah apabila penulisan atas suatu peristiwa sampai pada upaya melakukan analisis atas faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual dan unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji.

Penggunaan teori – terutama teori-teori ilmu sosial – dalam penelitian sejarah masih menjadi polemik hingga saat ini. Di antara sejarawan sendiri secara garis besar terbagi dalam dua kelompok yang memandang penggunaan teori dalam penelitian sejarah, yaitu sejarawan yang pro dan sejarawan yang kontra terhadap teori.<sup>20</sup> Sejarawan yang kontra menganggap penggunaan teori akan membuat ilmu sejarah menjadi tidak mandiri dan selalu bergantung dengan ilmu lain. Sejarawan yang pro dengan teori menganggap penggunaan teori akan dapat memperkaya metodologi sejarah dan meningkatkan mutu historiografi.

Sejarawan yang kontra terhadap penggunaan teori-teori dalam penelitian sejarah menganggap bahwa teori akan mengambil alih peranan dari fakta-fakta sejarah. Kesenjangan-kesenjangan dalam peninggalan sejarah, dan terutama

---

<sup>18</sup> Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2007, hlm 62.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>20</sup> Helius Sjamsudin, *op. cit.*, hlm. 65.

kekurangan evidensi yang pasti mengenai masalah-masalah kausalitas, memberikan kesempatan luas untuk semata-mata menduga-duga dan mengharapakan sesuatu benar-benar terjadi seperti apa yang dikehendaki peneliti (*wishful thinking*).<sup>21</sup> Selain itu beberapa alasan lain yang menolak teori adalah karena teori menolak tidak hanya keunikan dari peristiwa-peristiwa tetapi juga martabat individu dan kekuatan dari tenaga manusia sendiri.<sup>22</sup>

Sejarawan kontra teori seperti G. R. Elton mengecam akibat-akibat praktis pada penulisan sejarah yang berorientasi-teori karena menempatkan sejarah dalam hubungan yang tergantung pada ilmu-ilmu sosial. Para sejarawan berpikiran teoritis tidak mengembangkan model-model mereka sendiri melainkan menerapkan saja temuan-temuan teoritis sosiologi, antropologi, politik, ilmu ekonomi dan lain-lain.<sup>23</sup>

Menurut pendapat para sejarawan yang pro-teori – yang dikatakan Tosh, 1984 (dikutip dari Metodologi Sejarah) – sebenarnya sebagian besar oposisi terhadap teori itu karena prasangka saja. Para sejarawan kontra-teori tentu saja memberi masukan dan peringatan-peringatan yang jika dibiarkan akan berakibat buruk bagi penelitian sejarah. Akan tetapi hasil-hasil kerja dari sejarawan pro-teori justru menunjukkan hasil yang lebih merupakan pengayaan daripada suatu pemiskinan pemahaman sejarah.<sup>24</sup> Salah satu sejarawan Indonesia yang menggunakan teori sosial dalam penelitiannya adalah Sartono Kartodirjo dalam

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 70.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 73.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 75.

Pemberontakan Petani di Banten, yang justru mempertajam dan memperkaya penelitiannya.

T. Ibrahim Alfian berpendapat teori itu pada dasarnya adalah seperangkat proposisi yang menerangkan bahwa konsep-konsep tertentu adalah saling bertalian dengan cara-cara tertentu. Proposisi-proposisi yang menceritakan bagaimana pertalian antarkonsep adalah definisi, dalil dan hipotesis. Pada gilirannya, segala teori dapat membantu sejarawan dalam merekonstruksi masa lampau selama prinsip relevansi tetap dipegang teguh.<sup>25</sup>

Menurut Helius Sjamsudin, ketakutan para sejarawan kontra-teori bahwa sejarah akan terserap oleh ilmu-ilmu sosial tidak akan menjadi obat penawar buat sejarah. Teori-teori harus dilihat sebagai titik tolak (*point of departure*) kajian atau penelitian.<sup>26</sup> Teori merupakan suatu pertimbangan, konsepsi, proposisi atau formula (bagaimana hubungannya dengan hakikat, tindakan, sebab, atau asal-mula dari sebuah fenomena atau kelompok fenomena), sehingga fungsi teori hanya menjadi alat bantu dalam penelitian sejarah.

Dalam penelitian ini teori yang relevan pada gilirannya berfungsi sebagai tuntunan untuk menjawab, memecahkan atau menerangkan masalah yang telah diidentifikasi itu, atau untuk merumuskan hipotesis. Dalam penelitian sejarah, teori yang dipergunakan biasanya disusun sesuai dengan pendekatan apa dan bidang sejarah mana yang akan diteliti.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Dudung Abdurahman, *op. cit.*, hlm. 35.

<sup>26</sup> Helius Sjamsudin, *op. cit.*, hlm. 79.

<sup>27</sup> Dudung Abdurahman, *op. cit.*, hlm. 62.

Penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah RI Terhadap PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat 1963-1967 menggunakan dua pendekatan sosiologis dan ilmu politik. Pendekatan sosiologis akan membantu dalam menjelaskan munculnya PGRS/PARAKU sebagai gerakan sosial yang akan dijelaskan dengan teori gerakan sosial. Sementara Pendekatan dengan bantuan ilmu politik akan membantu dalam menjelaskan perbedaan sikap antara pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru yang akan dijelaskan dengan teori kekuasaan dan teori konflik.

## 1. Teori Gerakan Sosial

Gerakan sosial memiliki definisi yang luas karena beragamnya ruang lingkup yang dimilikinya. Giddens (1993) menyatakan bahwa gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Tarrow menempatkan gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa – yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh – menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas dan pihak-pihak lainnya.<sup>28</sup>

Gerakan sosial perlu dibedakan dengan sejumlah pengorganisasian seperti organisasi formal dan kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*). Pertama, meskipun berbeda, gerakan sosial dan organisasi formal kadang-kadang memiliki batas yang kabur, karena gerakan sosial yang berubah menjadi mapan biasanya memiliki karakteristik birokratis. Karena itu, gerakan sosial secara gradual bisa berubah menjadi organisasi formal, sementara itu, sangat jarang suatu organisasi

---

<sup>28</sup> Fadilah Putra dkk, *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*, Malang, Averroes Press, 2006, hlm.1.

formal berubah menjadi suatu gerakan sosial. Kedua, gerakan sosial juga perlu dibedakan dengan kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*) – yakni suatu asosiasi yang dibentuk untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan dalam cara yang menguntungkan para anggotanya. Asosiasi pengusaha tekstil adalah jelas-jelas kelompok kepentingan.<sup>29</sup>

Penjelasan mengenai fenomena gerakan sosial sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Teori gerakan sosial mengalami perkembangan pesat pada dekade 60-an dan semakin berkembang memasuki abad ke-21. Abdul Wahib Situmorang dalam bukunya *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan*, mencoba membahas teori-teori gerakan sosial sesuai perkembangan, sebagai kerangka teori. Terdapat beberapa teori dalam memahami gerakan sosial seperti: *political opportunity structure* (struktur kesempatan politik/POS), struktur mobilisasi, proses *framing*, *reportoire contention* (bentuk aksi) dan sumber-sumber intelektual dalam menganalisis gerakan sosial. Sedangkan pada akhirnya dibahas teori *Contentious Politics* sebagai upaya mengintegrasikan mekanisme-mekanisme yang ada, dalam menjawab fenomena gerakan sosial.

### a. *Political Opportunity Structure*

Mekanisme POS berupaya menjelaskan bahwa gerakan sosial terjadi karena disebabkan oleh perubahan dalam struktur politik, yang dilihat sebagai kesempatan. Peter Eisinger dalam Artikelnya di *American Political Science Review* mengatakan bahwa revolusi terjadi tidak ketika kelompok masyarakat tertentu dalam kondisi tertekan. Tetapi aksi kolektif berupa revolusi muncul ke

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 2-3.

permukaan ketika sebuah sistem politik dan ekonomi tertutup mengalami keterbukaan.<sup>30</sup>

McAdam dan Tarrow menjabarkan mekanisme POS secara lebih spesifik. Pertama, gerakan sosial muncul ketika tingkat akses terhadap lembaga-lembaga politik mengalami keterbukaan. Kedua, ketika keseimbangan politik sedang tercerai berai sedangkan keseimbangan politik baru belum terbentuk. Ketiga, ketika para elite politik mengalami konflik besar dan konflik ini dimanfaatkan oleh para pelaku perubahan sebagai kesempatan. Keempat, Ketika para pelaku perubahan digandeng oleh para elite yang berada di dalam sistem untuk melakukan perubahan.<sup>31</sup> Selain itu Sydney Tarrow kemudian menambahkan bahwa ketegangan politik mengalami peningkatan ketika para pelaku perubahan mendapatkan dukungan sumber daya eksternal untuk keluar dari masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>32</sup>

Mempertajam analisis Tarrow, Hanspeter Kriesi menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor struktur kelembagaan formal, informal dan strategi yang dipergunakan oleh pelaku perubahan.<sup>33</sup> Brockett menekankan beberapa aspek yang berbeda yaitu: arti akses kelembagaan di mata para pelaku perubahan, kehadiran sekutu, fragmentasi elite dan tingkat konflik yang mempergunakan cara-cara represif. Sedangkan Rucht menambahkan pentingnya beberapa aspek seperti: akses terhadap partai politik, kapasitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan struktur aliansi.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm.3.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.4.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.5.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.6.

<sup>34</sup> *Idem*.

Mekanisme POS ini dapat dipergunakan dalam memahami munculnya PGRS/ PARAKU yang dilihat sebagai gerakan sosial menentang terbentuknya Federasi Malaysia. Meskipun demikian, menurut Abdul Wahib Situmorang mekanisme POS tidak mampu mengakomodasi dinamika ketegangan politik itu sendiri. POS hanya dapat digunakan untuk memahami lahirnya dan tumbuhnya sebuah gerakan sosial, dalam hal ini adalah PGRS/PARAKU.

### **b. *Contentious Politics***

Secara keseluruhan, MacAdam menyimpulkan bahwa mekanisme struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi, *framing* dan *repertoire* memiliki keterbatasan dalam menguji *contentious politics* atau ketegangan politik. McAdam, Rarrow dan Tilly berkolaborasi menerbitkan *Dynamics of Contention* pada 2001. Di dalam buku itu mereka menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dalam menganalisis serangkaian besar peristiwa-peristiwa gerakan seperti gerakan sosial baru, revolusi, nasionalisme, maupun demokratisasi di mana pun terjadi.<sup>35</sup>

Yang dimaksud dengan *contentious politics* oleh Tilly, McAdam dan Tarrow adalah peristiwa yang terjadi secara episodik atau tiba-tiba daripada reguler. Lebih jauh, peristiwa mesti terjadi di ruang publik ketimbang di dalam organisasi baik di dalam perusahaan maupun pemerintahan. Peristiwa yang terjadi melibatkan interaksi kolektif di antara pembuat klaim dan objek klaim ketika paling tidak satu pemerintah menjadi pengklaim atau objek klaim atau sebuah

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 23-24.

kelompok mengklaim dan bila terjadi akan memengaruhi paling tidak salah satu objek yang diklaim.<sup>36</sup>

Paling tidak ada tiga mekanisme dan proses yang secara operasional bisa dipergunakan dalam menjelaskan ketegangan politik. Mekanisme pertama adalah lingkaran kesempatan dan kendala beroperasi melalui rentetan perubahan lingkungan, interpretasi perubahan, melakukan aksi dan aksi balasan. Mekanisme kedua adalah peran perantara yang mencoba menghubungkan, dua atau lebih, lokasi-lokasi sosial yang belum berhubungan. Sedangkan mekanisme ketiga adalah pembentukan kategori. Pembentukan kategori menciptakan identitas. Sebuah kategori sosial terdiri dari sekumpulan perbedaan yang membedakan satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya.<sup>37</sup>

## 2. Teori Kekuasaan

Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah "kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu."<sup>38</sup> Kekuasaan sosial menurut Ossip K. Flechtheim adalah "keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan pihak lain...untuk tujuan yang ditetapkan pemegang kekuasaan."<sup>39</sup>

Robert M. MacIver memberikan definisi kekuasaan sosial sebagai berikut "kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.25.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>38</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 2005, hlm.35.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 35.

dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia.”<sup>40</sup> Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak lain yang diperintah. Tidak ada persamaan martabat, selalu yang satu lebih tinggi daripada yang lain dan selalu ada unsur paksaan dalam hubungan kekuasaan.

Di antara banyak bentuk kekuasaan, ada suatu bentuk yang penting yaitu kekuasaan politik. Dalam hal ini kekuasaan politik adalah ”kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum baik terbentuknya maupun akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri”. Kekuasaan politik merupakan sebagian saja dari kekuasaan sosial, yakni kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya pihak berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial paksaan. Kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan warga, tetapi juga pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang administratif, legislatif dan yudikatif.<sup>41</sup>

### 3. Teori Konflik

Menurut Webster (1966) seperti yang dikutip dari buku Teori Konflik Sosial, istilah ”*conflict*” di dalam bahasa aslinya berarti suatu ”perkelahian, peperangan atau perjuangan” – yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya ”ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan

---

<sup>40</sup> *Idem.*

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 37.

lain-lain". Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin konflik berarti "persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan."<sup>42</sup>

Teori konflik sendiri adalah "satu perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda di mana komponen yang satu berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh kepentingan yang sebesar-besarnya."<sup>43</sup>

Pada dasarnya pandangan teori konflik tentang masyarakat tidak banyak berbeda dari pandangan teori fungsionalisme struktural karena keduanya sama-sama memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian. Perbedaan keduanya terletak pada asumsi mereka yang berbeda-beda tentang elemen-elemen pembentuk masyarakat itu. Menurut fungsionalisme struktural, elemen-elemen itu fungsional sehingga masyarakat dapat berjalan secara normal. Sedangkan menurut teori konflik, elemen-elemen itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sehingga mereka saling berjuang satu sama lain.<sup>44</sup>

Karl Marx berpendapat bahwa hakekat kenyataan sosial adalah konflik. Konflik adalah satu kenyataan sosial yang bisa ditemukan di mana-mana. Bagi Marx, konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk

---

<sup>42</sup> Dean G.Pruitt & Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajat, 2004, hlm. 9-10.

<sup>43</sup> Bernard Raho SVD, *op. cit.*, hlm.71.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 72.

memperebutkan aset-aset yang bernilai.<sup>45</sup> Ralf Dahrendorf menerjemahkan pemikiran Marx ke dalam suatu teori sosiologi yang berlandaskan pada fungsionalisme struktural dan teori konflik. Menurut Dahrendorf "distribusi otoritas atau kekuasaan yang berbeda-beda merupakan faktor yang menentukan bagi terciptanya konflik sosial yang sistematis". Hal ini berarti dalam masyarakat ada beberapa posisi yang mendapat kekuasaan dan otoritas untuk menguasai orang lain sehingga kestabilan bisa tercapai.<sup>46</sup>

Menurut Dahrendorf, otoritas atau kekuasaan di dalam suatu perkumpulan bersifat dialektik. Dalam setiap perkumpulan hanya akan terdapat dua kelompok yang bertentangan, yakni kelompok yang berkuasa atau atasan dan kelompok yang dikuasai atau bawahan. Mereka yang berada di kelompok atas ingin tetap mempertahankan status quo. Sedangkan mereka yang dikuasai ingin supaya ada perubahan. Konflik ini selalu ada dalam setiap kehidupan bersama atau perkumpulan atau negara.<sup>47</sup>

Jonathan Turner memusatkan perhatiannya pada "konflik sebagai suatu proses dari peristiwa-peristiwa yang mengarah pada interaksi yang disertai kekerasan antara dua pihak atau lebih". Dia menjelaskan sembilan tahap menuju konflik terbuka:

- a. Sistem sosial yang saling berhubungan.
- b. Terdapat ketidak-seimbangan pembagian kekuasaan atau sumber penghasilan.
- c. Unit-unit yang tidak berkuasa mulai mempertanyakan legitimasi sistem tersebut.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 73.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 80.

- d. Kesadaran bahwa mereka harus mengubah sistem demi kepentingan mereka.
- e. Kesadaran menyebabkan mereka secara emosional terpancing untuk marah.
- f. Kemarahan sering meledak begitu saja tanpa terorganisir.
- g. Keadaan demikian menyebabkan mereka semakin tegang.
- h. Ketegangan yang semakin hebat menyebabkan mereka mencari jalan untuk mengorganisir diri guna melawan kelompok yang berkuasa.
- i. Akhirnya konflik terbuka bisa terjadi antara kelompok yang berkuasa dan tidak berkuasa.<sup>48</sup>

Ilmuwan lain yang mengemukakan teori tentang konflik adalah Lewis Coser. Teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser seringkali disebut teori fungsionalisme konflik karena ia menekankan fungsi konflik bagi sistem sosial atau masyarakat. Salah satu hal yang membedakan Coser dari pendukung teori konflik lainnya ialah bahwa ia menekankan pentingnya konflik untuk mempertahankan keutuhan kelompok.<sup>49</sup>

## F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.<sup>50</sup> Esensinya hipotesis adalah semacam proposisi, asumsi tentatif untuk menguji kesesuaian dengan fakta-fakta; sebuah prediksi yang diberikan menjadi dasar untuk penelitian lanjut. Hipotesis mengatur dan memberikan arah kepada suatu penelitian. Hipotesis adalah sentral dalam proses berpikir reflektif. Singkatnya hipotesis adalah semacam "jawaban sementara" terhadap suatu masalah.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>50</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali Press, 1983, hlm. 69.

<sup>51</sup> Helius Sjamsudin, *op. cit.*, hlm. 50.

Hipotesis dalam penelitian yang berjudul ” Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat 1963-1967” adalah:

1. Kalau pembentukan Federasi Malaysia tidak memperhatikan aspirasi masyarakat Kalimantan Utara dan negara – negara tetangga seperti Indonesia dan Filipina, maka pihak yang menentang akan membentuk dan mendukung PGRS/PARAKU.

2. Kalau Pemerintah Orde Lama menentang pembentukan Federasi Malaysia, maka Pemerintah Orde Lama akan mendukung PGRS/PARAKU.

Kalau Pemerintah Orde Baru menerima berdirinya Federasi Malaysia, maka Pemerintah Orde Baru akan menentang PGRS/PARAKU.

3. Kalau kebijakan pemerintah Orde Lama mendukung PGRS/PARAKU, maka PGRS/PARAKU akan bertahan dalam perjuangannya menentang Federasi Malaysia.

Kalau kebijakan pemerintah Orde Baru menentang PGRS/PARAKU, maka PGRS/PARAKU akan ditumpas karena mengancam integritas Pemerintah Republik Indonesia.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Sejarah**

Pengertian metode mempunyai hubungan erat dengan metodologi, meskipun tetap dapat dibedakan. Metode penelitian sejarah lazim juga disebut metode sejarah. Metode itu sendiri berarti cara, jalan atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.<sup>52</sup> Menurut kamus *The New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language*, metode ialah: ”suatu cara untuk berbuat sesuatu; suatu

---

<sup>52</sup> Dudung Abdurahman, *op.cit*, hlm.53.

prosedur untuk mengerjakan sesuatu; keteraturan dalam berbuat, berencana; suatu susunan atau sistem yang teratur.”<sup>53</sup>

Kamus *The New Lexicon* memberikan definisi umum tentang metodologi: ”suatu cabang filsafat yang berhubungan dengan ilmu tentang metode atau prosedur; suatu sistem tentang metode-metode dan aturan-aturan yang digunakan dalam *science*”.<sup>54</sup> Metode di sini dapat dibedakan dari metodologi, sebab metodologi adalah ”*science of methods*”, yakni ilmu yang membicarakan “jalan”.<sup>55</sup>

Sartono Kartodirdjo membedakan antara metode sebagai ”bagaimana orang memperoleh pengetahuan” (*how to know*) dan metodologi sebagai ”mengetahui bagaimana harus mengetahui” (*to know how to know*). Dalam kaitannya dengan ilmu sejarah, dengan sendirinya metode-metode sejarah ialah ”bagaimana mengetahui sejarah,” sedangkan metodologi ialah ”mengetahui bagaimana mengetahui sejarah.”<sup>56</sup>

Louis Gottschalk secara lebih khusus memberi definisi metode sejarah sebagai ”proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang autentik dan dapat dipercaya, serta usaha sistesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya”.<sup>57</sup> Metode sejarah meliputi empat kegiatan pokok yaitu: heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi terhadap sumber dan penulisan sejarah atau historiografi.

---

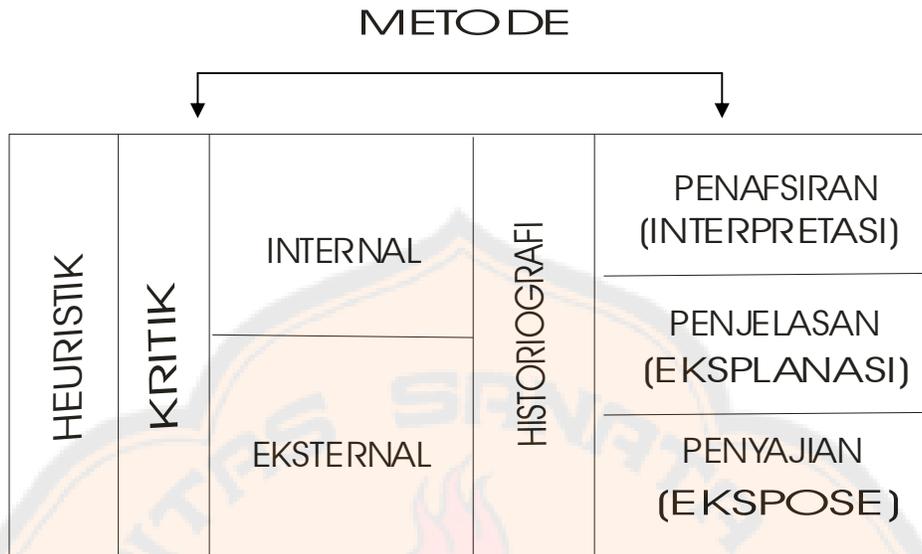
<sup>53</sup> Helius Sjamsudin, *op. cit.*, hlm.13.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.14.

<sup>55</sup> Dudung Abdurahman, *op. cit.*, hlm. 53.

<sup>56</sup> Helius Sjamsudin, *op. cit.*, hlm.14.

<sup>57</sup> Dudung Abdurahman, *op. cit.*, hlm. 54.



Gambar I:

Metodologi Sejarah<sup>58</sup>

Sementara yang disebut dengan penelitian, menurut Florence M.A. Hilbish adalah penyelidikan yang seksama dan teliti terhadap suatu subjek untuk menemukan fakta-fakta guna menghasilkan produk baru, memecahkan suatu masalah, atau untuk menyokong atau menolak suatu teori. Oleh karena itu, metode penelitian sejarah dalam pengertiannya yang umum adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahan dari perspektif historis.<sup>59</sup>

**a. Perumusan Judul**

Penelitian ini berjudul: Kebijakan Pemerintah RI Terhadap PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat 1963-1967. Secara garis besar penelitian ini ingin mengetahui alasan dari sikap Pemerintah RI terhadap sebuah organisasi

<sup>58</sup> Helius Sjamsudin, *op. cit.*, hlm.17.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm.53.

yang bernama PGRS/ PARAKU. PGRS/PARAKU singkatan dari Pasukan Gerilya Rakyat Serawak/ Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, merupakan organisasi yang dibentuk untuk melawan pembentukan negara Federasi Malaysia.

PGRS/PARAKU berdiri pada tahun 1963 dan mendapat dukungan dari pemerintahan Soekarno melalui Wakil Menteri Pertama Soebandrio. PGRS/PARAKU mendapat pelatihan militer dari Badan Pusat Intelijen di Bogor. Selain itu PGRS/PARAKU diperbolehkan menetap di wilayah-wilayah RI tepatnya di daerah-daerah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Barat.

Pasca Gerakan 30 September 1965, pemerintahan RI di bawah Soeharto berdasarkan kesepakatan bersama dengan Pemerintahan Malaysia melakukan penumpasan terhadap organisasi PGRS/PARAKU. Anggota-anggota PGRS/PARAKU diminta untuk meninggalkan kantong-kantong pertahanan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Namun, tidak semua yang mau menyerah begitu saja, sehingga Pemerintah Indonesia melakukan operasi militer dan untuk kemudian melakukan provokasi terhadap etnis Dayak-Tionghoa.

### **b. Pengumpulan Sumber (Heuristik)**

Sumber sejarah seringkali disebut juga "data sejarah". Kata "data" merupakan bentuk jamak dari kata tunggal "*datum*" (bahasa Latin) yang berarti "pemberitaan". Data sejarah itu sendiri berarti bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian dan pengategorisasian.<sup>60</sup> Teknik mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah disebut heuristik. Heuristik berasal dari kata Yunani *heurishein* yang artinya memperoleh. Menurut G.J. Renier, heuristik

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm.40.

adalah suatu teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu, heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum. Heuristik seringkali merupakan ketrampilan dalam menemukan, menangani dan memerinci bibliografi atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan.<sup>61</sup>

Menurut Helius Sjamsudin dalam buku Metodologi Sejarah, sumber-sumber dapat diklasifikasikan dengan beberapa cara: mutakhir atau kontemporer dan lama; formal dan informal; juga pembagian menurut asal (dari mana asalnya), isi (mengenai apa), dan tujuan (untuk apa), yang masing-masing dibagi-bagi lebih lanjut menurut waktu, tempat dan cara atau produknya.<sup>62</sup> Dudung Abdurahman dalam Metodologi Penelitian Sejarah membedakan klasifikasi sumber menurut bahannya yaitu sumber tertulis dan tidak tertulis; menurut cara penyampaiannya yaitu sumber primer dan sekunder; serta menurut tujuannya yaitu sumber formal dan informal.<sup>63</sup> Salah satu prinsip di dalam heuristik ialah sejarawan harus mencari sumber primer. Sumber primer di dalam penelitian sejarah adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata.

Dalam penelitian ini heuristik dilakukan dengan penelaahan dokumen-dokumen yang juga dikenal dengan *library research* dan penelitian lapangan dengan cara wawancara terhadap saksi mata. Penelaahan dokumen-dokumen dilakukan dengan mempelajari arsip-arsip yang berkaitan di Kantor Arsip Nasional dan Kantor Arsip Daerah. Selain itu juga akan dipelajari dokumen-dokumen dari militer dan buku-buku yang terkait. Penelitian di lapangan

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm.64

<sup>62</sup> Helius Sjamsudin, *op. cit.*, hlm. 96.

<sup>63</sup> Dudung Abdurahman, *op. cit.*, hlm. 40-41.

dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan saksi-saksi mata yang pernah menyaksikan dan berhubungan dengan PGRS/PARAKU. Selain itu juga wawancara dapat dilakukan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintahan yang hidup di masa yang serupa dengan PGRS/PARAKU.

### c. Kritik Sumber (Verifikasi)

Dalam usaha mencari kebenaran, sejarawan dihadapkan dengan kebutuhan untuk membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar, apa yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil. Sehubungan dengan kemungkinan di atas, untuk dapat memutuskan semuanya sejarawan harus mengerahkan segala kemampuan pikirannya. Bahkan seringkali ia harus menggabungkan antara pengetahuan, sikap ragu (skeptis), percaya begitu saja, menggunakan akal sehat dan melakukan tebakan intelijen. Inilah fungsi kritik sehingga karya sejarah merupakan produk dari suatu proses ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan.<sup>64</sup>

Kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama, tujuannya adalah untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini, dilakukan uji keabsahan tentang keaslian sumber (otentitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern.<sup>65</sup>

#### 1) Kritik ekstern (keaslian/otentitas sumber)

Sebelum semua kesaksian yang berhasil dikumpulkan oleh sejarawan dapat digunakan untuk merekonstruksi masa lalu, maka terlebih dahulu harus dilakukan

---

<sup>64</sup> Helius Sjamsudin, *op. cit.*, hlm.132.

<sup>65</sup> Dudung Abdurahman, *op. cit.*, hlm. 68.

pemeriksaan yang ketat. Sebagaimana disarankan oleh istilahnya, kritik eksternal ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah.<sup>66</sup>

Saat peneliti melakukan pengujian atas asli dan tidaknya sumber, berarti ia menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan. Bila dokumen itu berupa dokumen tertulis, maka dokumen tersebut harus diteliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, hurufnya, dan segi penampilan luar yang lain. Semua otentitas ini minimal dapat diuji berdasarkan lima pertanyaan pokok berikut:<sup>67</sup>

- a) Kapan sumber itu dibuat? Peneliti harus menemukan tanggal pembuatan dokumen. Setelah itu dihubungkan dengan materi sumber untuk mengetahui apakah tidak anakronistik (menyalahi jaman). Misalnya, sebuah dokumen dengan huruf ketikan diklaim berasal dari abad ke-18, jelas tidak tepat, sebab mesin ketik belum ditemukan sebelum abad ke-19.
- b) Di mana sumber itu dibuat? Ini berarti, peneliti harus mengetahui asal-usul dan lokasi pembuatan sumber yang dapat menciptakan keasliannya.
- c) Siapa yang membuat? Setelah diketahui siapa pengarang dari suatu dokumen, peneliti berusaha untuk melakukan identifikasi terhadap pengarang mengenai sikap, watak, pendidikan, lingkungan dan sebagainya (penyelidikan ini masuk ke kritik intern).<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Helius Sjamsudin, *op. cit.*, hlm.132.

<sup>67</sup> Dudung Abdurahman, *op. cit.*, hlm. 68-69.

<sup>68</sup> Helius Sjamsudin, *op. cit.*, hlm.136. Untuk tahap ini Helius Sjamsudin menambahkan, bila sumber ditulis lebih dari satu orang, maka sangat penting untuk mengetahui semua orang yang

- d) Dari bahan apa sumber itu dibuat? Untuk hal ini, analisis terhadap bahan atau materi yang berlaku pada jaman tertentu bisa menunjukkan otentitas.
- e) Apakah sumber itu dalam bentuk asli? Pengujian mengenai integritas sumber merupakan hal yang sangat menentukan. Kecacatan sumber dimungkinkan terjadi pada bagian-bagian dokumen yang disebabkan oleh usaha sengaja untuk memalsukan.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, kritik ekstern akan dilakukan terhadap sumber-sumber primer berupa dokumen-dokumen yang terdapat di Kantor Arsip Nasional dan Kantor Arsip Daerah. Mengutip pernyataan Dudung Abdurahman “Jika suatu dokumen tersimpan di tempat-tempat tertentu, seperti di dalam arsip keluarga, kantor niaga, kantor pemerintah, atau perpustakaan, maka penyimpanannya dapat menciptakan praanggapan mengenai otentitas”.<sup>69</sup>

## 2) Kritik intern (kredibilitas sumber)

Kebalikan dari kritik eksternal, kritik internal sebagaimana disarankan oleh istilahnya menekankan aspek “dalam” yaitu isi sumber: kesaksian (testimoni). Sejarawan harus memutuskan apakah kesaksian itu dapat diandalkan (*reliable*) atau tidak. Keputusan ini didasarkan atas penemuan dua penyidikan (inkuiri) yaitu:<sup>70</sup>

- a) Arti sebenarnya dari kesaksian itu harus dipahami. Apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh penulis (saksi)? Sejarawan harus menetapkan arti sebenarnya

---

bertanggung jawab atas sumber itu. Namun, dalam hal yang serupa sah saja untuk menyebutkan pejabat yang menandatangani sumber tersebut.

<sup>69</sup> Dudung Abdurahman, *op. cit.*, hlm.69.

<sup>70</sup> Helius Sjamsudin, *op. cit.*, hlm.143.

dari kesaksian itu. Dalam hal ini harus dibedakan kata-kata yang mempunyai dua pengertian yaitu: arti harfiah dan arti sesungguhnya.

- b) Saksi atau penulis harus jelas menunjukkan kompetensi dan verasitas (*veracity*, kebenaran). Sejarawan harus yakin bahwa saksi mempunyai kemampuan mental dan kesempatan untuk mengamati dan saksi menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan suatu pengertian yang benar mengenai kejadian itu.

Sejarawan lebih menyukai kesaksian lebih dari seorang saksi. Kemudian sejarawan menghendaki pula saksi-saksi yang kontemporer artinya dekat dengan kejadian yang dilaporkannya. Kemudian sejarawan menghendaki pula saksi-saksi yang kompeten dalam bidangnya, pertimbangannya masuk akal dan tidak memihak. Sejarawan mengharapkan sedapat mungkin mengumpulkan semua saksi yang mempunyai kualifikasi tinggi sehingga kesaksian mereka dapat dibandingkan satu sama lain, sehingga kesalahan-kesalahan dari salah seorang saksi dapat dihilangkan.<sup>71</sup>

Dalam penelitian mengenai PGRS/PARAKU tentu saja penulis harus memperhatikan kritik intern ini. Penulis melakukan perbandingan antara berbagai sumber yang berhasil didapat dan mencari kesesuaian dari sumber-sumber tersebut. Menurut Lucey (1984), seperti dikutip Heliuss Sjamsudin, terdapat tiga kemungkinan dalam membandingkan sumber:<sup>72</sup>

- a) Sumber-sumber lain dapat cocok dengan sumber A, sumber yang dibandingkan (*concurring sources*). Dalam hal ini setiap sumber saling mengisi mengenai satu peristiwa yang sama.

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm.151

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm.152

- b) Sumber-sumber lain berbeda dengan sumber A (*dissenting sources*). Di mana terdapat pertentangan yang sungguh-sungguh antara sumber-sumber itu, maka kecil alasan untuk menggunakan satu sumber saja atau setiap sumber harus diperhatikan.
- c) Sumber-sumber lain itu “diam” saja, artinya tidak menyebutkan apa-apa (*silent sources*).

#### **d. Interpretasi**

Interpretasi sejarah sering disebut juga dengan analisis sejarah. Dalam hal ini, ada dua metode yang digunakan, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Analisis sejarah itu sendiri bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu dalam suatu interpretasi yang menyeluruh.<sup>73</sup> Dengan demikian, analisis dan sintesis merupakan dua cara kerja yang berbeda, tapi saling melengkapi.

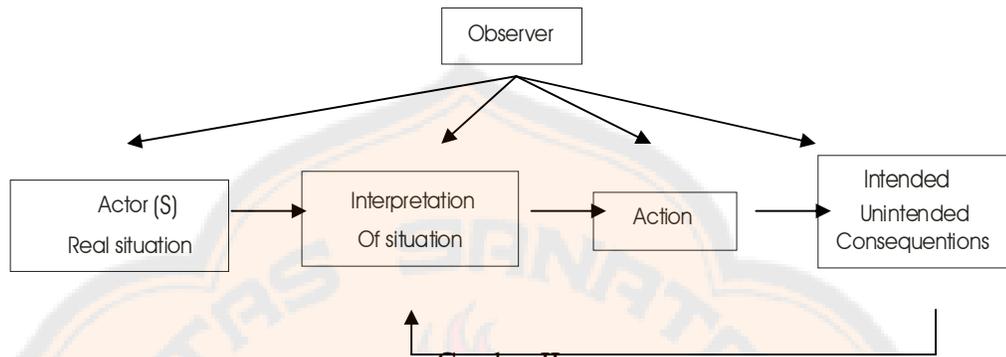
Sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang memandang setiap peristiwa dalam hukum kausalitas, selalu berusaha menemukan sebab suatu peristiwa yang kemudian akan memunculkan akibat. Dalam proses interpretasi sejarah, peneliti harus berusaha mencapai pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Interpretasi dapat dilakukan dengan cara memperbandingkan data guna menyingkap peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang sama. Jadi untuk mengetahui sebab-sebab dalam peristiwa sejarah memerlukan pengetahuan tentang masa lalu sehingga pada saat penelitian akan diketahui situasi pelaku, tindakan dan tempat peristiwa itu.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Dudung Abdurahman, *op. cit.*, hlm.73.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm.74.

Berkhofer dalam bukunya *A Behavioral Approach to Historical Analysis* menggunakan analisis sejarah dengan pendekatan situasional.<sup>75</sup>



Gambar II:  
Analisis Sejarah dengan Pendekatan Situasional

## e. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Langkah terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Layaknya laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal (fase perencanaan) hingga akhir (penarikan kesimpulan).<sup>76</sup> Hal yang membedakan penulisan sejarah dengan penulisan ilmiah bidang lain ialah penekanannya pada aspek kronologis. Karena itu, alur pemaparan data harus selalu diurutkan kronologisnya, sekalipun yang ditunjukkan di dalam pokok setiap pembahasan adalah tema tertentu.<sup>77</sup>

Penyajian penelitian ini terdiri atas lima bagian: (1) pengantar, (2) jawaban permasalahan pertama, (3) jawaban permasalahan kedua, (4) jawaban permasalahan ketiga, dan (5) kesimpulan. Setiap bagian biasanya terjabarkan

<sup>75</sup> *Idem*

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm.76.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm.77.

dalam bab-bab atau subbab yang jumlahnya tidak ditentukan secara mengikat, yang penting antara satu bab dengan bab lain harus ada pertaliannya yang jelas.

Bagian pengantar, biasanya disebut dengan pendahuluan atau mukadimah. Di dalamnya harus dikemukakan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, teori dan konsep yang dipakai, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari proposal penelitian.<sup>78</sup>

Bagian hasil penelitian, sebagai inti dari penulisan, memuat bab-bab yang berisi uraian dan pembahasan atas permasalahan yang sedang diteliti. Setiap fakta yang ditulis harus disertai data yang mendukung. Di sini juga tampak pertanggungjawaban penulis, terutama mengenai kutipan langsung maupun tak langsung atas fakta dan data. Pencatuman catatan kutipan ini tidak hanya dianggap penting, tapi juga mencerminkan etika ilmiah penulis dan memberikan kemudahan bagi pembacanya.<sup>79</sup>

Bagian kesimpulan isinya adalah mengemukakan generalisasi dari yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan hasil dari analisis terhadap data dan fakta yang telah dihimpun, atau merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan di bagian pengantar. Kesimpulan harus dirumuskan secara ringkas, jelas, tegas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulisnya.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm.78.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm.78-79.

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm.79.

## 2. Pendekatan

Dalam perkembangan penelitian dan penulisan sejarah terutama pada abad ke-20 dan abad ke-21 ini para sejarawan telah membiasakan diri mengenal dan menggunakan sejumlah konsep, baik yang dikenal dari dalam lingkungan sejarah sendiri maupun yang diangkat dari ilmu-ilmu sosial lain. Ketika menganalisis berbagai peristiwa atau fenomena masa lalu, sejarawan menggunakan konsep-konsep dari berbagai ilmu sosial tertentu yang relevan dengan pokok kajiannya. Ini dikenal dengan pendekatan interdisiplin dan multidimensional yang memberikan karakteristik "ilmiah" pada sejarah.<sup>81</sup>

Penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah RI Terhadap PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat 1963-1967 menggunakan dua pendekatan yaitu sosiologi dan ilmu politik. Pendekatan dengan bantuan sosiologi akan membantu dalam menjelaskan munculnya PGRS/PARAKU sebagai gerakan sosial yang akan dijelaskan dengan teori gerakan sosial. Sementara pendekatan dengan bantuan ilmu politik akan membantu dalam menjelaskan perbedaan sikap antara pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru yang akan dijelaskan dengan teori kekuasaan dan konflik.

## 3. Jenis Penulisan

Dalam penulisan sejarah, digunakan secara bersamaan tiga bentuk teknis dasar tulis menulis yaitu deskripsi, narasi dan analisis. Ketika sejarawan menulis ada dua dorongan utama yang menggerakannya yakni mencipta-ulang (*re-create*) dan menafsirkan (*interpret*). Dorongan pertama menuntut deskripsi dan narasi, sedangkan dorongan kedua menuntut analisis.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Helius Sjamsudin, *op. cit.*, hlm.303.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm.158.

Penelitian yang penulis lakukan menuntut untuk menggunakan jenis penulisan deskriptif-naratif-analitis. Hal tersebut dilakukan karena selain ingin menghadirkan masa silam melalui jejak-jejak yang ada, penulis juga ingin menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana yang menuntut cara pikir analitis. Dengan demikian, jenis penulisan deskriptif-naratif-analisis yang mampu mengakomodir kebutuhan tersebut.

#### **4. Sistematika Penulisan**

Skripsi yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat 1963-1967" akan dibuat sistematika penulisan agar mempermudah penulisan dan mendapat gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I: merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, hipotesis, metode dan pendekatan penelitian, serta sistematikan penulisan.

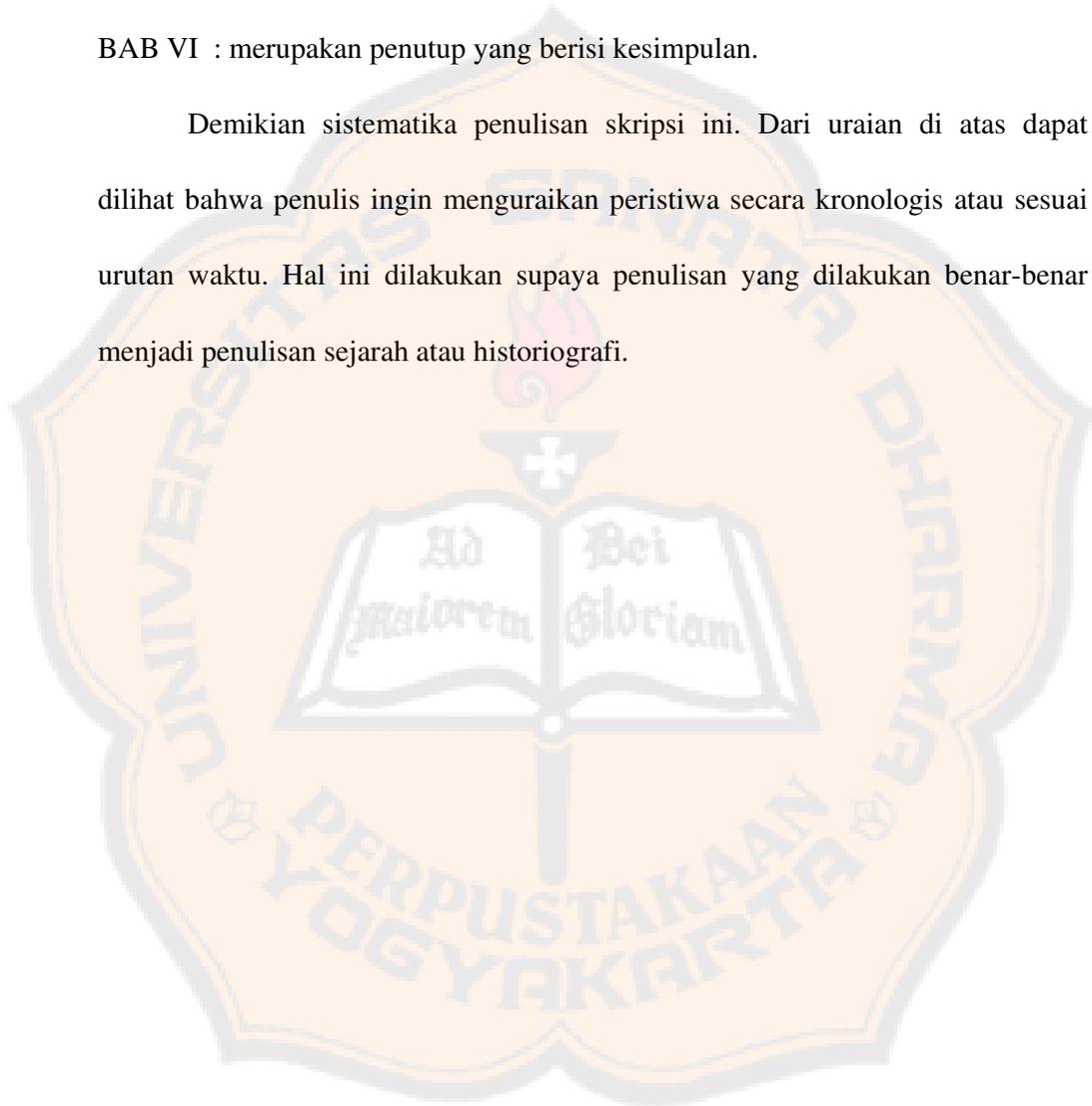
BAB II: menguraikan mengenai munculnya organisasi PGRS/PARAKU dan situasi politik Indonesia, Malaysia dan dunia di sekitar berdirinya.

BAB III: menguraikan sikap Pemerintah Republik Indonesia terhadap PGRS/PARAKU. Dalam hal ini akan diuraikan sikap pemerintah orde lama dan sikap pemerintah orde baru beserta latar belakang dan alasan munculnya sikap yang berbeda antara dua pemerintahan.

BAB IV: menguraikan pengaruh dari kebijakan pemerintah Republik Indonesia terhadap PGRS/PARAKU dan masyarakat sekitarnya pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru.

BAB VI : merupakan penutup yang berisi kesimpulan.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa penulis ingin menguraikan peristiwa secara kronologis atau sesuai urutan waktu. Hal ini dilakukan supaya penulisan yang dilakukan benar-benar menjadi penulisan sejarah atau historiografi.



## **BAB II**

### **TERBENTUKNYA PGRS/ PARAKU**

#### **A. Usaha Pembentukan Federasi Malaysia**

Terbentuknya gerakan yang dikenal dengan nama PGRS/PARAKU (Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak/ Pasukan Rakyat Kalimantan Utara) tidak dapat dilepaskan dari peristiwa terbentuknya Federasi Malaysia. Berdirinya Federasi Malaysia mendapat tanggapan pro dan kontra dari negara-negara bekas koloni Inggris di Asia Tenggara maupun dari pihak luar, seperti Indonesia dan Filipina. Di antara negara-negara bekas koloni Inggris di Asia Tenggara terdapat kelompok-kelompok yang tidak setuju terhadap berdirinya Federasi Malaysia. Kelompok-kelompok tersebutlah yang akan menjadi embrio terbentuknya PGRS/PARAKU.

Gagasan pembentukan sebuah federasi bernama Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura dan daerah-daerah koloni Inggris di Kalimantan Utara sudah menjadi buah bibir di tahun 1960. Pada awalnya gagasan yang muncul adalah penggabungan antara Persekutuan Tanah Melayu (PTM) dengan Singapura. Gagasan ini tidak disambut baik oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yaitu Tunku Abdul Rahman. Adapun alasan Tunku Abdul Rahman, seperti yang dikutip dari buku Tandjungpura Berdjung adalah sebagai berikut:

1. Masalah perbandingan jumlah penduduk Cina akan lebih besar dari bangsa Melayu, yang akan menimbulkan problem dalam bidang ekonomi maupun politik, terutama ditinjau dari perkembangan Malaya.
2. Kekawatiran akan kemungkinan dominasi mutlak golongan Cina di bidang ekonomi.

3. Bahaya kemungkinan meluasnya pengaruh komunisme ke Semenanjung Malaya (Wilayah PTM/Persekutuan Tanah Melayu).<sup>83</sup>

	Malays and Other Indigenous Groups	Chinese	Indians	Others	Total
Malaya (1957 census)	3,125,474	2,333,756	696,186	123,342	6,278,758
	(49.8%)	(37.1%)	(11.1%)	(2.0%)	
Singapore (1957 census)	197,060	1,090,595	124,084	34,190	1,445,929
	(13.6%)	(75.1%)	(8.6%)	(2.7%)	
Total	3,322,534	3,424,351	820,270	157,532	7,724,687
	(43.0%)	(44.3%)	(10.6%)	(2.1%)	(100%)

Tabel 1

*Racial Composition of Malaya and Singapore*<sup>84</sup>

Akan tetapi kemudian Tunku Abdul Rahman menyetujui bahkan menganjurkan pembentukan federasi yang mencerminkan suatu "Malaya Raya". Gagasan baru dari Tunku Abdul Rahman untuk membentuk Negara Federasi Malaysia pertama kali dikemukakan di depan *Foreign Correspondent Association* di Singapura pada tanggal 27 Mei 1961. Gagasan tersebut bertujuan untuk mengadakan federasi antara Persekutuan Tanah Melayu (PTM), Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei.<sup>85</sup> Dalam pertemuan tersebut Tunku Abdul Rahman berkata:

*"Malaya could not stand alone in isolation and suggested that sooner or later his country, should have an understanding with Britain and the peoples of the territories of Singapore, North Borneo (Sabah), Brunei and Sarawak... It is premature for me to say now how this closer undertaking can be brought about but it is inevitable that we should look ahead to this*

<sup>83</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm.156.

<sup>84</sup> James P. Ongkili, *Nation-Building in Malaysia 1946-1974*, Singapura, Oxford University Press, 1985, hlm. 153.

<sup>85</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm.156.

*objective and think of a plan whereby these territories can be brought closer together in political and economic cooperation”<sup>86</sup>*

[Malaya sudah tidak bisa berdiri sendiri menutup diri dan mengusulkan itu lebih cepat atau negaranya kemudian, akan punya sebuah kesepakatan dengan Inggris dan orang-orang pada wilayah Singapura, Kalimantan Utara (Sabah), Brunei dan Sarawak... Sekarang ini terlalu cepat bagi saya untuk berkata bagaimana melakukan secepatnya yang bisa membawa tentang hal ini, tetapi ini tak dapat dihindari dimana kita dapat melihat dimuka untuk sasaran ini dan memikirkan sebuah rencana ke arah mana wilayah-wilayah ini bisa membawa kebersamaan semakin dekat dalam kerja sama ekonomi dan politik]

Adapun pertimbangan Tunku Abdul Rahman seperti yang ditulis dalam buku *Tanjungpura Berjuang* adalah:

1. Jumlah penduduk Melayu dan Penduduk asli Kalimantan akan melebihi jumlah penduduk Cina.
2. Akan membantu usaha negara-negara anti komunis untuk dapat membentuk suatu kekuatan yang dapat membendung "arus" komunis dari Cina RRT (Tiongkok).
3. Apabila Singapura berdiri sendiri akan mudah dipengaruhi komunis.
4. Untuk dapat membendung/ mengontrol gerakan "Revolusi Indonesia" yang pada saat itu sudah memperlihatkan gejala yang mengarah kepada kerja sama dengan blok komunis/RRT.<sup>87</sup>

	Malays and Other Indigenous Groups	Chinese	Others	Total
Malaya and Singapore	3,322,534	3,424,351	977,802	7,724,687
The Borneo Territories	873,853	355,491	54,383	1,282,827
Total	4,195,387	3,779,842	1,032,185	9,007,514
	(46.6%)	(41.9%)	(11.5%)	(100%)

Tabel 2

*Racial Composition of Malaya and Singapore*<sup>88</sup>

<sup>86</sup> James P. Ongkili, *op. cit.*, hlm. 152.

<sup>87</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 156.

<sup>88</sup> James P. Ongkili, *op. cit.*, hlm. 154.

Pernyataan Abdul Rahman pada *Foreign Correspondent Association* belum mendapat tantangan dari pihak luar, seperti yang terjadi kemudian oleh Indonesia dan Filipina. Hal ini dikarenakan pernyataan Abdul Rahman benar-benar keluar dari dirinya sebagai “suara” pemerintahan PTM. Di kemudian hari keinginan Abdul Rahman untuk mendirikan Federasi Malaysia akan dipertanyakan karena kedekatannya dengan Pemerintahan Kolonial Inggris di Malaya. Konsep untuk mendirikan sebuah negara federasi yang menggabungkan seluruh koloni Inggris di Asia Tenggara didasarkan gagasan asli Abdul Rahman ataukah didasarkan tekanan dari Inggris.

Pada bulan Juni 1961 para pemimpin Inggris di Kalimantan Utara (*British leaders of Northern Borneo*) – Governor Sir Alexander Waddell of Sarawak, *High Commissioner to Brunei* D.C. White and *Governor Sir William Goode of Sabah* – dipanggil oleh Komisaris Jenderal Inggris untuk Asia Tenggara, Lord Selkirk. Dalam dua hari pertemuan yang dilakukan di Singapura, mereka mengusulkan “*that the Borneo territories should bind themselves closer together before joining the Malaysia confederation*”<sup>89</sup> [wilayah Borneo dapat mengikat diri mereka sendiri semakin dekat sebelum bergabung dengan Konfederasi Malaysia]. Hal ini dapat diartikan sebagai dukungan terhadap pembentukan sebuah Federasi antara negara-negara bekas koloni Inggris di Asia Tenggara. Di mana sebelum dilakukan peleburan antara PTM, Singapura, Serawak, Brunei dan Sabah, akan lebih baik jika masing-masing negara melakukan kerja sama yang semakin intensif.

Satu minggu sebelum pertemuan para pemimpin Inggris tersebut, Perdana Menteri Inggris, Harold MacMillan telah mengamati dengan cermat proposal Malaysia yang dibuat Tunku Abdul Rahman. Terhadap proposal tersebut

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 162

MacMillan berpendapat “*Tunku Abdul Rahman’s statement is already stimulating discussion in these countries, and Government will wish to take their reactions into account in their consideration of the suggestion*”<sup>90</sup> [Pernyataan Tunku Abdul Rahman telah memancing diskusi di negara ini (Inggris), dan pemerintah berharap dapat mengambil sikap mereka ke dalam laporan pertimbangan mereka untuk diusulkan]. Pernyataan Harold MacMillan tersebut mengungkapkan bahwa peran Pemerintah Kerajaan Inggris masih sangat berpengaruh terhadap negara bekas koloninya. Hal ini tentu saja terkait dengan *Commonwelth of Britain* atau Persemakmuran di antara negara-negara bekas jajahan Inggris. Namun, logika demikian tidak dapat diterima Indonesia, sebuah bangsa yang merebut kemerdekaannya melalui revolusi fisik.

Dalam buku *Nation-Building in Malaysia 1946-1974* juga dituliskan mengenai rencana Inggris untuk wilayah Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara Inggris “*British strategic interest in the area is shared by Australia and New Zealand and some common policy will have to be evolved. If strategic needs can be satisfied there should be no further political objection from Britain*”<sup>91</sup> [Inggris tertarik dengan rencana membagi bersama daerah (Malaysia) dengan Australia dan New Zealand dan memiliki kesamaan dalam kebijakan akan mampu membuat berkembang. Jika strategi tersebut memerlukan bisa memenuhi mereka dengan tidak lebih jauh menjalankan politik yang memberatkan Inggris]

Dalam usaha merintis jalan ke arah realisasi pembentukan Federasi Malaysia, diadakan pembicaraan dalam *Commontwealth Parleментарy Association Regional Meeting* pada tanggal 22-26 Juni 1961 di Kuala Lumpur,

---

<sup>90</sup> *Idem.*

<sup>91</sup> *Idem.*

yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei, serta peninjau-peninjau dari Inggris, New Zealand dan Australia. Dalam pertemuan tersebut diputuskan untuk mendirikan *Malayan Solidarity Consultative*. *Malayan Solidarity Consultative* adalah suatu badan yang berfungsi untuk merumuskan gagasan persatuan antara bangsa-bangsa rumpun Melayu. Badan ini resmi bersidang untuk pertama kalinya pada tanggal 21 Agustus 1961.<sup>92</sup>

Dalam perundingan antara PM Abdul Rahman dan PM Inggris MacMillan di London dalam bulan Oktober 1961<sup>93</sup> diputuskan tiga hal pokok. Pertama, Inggris dan Federasi Malaya menyetujui penggabungan (*merger*) Singapura dan Malaya. Kedua, Inggris dan Federasi Malaya akan mengadakan penyelidikan yang mendalam tentang pembentukan Federasi Malaysia, yang untuk keperluan itu akan dibentuk sebuah komisi. Ketiga, Persetujuan Pertahanan antara Inggris dan Federasi Malaya akan diperluas hingga meliputi seluruh daerah Federasi Malaysia.<sup>94</sup>

Sebagai tindak lanjut keputusan kedua, pada bulan Januari 1962 terbentuklah panitia penyelidik yang dinamakan *Fact – Finding Commission* yang

---

<sup>92</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 157. Lihat juga James P. Ongkili, *op. cit.*, hlm. 163.

<sup>93</sup> Hidayat Mukmin, *TNI Dalam Politik Luar Negeri*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991, hlm. 88. Bandingkan dengan SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm.157 disebutkan pemerintah Inggris mengadakan perundingan dengan pemerintah Persekutuan Tanah Melayu pada tanggal 13 Oktober 1961 dengan isinya “keputusan bersama untuk membentuk panitia penyelidikan yang bertugas mengumpulkan data-data pendapat rakyat, di daerah-daerah yang akan bergabung dalam Federasi Malaysia”.

<sup>94</sup> Menurut situs Angkatan Udara Supadio <http://www.tni-au.mil.au> tanggal 20-22 November 1961, PM Persekutuan Tanah Melayu bertandang ke London untuk meminta persetujuan terkait dengan daerah-daerah Inggris di Kalimantan Utara. Hasil pembicaraan adalah: 1) Membentuk Federasi Malaysia yang meliputi Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunei; 2) Untuk kepentingan Malaysia nanti, perjanjian pertahanan yang telah ada antara Inggris dengan Malaya akan diperluas meliputi daerah-daerah lain, Inggris akan mempertahankan pangkalannya di Singapura untuk kepentingan Malaysia maupun SEATO.

diketuai Lord Cobbold. Anggota panitia penyelidik, selain dari Lord Cobbold, dua dari Inggris dan dua dari Malaya yaitu Sir Anthony Abell, Sir David Watherston, Dato Wong Po Nee dan Enche Gazali bin Shafei.<sup>95</sup> “... *From 19 February to April 17, 1962, the committee conducted hearings with the people of the British Colonies, asking them if they favored a merger with Malaya and Singapore. The hearings confirmed that two thirds of the people interviewed approved the merger.*”<sup>96</sup> [... Dari tanggal 19 Februari sampai 17 April 1962, komisi itu mengadakan dengar pendapat dengan masyarakat yang tinggal di Kalimantan Utara, menanyakan apakah mereka mau bergabung dengan Malaka (PTM) dan Singapura atau tidak. Dengar pendapat tersebut menyetujui bahwa dua pertiga masyarakat yang diwawancarai menyetujui penggabungan.]

Hasil kerja Komisi Cobbold kemudian dimuat dalam *Report of the Commission of Inquiry, North Borneo and Serawak* tahun 1962. Dari laporan ini diketahui adanya suara yang pro dan kontra pembentukan Federasi Malaysia.<sup>97</sup> Sepertiga penduduk menyetujui tanpa syarat, sepertiga lainnya menyetujui dengan syarat agar kepentingan daerah terjamin. Sedangkan yang sepertiga lainnya terbelah menjadi dua, sebagian ingin tetap terus di bawah Pemerintahan Inggris

---

<sup>95</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 157. Lihat juga Hidayat Mukmin, *op. cit.*, hlm. 88.

<sup>96</sup> Baskara T. Wardaya, *op. cit.*, hlm. 362. Dalam SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 157 yang menentang Federasi Malaysia berjumlah 20%, yang terdiri dari bukan penduduk asli yaitu dari golongan Cina.

<sup>97</sup> Dalam *Aide Memoire* dari peninjau-peninjau Filipina kepada Misi Malaysia PBB di Serawak dan Sabah dikatakan “Komisi Cobbold melakukan penyelidikan di 15 kota dalam 23 hari... menerima lebih dari 600 surat dan memorandum” Lihat Departemen Penerangan RI, *Gelora Konfrontasi Menggajang Malaysia*, Jakarta, Departemen Penerangan RI, 1964, hlm. 135-136. Menurut James P. Ongkili, *op. cit.*, hlm. 165, Komisi Cobbold melakukan 50 dengar pendapat di 35 lokasi berbeda (20 di Serawak dan 15 di Sabah). Lebih dari 4.000 orang terlibat yang kemudian dibedakan dalam 690 grup/kelompok.

dan sebagian ingin memperoleh kemerdekaan terlebih dahulu sebelum bergabung dengan federasi.<sup>98</sup>

Keputusan-keputusan lain yang penting adalah perlunya suatu masa peralihan antara satu sampai sepuluh tahun. Kepala Negara Federasi Malaysia akan ditunjuk oleh Yang Dipertuan Agung dengan persetujuan Baginda Ratu Inggris. Kepala negara akan dipilih di antara sultan-sultan Malaya dan Brunei. Islam akan menjadi agama negara, dengan adanya kebebasan beragama bagi pemeluk agama lain, sedangkan bahasa Melayu akan menjadi bahasa nasional.<sup>99</sup>

*As the plan for the federation gained wider support, on May 27, 1961, Malaya's Prime Minister Tunku Abdul Rahman, also known as the Tunku, publicly announced Malaya's merger with Singapore and three British Crown colonies in Northern Borneo, to be called the Federation of Malaysia. He also announced that the British and Malayan governments had agreed on the date for establishment of Malaysia, which was August 31, 1963.<sup>100</sup>*

[Sepanjang rencana untuk memperoleh dukungan yang lebih besar, pada 27 Mei 1961 Perdana Menteri Malaya Tunku Abdul Rahman, juga dikenal dengan Tunku, mengumumkan di depan umum bergabungnya Malaya dengan Singapura dan tiga daerah koloni Inggris di Kalimantan Utara untuk kemudian disebut Federasi Malaysia. Dia juga mengumumkan bahwa Pemerintah Inggris dan Malaya sudah menyetujui tanggal pembentukan Malaysia, yang mana akan dilakukan 31 Agustus 1963.]

Pada tanggal 18 – 31 Juli 1962 di London diadakan lagi perundingan antara Inggris dan Persekutuan Tanah Melayu. Setelah mempelajari hasil Komisi Cobbold, perundingan London itu memutuskan:

1. Menyetujui rekomendasi komisi Cobbold.
2. Direncanakan tanggal 31 Agustus 1963 sebagai hari lahirnya Malaysia.
3. Hubungan Singapura - Malaysia sesuai dengan persetujuan yang dicapai antara Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu.

---

<sup>98</sup> Hidayat Mukmin, *op. cit.*, hlm.88.

<sup>99</sup> *Idem.*

<sup>100</sup> Baskara T. Wardaya, *op. cit.*, hlm. 362

4. Pola pertahanan bersama antara Malaysia dan Inggris sesuai dengan persetujuan pertahanan antara Inggris dan Persekutuan Tanah Melayu.
5. Konstitusi Malaysia harus menurut “*safe-guards*” dan “*special interest*” dari Singapura, Serawak, Sabah dan Brunei.
6. Dibentuk suatu *Inter Governmental Comitte* dengan tugas pokok: menyusun sebuah kontitusi bagi Malaysia, yang diketuai oleh Menteri Jajahan Inggris Lord Landawn, Wakil Ketua oleh Wakil Perdana Menteri Tun Abdul Razak dan beranggotakan 20 orang yang terdiri dari wakil-wakil dari Borneo Utara, Serawak, Malaya, Singapura dan Inggris. Markas besarnya di Jesselton.<sup>101</sup>

Menanggapi keputusan hasil perundingan di London, Pemerintah Singapura mengadakan referendum mengenai rencana fusi tersebut. Referendum dilaksanakan pada tanggal 1 September 1962. Hasilnya 70% menyetujui rencana Pemerintah Singapura yang pokoknya berisi:

1. Otonomi yang luas.
2. Yang Dipertuan Negara ditunjuk Yang Dipertuan Agung.
3. Semua Warga Negara Singapura berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan State dan Federal di Singapura.
4. Perburuhan dan pendidikan menjadi tanggung jawab Negara Bagian (Singapura).
5. Bahasa Melayu sebagai *National Language*, tapi bahasa Inggris, Mandarin, dan Tamli tetap dipakai sebagai *official language*.
6. Singapura berhak mendapat 15 kursi dalam Parlemen.<sup>102</sup>

Referendum serupa juga dilaksanakan di daerah-daerah yang akan bergabung di bawah Federasi Malaysia yaitu di Malaya, Singapura, Serawak, Brunei dan Sabah. Walaupun mendapat dukungan sebagian besar rakyat, akan tetapi juga mendapat tantangan dari berbagai daerah tersebut. Gagasan mengenai Federasi Malaysia juga mendapat reaksi dan tantangan dari berbagai negara tetangga seperti Indonesia dan Filipina.

---

<sup>101</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 158.

<sup>102</sup> *Idem*, pada tanggal 7 Agustus 1965 Singapura memutuskan keluar dari Federasi dalam persetujuan yang disebut “*An Agreement Relating to the Separation of Singapore from Malaysia as an Independence and Sovereign State*” Lihat Hidayat Mukmin, *op. cit.*, hlm. 109.

## B. Reaksi Dari Dalam Federasi Malaysia

Gagasan pembentukan Federasi Malaysia menurut laporan Cobbold mendapat sambutan yang positif di daerah-daerah yang nantinya akan bersatu dalam Federasi Malaysia. Namun, gagasan pembentukan Federasi Malaysia bukannya tanpa tantangan dari dalam negeri. Pada beberapa daerah "calon" anggota Federasi Malaysia, terdapat partai-partai besar yang menolak pembentukan Federasi Malaysia. Di Sarawak terdapat Sarawak United People Party yang kontra dengan gagasan Federasi. Di Brunei, partai yang terbesar yaitu Partai Rakyat Brunei secara terang-terangan menolak bergabung dengan Federasi Malaysia. Partai-partai yang pro dan kontra terhadap pembentukan Federasi Malaysia adalah sebagai berikut:<sup>103</sup>

Partai PTM pro:

1. United Malay National Organization.
2. Malaysia Chinese Association.
3. Malaya India Congress
4. People Progressive Party of Malaya

Partai PTM kontra:

1. Labour Party.
2. Partai Rakyat.
3. P.N.I.P (PAS).
4. Socialis Front

Partai Singapura pro:

1. People Action Malaysia
2. UMNO Singapura
3. Singapura People Allied

Partai Singapura kontra:

1. Labour Party
2. Singapura Congress.
3. Barisan Sosialis.
4. Partai Rakyat Singapura

Partai Sarawak pro:

1. Partai Negara (UNAS)
2. Barisan Rakyat Jati Sarawak.
3. Serawak Nation Party.
4. Partai Posaka Anak Sarawak.
5. Sarawak Chinese Association

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 159-160.

6. Sarawak Indian Association
- Partai Sarawak kontra: 1. Sarawak United People Party  
Partai Sabah (tidak ada partai)
- Partai Brunei pro : 1. Brunei National Organization  
2. Brunei United Party  
3. Brunei Organization
- Partai Brunei kontra : 1. Partai Rakyat Brunei

Sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembentukan Federasi Malaysia, tanggal 8 Desember 1962 di Brunei telah timbul pemberontakan yang dipimpin oleh Sheik A.M. Azahari dari Partai Rakyat Brunei, yang merupakan partai terbesar di Brunei.<sup>104</sup> Azahari telah memproklamkan berdirinya Negara Nasional Kalimantan Utara. Azahari mengklaim wilayah Negara Nasional Kalimantan Utara ini meliputi daerah Sarawak, Brunei dan Sabah. Selain itu Azahari juga berhasil membentuk kesatuan militer yang disebut Tentara Nasional Kalimantan Utara.<sup>105</sup>

Pemberontakan ini kemudian tidak berhasil menguasai daerah-daerah yang diproklamirkannya sebagai daerah kekuasaannya, meskipun dalam beberapa saat dapat menguasai beberapa kota. Setelah Tentara Inggris melakukan pembersihan, maka kedudukan gerakan yang dibentuk Azahari ini berpindah ke Manila.<sup>106</sup> Masalah Negara Kalimantan Utara ini kemudian menjadi problem internasional, setelah kemudian Indonesia mengakui Negara Kalimantan Utara pimpinan Azahari. Bahkan Indonesia memberi hak hidup dan menjamin basis kekuatannya

---

<sup>104</sup> Partai Rakyat Brunei didirikan oleh Azahari pada tahun 1956. Pada pemilihan umum bulan Agustus 1962 memenangkan lima puluh (50) dari lima puluh empat (54) kursi yang diperebutkan. Hidayat Mukmin, *op. cit.*, hlm. 89.

<sup>105</sup> Soemadi, *Peranan Kalimantan Barat Dalam Menghadapi Subversi Komunis Asia Tenggara*, Pontianak, Yayasan Tanjungpura, 1974, hlm. 53. Lihat SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 160. Baskara T. Wardaya, *op. cit.*, hlm. 363.

<sup>106</sup> Soemadi, *op. cit.*, hlm. 53.

di wilayah Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat.<sup>107</sup> Kebijakan Pemerintah Indonesia saat itu memberikan *asylum* politik kepada Perdana Menteri Azahari dan Panglima Abang Kifli di Jakarta.<sup>108</sup>

Berdirinya Negara Kalimantan Utara mengakibatkan Partai Komunis Sarawak<sup>109</sup> juga mendapat tekanan dari penguasa. Oleh karena itu, sejalan dengan kebijakan politik Indonesia waktu itu, pemimpin-pemimpin komunis dari Sarawak "hijrah" ke Kalimantan Barat.<sup>110</sup> Sedangkan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dalam rangka menyelamatkan Partai Komunis Sarawak mengirimkan Wen Min Tjuen dan Wong Kee Chok ke Kalimantan Barat pada awal tahun 1963. Di Kalimantan Barat, kedua pemimpin Partai Komunis Cina tersebut menemui Yap Chung Ho, Wong Ho, Liem Yen Hwa dan Yacob dari *Sarawak Advance Youth Association* (SAYA)<sup>111</sup> untuk membahas garis perjuangan dari Partai Komunis Sarawak. Adapun keputusannya antara lain:

1. Partai Komunis Sarawak (PKS) bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan Partai Komunis Indonesia (PKI), serta Negara Nasional Kalimantan Utara (NNKU).
2. Menghimpun kekuatan-kekuatan revolusioner dan mempererat hubungan dagang dengan masyarakat Dayak.
3. Membuat basis di perbatasan Sarawak dan Kalimantan Barat dengan berjuang terus dan mempertajam ajaran-ajaran Mao.<sup>112</sup>

---

<sup>107</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 160.

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm 233.

<sup>109</sup> Partai Komunis Sarawak (*Sarawak Communist Organization/SCO*) adalah partai yang dianggap ilegal di Sarawak karena berideologi komunis, semacam "PKI malam" di Indonesia sesudah tahun 1965, lihat Soemadi, *op.cit.*, hlm.54. SCO juga dikenal dengan *Clandestine Communist Organization* (CCO) sebuah organisasi yang sudah berdiri sejak Perang Dunia II, embrionya adalah *Sarawak Anti-Fascist League*, periksa James P. Ongkili, *op. cit.*, hlm. 143.

<sup>110</sup> Soemadi, *op. cit.*, hlm. 54.

<sup>111</sup> SAYA berdiri tahun 1954, adalah pembaharuan dari *Sarawak Liberation League*, kemudian menjadi organ SCO atau CCO. Sejak awal SAYA dan SCO/CCO sudah anti terhadap Inggris, seperti kerja sama mereka dengan *Anti-British League* dari Singapura tahun 1952. Periksa James P. Ongkili, *op. cit.*, hlm. 143.

<sup>112</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 233.

Untuk merealisasikan garis perjuangan Partai Komunis Sarawak kemudian melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Azahari di Sintang, Kalimantan Barat pada tahun 1963. Dari pertemuan di Sintang kemudian lahir gagasan untuk membentuk Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU).<sup>113</sup>

### C. Reaksi Indonesia

Pada awalnya Indonesia tidak berkeberatan dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia, meskipun koloni-koloni Kerajaan Inggris tersebut banyak yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia di Pulau Kalimantan. Dalam surat kepada *New York Times* tanggal 17 November 1961, Menteri Luar Negeri Soebandrio menyampaikan dukungannya bagi Malaysia, seperti yang dikutip dari *Cold War Shadow*:

*“ As an example of our honesty and lack of expansionist intent, one-fourth of the island of Kalimantan (Borneo), consisting of three Crown Colonies of Great Britain, is now becoming the target of the Malayan Government for a merger. Of course, the people there are ethnologically and geographically very close to the others living in Indonesian territory. Still, we do not show any objection toward this Malayan policy of merger. On the contrary, we wish the Malayan Government well if it can succeed with this plan”*<sup>114</sup>

[sebagai salah satu contoh dari ketulusan hati kami dan tiada niat kami untuk bersifat ekspansionis, kami membiarkan seperempat Pulau Kalimantan (Borneo), yang terdiri dari tiga Koloni Kerajaan Inggris, menjadi sasaran Pemerintah Malaka untuk dilebur. Tentu saja masyarakat yang tinggal di koloni-koloni itu secara etnis dan geografis dekat dengan rakyat yang berdiam di wilayah Indonesia. Namun begitu, kami tidak keberatan sama sekali dengan kebijakan peleburan Malaka ini. Sebaliknya kami mengharapkan yang terbaik bagi Pemerintah Malaka sekiranya nanti berhasil dengan rencana ini] “

Satu minggu kemudian, dalam sebuah pidato di hadapan Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1961, Soebandrio memberikan pernyataan serupa

<sup>113</sup> *Idem.*

<sup>114</sup> Baskara T. Wardaya, *op. cit.*, hlm. 363.

*“When Malaya told us of their intentions to merge with the three British Crown Colonies... We told them that we have no objections and that we wish them success... Indonesia had no objections to merger based on the will of the people concerned”*<sup>115</sup> [Ketika Malaya memberitahukan kepada kami niat mereka untuk melebur dengan tiga koloni Inggris..., kami katakan kepada mereka bahwa kami tidak memiliki keberatan dan kami berharap semoga berhasil... Indonesia tidak menentang rencana peleburan tersebut bila rencana itu memang didasarkan pada kehendak masyarakat yang bersangkutan]

Pada awal Desember 1962, Indonesia mengubah sikapnya atas masalah ini, dari mendukung peleburan menjadi menentangnya. Perubahan yang tiba-tiba ini disebabkan karena terjadinya gerakan menentang Federasi Malaysia tanggal 8 Desember 1962 di Brunei, yang dipimpin oleh Syekh A.M. Azahari, Presiden Partai Rakyat Brunei. Azahari dan pengikutnya menyatakan berdirinya Negara Nasional Kalimantan Utara (*Unitary State of North Kalimantan*).<sup>116</sup> Bagi Indonesia pecahnya perlawanan yang dikobarkan Azahari menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat di bekas koloni Inggris menerima usulan untuk bergabung dalam sebuah negara federasi yang bernama Malaysia.

Menurut pandangan Indonesia, perlawanan tersebut merupakan bagian dari upaya menentang rekayasa kolonial. Bagi Indonesia masalah Brunei adalah masalah penentuan nasib sendiri. Perlawanan Rakyat Brunei yang dipimpin Azahari sama seperti perjuangan Indonesia untuk melawan kolonialisme. Dalam otobiografinya seperti yang dikutip dari *Cold War Sahadow* Bung Karno

---

<sup>115</sup> *Idem.*

<sup>116</sup> *Idem.*

mengakui bahwa dia menerima pembentukan Malaysia ketika gagasan tersebut diperkenalkan pada tahun 1961. Tetapi revolusi anti-Malaysia di Brunei pada tahun 1962 tidak memberinya pilihan lain selain membantu Brunei, sebab dia percaya bahwa setiap rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri.<sup>117</sup>

Alasan-alasan yang dikemukakan mengapa Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia sangat berhubungan dengan politik Pemerintah Indonesia saat itu. Dalam Tandjungpura Berjuang dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>118</sup> Pertama, politik Pemerintah Indonesia saat itu berdasarkan kepada Manipol Usdek, yang mendasarkan politik luar negerinya yang bebas aktif kepada “Anti Kolonialisme dan Imperialisme dalam segala bentuknya”. Gelora semangat anti kolonialisme dan imperialisme semakin hebat, karena bersamaan dengan saat pembentukan Federasi Malaysia itu, rakyat Indonesia juga sedang diliputi semangat perjuangan Tri Komando Rakyat untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda.

Kedua, Pemerintah Indonesia waktu itu menganggap bahwa gagasan pembentukan Federasi Malaysia adalah suatu bentuk “Proyek Kolonialisme” dari Inggris untuk mempertahankan kekuasaan dan kekuatan militernya di daerah-daerah Malaysia dan Asia Tenggara. Ketiga, Pemerintah Indonesia menganggap gagasan pembentukan Federasi Malaysia hanya merupakan kedok dari Inggris dan sekutunya untuk mengepung Indonesia dan untuk tetap mempertahankan kekuasaannya di daerah Kalimantan Utara dalam bentuk lainnya yaitu neokolonialisme.

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 364.

<sup>118</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 161.

Keempat, Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa prosedur pembentukan Federasi Malaysia tidak memberikan sama sekali kesempatan kepada rakyat Kalimantan Utara untuk menyatakan kehendaknya secara bebas. Maka Indonesia tidak keberatan sama sekali dengan pembentukan Federasi Malaysia asal rakyat diberikan kesempatan menyatakan kehendak rakyat, terutama rakyat Kalimantan Utara.

Selain itu dapat pula ditambah alasan adanya keinginan agar Indonesia memainkan peran yang lebih besar di dalam masalah-masalah Asia Tenggara. Hal serupa dikemukakan Hilsman dalam bukunya *To Move a Nation* seperti yang dikutip dari *Cold War Shadow* “*Indonesia’s opposition to Malaysia was part of the country’s expression of ‘new nationalism’ in which Jakarta wanted to stand tall in international affairs, particularly in dealing with former colonial power... Sukarno, moreover, was offended that the British never adequately consulted Indonesia on the federation plan*”<sup>119</sup> [Perlawanan Indonesia terhadap Malaysia adalah bagian dari ekspresi negara yaitu ‘nasionalisme baru’ di mana Jakarta ingin berdiri tinggi di masalah-masalah internasional, terutama sekali yang terkait dengan kesepakatan dengan bentukan kekuatan kolonial... Sukarno, lebih dari itu, merasa tersinggung Inggris tidak pernah meminta pendapat Indonesia dalam rencana federasi itu]

Menurut M.C. Ricklefs dalam bukunya *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, banyak pemimpin Indonesia menganggap bahwa Malaya tidak benar-benar

---

<sup>119</sup> Baskara T. Wardaya, *op. cit.*, hlm. 366-367.

merdeka karena tidak terjadi satu revolusi di sana. Mereka merasa iri terhadap keberhasilan Malaya di bidang ekonomi, merasa curiga dengan tetap hadirnya Inggris di sana, dan merasa tersinggung karena Malaya dan Singapura membantu PRRI. Kini tampak Malaysia akan menjadi negara neo-kolonial karena tetap adanya pangkalan-pangkalan Inggris di sana.<sup>120</sup>

### **D. Reaksi Negara Lainnya Terhadap Federasi Malaysia**

Dunia Internasional pada kurun waktu 1961-1967 tertuju perhatiannya pada perselisihan yang terjadi antara Federasi Malaysia dengan Indonesia dan Filipina. Negara-negara lain di luar ketiga negara tersebut pada dasarnya berusaha untuk mendorong terciptanya penyelesaian yang damai dengan cara-cara diplomatis. Namun, situasi dunia yang sedang dipayungi pengaruh perang dingin antara blok barat dan blok timur, mempengaruhi kadar keberpihakan negara-negara internasional terhadap masalah Federasi Malaysia.

Inggris secara tegas berdiri di belakang Federasi Malaysia, bahkan secara langsung mempunyai peranan yang menentukan dalam masalah pembentukan Federasi Malaysia. Daerah Federasi Malaysia merupakan daerah bekas jajahan Inggris. Inggris masih mempunyai kepentingan baik dalam politik internasional, bidang ekonomi dan pertahanan (militer). Kepentingan Inggris di daerah-daerah bekas jajahannya masih harus dipertahankan oleh Inggris untuk masa-masa yang akan datang.<sup>121</sup>

Amerika Serikat mendukung gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Hal tersebut dikarenakan Malaysia dapat menjadi benteng yang bisa membendung

---

<sup>120</sup> M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Serambi: Jakarta, 2005, hlm. 537.

<sup>121</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 162.

arus pengaruh komunis ke daerah Selatan. Secara politis Federasi Malaysia sebagai sekutu Inggris akan melaksanakan politik luar negeri yang pro Barat. Oleh karena itu, negara-negara blok Barat menyetujui pembentukan Federasi Malaysia.<sup>122</sup>

Reaksi berbeda yang beragam terjadi di kalangan negara-negara anggota SEATO. Filipina menentang Malaysia karena klaimnya atas daerah Sabah. Filipina juga memandang bahwa persatuan negara-negara Malaysia akan memberikan kesempatan kepada golongan Cina yang berpusat di Filipina untuk mempengaruhi daerah Kalimantan Utara. Hal ini berarti semakin dekatnya pengaruh komunisme ke arah Filipina.

Filipina mengajukan keberatan atas terbentuknya Federasi Malaysia karena persoalan daerah Sabah. Filipina mengklaim Sabah yang terletak di Kalimantan Utara sebagai miliknya. Argumentasi tersebut diajukan karena daerah Sabah pada awalnya merupakan daerah Kesultanan Sulu yang kemudian disewa oleh Inggris. Tuntutan Filipina terhadap Sabah ini menimbulkan ketegangan politik antara Filipina dan Malaysia.<sup>123</sup>

Pada tanggal 27 Januari 1963 telah diadakan perundingan antara Inggris dan Filipina di London mengenai persoalan Sabah, akan tetapi perundingan menemui jalan buntu. Dalam bulan April 1963 di Manila diadakan Konferensi Negara-Negara Asia Tenggara yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Muang Thai dan Persekutuan Tanah Melayu. Dalam pertemuan tersebut Filipina berusaha meyakinkan Malaya akan perlunya diadakan pertemuan antara Filipina, Malaya

---

<sup>122</sup> *Idem.*

<sup>123</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 160.

dan Indonesia untuk membicarakan ketegangan-ketegangan yang muncul antara Negara-Negara di Asia Tenggara sebagai akibat gagasan pembentukan Federasi Malaysia.<sup>124</sup>

Gagasan Filipina mengenai pertemuan antara Filipina, Malaysia dan Indonesia disambut baik oleh masing-masing negara. Kemudian didapatkan kata sepakat untuk mengadakan suatu pertemuan wakil-wakil ketiga negara dengan mengadakan suatu pertemuan wakil-wakil Luar Negeri yang akan diselenggarakan sekitar permulaan bulan Juni 1963.<sup>125</sup>

Negara-negara SEATO seperti Pakistan dan Thailand bersikap diam dan tidak berpihak dalam masalah pembentukan Federasi Malaysia, bahkan membantu ke arah perdamaian. Sedangkan anggota-anggota SEATO yang berasal dari negara barat memang secara terang-terangan mendukung Malaysia.<sup>126</sup> RRT (Republik Rakyat Tiongkok/Cina) dan negara-negara komunis lainnya menentang Federasi Malaysia. Hal ini dikarenakan Malaysia yang pro Barat adalah anti komunis. RRT mendukung pendirian Indonesia yang menentang Federasi Malaysia.

Cina sangat menentang Malaysia. Cina tidak menyukai kemungkinan adanya satu negara lagi yang pro-Barat di sebelah selatannya setelah Muangthai, Vietnam Selatan, Filipina dan Taiwan. Cina dan PKI mengharapkan suatu kebijakan anti Malaysia yang radikal, yang mungkin akan menggagalkan

---

<sup>124</sup> *Idem.*

<sup>125</sup> *Idem.*

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm. 162.

pembentukan Malaysia. Sebuah kebijakan yang dapat membuat tentara Inggris tidak dapat bergerak dari sana, sambil merusak rencana stabilitas ekonomi dan pengaruh Amerika di Jakarta. Akan tetapi, mereka tidak menginginkan perkembangan pesat pihak militer Indonesia yang mendapat dukungan peralatan dari Uni Soviet.<sup>127</sup>

### E. Terbentuknya PGRS/PARAKU

Dalam menganalisis terbentuknya PGRS/PARAKU peneliti akan dibantu dengan teori gerakan sosial, terutama dengan pendekatan *Political Opportunity Structure* dan *Contentious Politics* (ketegangan politik). Mekanisme POS berupaya menjelaskan bahwa gerakan sosial terjadi karena disebabkan oleh perubahan dalam struktur politik, yang dilihat sebagai kesempatan. Peter Eisinger dalam artikelnya di *American Political Science Review* mengatakan bahwa revolusi terjadi tidak ketika kelompok masyarakat tertentu dalam kondisi tertekan. Tetapi aksi kolektif berupa revolusi muncul ke permukaan ketika sebuah sistem politik dan ekonomi tertutup mengalami keterbukaan.<sup>128</sup>

MacAdam dan Tarrow menjabarkan mekanisme POS secara lebih spesifik. *Pertama*, gerakan sosial muncul ketika tingkat akses terhadap lembaga-lembaga politik mengalami keterbukaan. *Kedua*, ketika keseimbangan politik sedang tercerai berai sedangkan keseimbangan politik baru belum terbentuk. *Ketiga*, ketika para elite politik mengalami konflik besar dan konflik ini dimanfaatkan oleh para pelaku perubahan sebagai kesempatan. *Keempat*, Ketika para pelaku perubahan digandeng oleh para elite yang berada di dalam sistem untuk

---

<sup>127</sup> M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 538.

<sup>128</sup> Abdul Wahib Situmorang, *op. cit.*, hlm.3.

melakukan perubahan.<sup>129</sup> Selain itu Sydney Tarrow kemudian menambahkan bahwa ketegangan politik mengalami peningkatan ketika para pelaku perubahan mendapatkan dukungan sumber daya eksternal untuk keluar dari masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>130</sup>

Mempertajam analisis Tarrow, Hanspeter Kriesi menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor struktur kelembagaan formal, informal dan strategi yang dipergunakan oleh pelaku perubahan.<sup>131</sup> Brockett menekankan beberapa aspek yang berbeda yaitu: arti akses kelembagaan di mata para pelaku perubahan, kehadiran sekutu, fragmentasi elite dan tingkat konflik yang mempergunakan cara-cara represif.<sup>132</sup>

Sedangkan yang dimaksud *contentious politics* oleh Tilly, MacAdam dan Tarrow adalah peristiwa yang terjadi secara episodik atau tiba-tiba daripada reguler. Lebih jauh, peristiwa mesti terjadi di ruang publik ketimbang di dalam organisasi baik di dalam perusahaan maupun pemerintahan. Peristiwa yang terjadi melibatkan interaksi kolektif di antara pembuat klaim dan objek klaim ketika paling tidak satu pemerintah menjadi pengklaim atau objek klaim atau sebuah kelompok mengklaim dan bila terjadi akan memengaruhi paling tidak salah satu objek yang diklaim.<sup>133</sup>

Paling tidak ada tiga mekanisme dan proses yang secara operasional bisa dipergunakan dalam menjelaskan ketegangan politik. Mekanisme pertama adalah

---

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm.4.

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm.5.

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm.6.

<sup>132</sup> *Idem*.

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm. 25.

lingkaran kesempatan dan kendala beroperasi melalui rentetan perubahan lingkungan, interpretasi perubahan, melakukan aksi dan aksi balasan. Mekanisme kedua adalah peran perantara yang mencoba menghubungkan, dua atau lebih, lokasi-lokasi sosial yang belum berhubungan. Sedangkan mekanisme ketiga adalah pembentukan kategori. Pembentukan kategori menciptakan identitas. Sebuah kategori sosial terdiri dari sekumpulan perbedaan yang membedakan satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya.<sup>134</sup>

Keberadaan PGRS/PARAKU berkaitan erat dengan situasi politik di sekitar pembentukan Federasi Malaysia. Reaksi yang muncul dari pembentukan Federasi Malaysia merupakan reaksi yang pro dan yang kontra. Pada tanggal 8 Desember 1962, sebagai bentuk penolakan terhadap Federasi Malaysia, berdiri Negara Nasional Kalimantan Utara dengan Perdana Menteri Azahari dari Partai Rakyat Brunei. Setelah itu didirikan juga Tentara Nasional Kalimantan Utara sebagai kekuatan pertahanan (militer) Negara Nasional Kalimantan Utara. Wilayah yang diklaim NNKU sebagai wilayah negaranya adalah Sarawak, Brunei dan Sabah. Berarti seluruh wilayah bekas jajahan Inggris di Kalimantan/Borneo Inggris.

Terbentuknya Negara Nasional Kalimantan Utara pimpinan Azahari mendapat tantangan dari Pemerintahan Tanah Melayu dan Inggris. Gerakan Azahari tersebut dianggap gerakan separatis oleh pihak yang pro dengan Federasi Malaysia. Sedangkan menurut pandangan Indonesia, yang diwakili Soekarno, terbentuknya NNKU merupakan suatu bentuk gerakan nasionalisme yang menentang kolonialisme dan imperialisme. Sehingga Pemerintah Indonesia mendukung gerakan Azahari tersebut.

---

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm. 27.

Inggris yang pro dengan Federasi Malaysia mengerahkan tentara untuk melawan Tentara Nasional Kalimantan Utara. Hal tersebut mengakibatkan gerakan Azahari tidak memungkinkan untuk mempertahankan pemerintah pusatnya di Kalimantan Utara. Keadaan demikian membuat pemerintahan pusat NKKU dipindahkan ke Manila. Pengakuan oleh Indonesia atas NKKU merupakan peluang baginya untuk menyusun kekuatan dengan mengambil basis di wilayah Indonesia, yaitu Kalimantan Barat.<sup>135</sup> Kebijakan Pemerintah Indonesia saat itu memberikan *asylum* politik kepada Perdana Menteri Azahari dan Panglima Abang Kifli di Jakarta.<sup>136</sup>

Hubungan Azahari dengan pihak Indonesia dapat ditelusuri sejak masa Revolusi Indonesia. Pada masa itu Azahari sudah ada di Indonesia, tepatnya sebagai seorang pelajar di Sekolah Peternakan Bogor dan secara pribadi membantu Indonesia dalam perang dengan Belanda. Sejak saat itu Azahari terus menjalin hubungan dengan Nasution, yang bersimpati terhadap cita-cita Azahari. Akan tetapi, hubungan Indonesia dengan kelompok Azahari kemudian segera diambil alih oleh Badan Pusat Intelijen Indonesia yang dipimpin Soebandrio.<sup>137</sup>

Berdirinya Negara Kalimantan Utara mengakibatkan Partai Komunis Sarawak<sup>138</sup> juga mendapat tekanan dari penguasa. Oleh karena itu, sejalan dengan

---

<sup>135</sup> Soemadi, *op. cit.*, hlm. 53-54.

<sup>136</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm 233.

<sup>137</sup> M.C. Riklefs, *op. cit.*, hlm. 537. lihat juga SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm 182. dan Soemadi, *op. cit.*, hlm. 57.

<sup>138</sup> Partai Komunis Serawak adalah SCO (Serawak Communist Organization), partai yang ilegal, semacam "PKI malam" di Indonesia pasca 1965. SCO kemudian menginfiltrasi SUPP (Serawak United People Party), partai politik legal yang dalam Anggaran Dasarnya adalah non komunis. SUPP satu-satunya partai di Serawak yang menolak Federasi Malaysia, *idem*. Lihat juga James P. Ongkili, *op. cit.*, hlm. 143.

kebijaksanaan politik Indonesia waktu itu, pemimpin-pemimpin komunis dari Sarawak "hijrah" ke Kalimantan Barat.<sup>139</sup> Sedangkan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dalam rangka menyelamatkan Partai Komunis Serawak mengirimkan Wen Min Tjuen dan Wong Kee Chok<sup>140</sup> ke Kalimantan Barat pada awal tahun 1963. Di Kalimantan Barat, kedua pemimpin Partai Komunis Cina tersebut menemui Yap Chung Ho, Wong Ho, Liem Yen Hwa dan Yacob dari *Sarawak Advance Youth Association* (SAYA)<sup>141</sup> untuk membahas garis perjuangan dari Partai Komunis Serawak.<sup>142</sup>

Akibat dari tantangan pemerintah Malaysia yang didukung oleh Inggris dan di satu sisi didukung oleh Soekarno atas nama pemerintah Indonesia, maka tokoh-tokoh dari yang kontra dengan Federasi Malaysia "melarikan" diri ke Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat. Azahari dan Abang Kifli di Kalimantan Barat dengan Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU)-nya kemudian berhubungan dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh dari Sarawak, seperti Yap Chung Ho, Wong Ho, Liem Yen Hwa dan Yacob dari SUPP yang sudah disokong oleh tokoh komunis Wong Kee Chok dan Wen Min Tjun dari RRT.<sup>143</sup>

Latar belakang politik luar negeri Indonesia yang menentang terbentuknya Federasi Malaysia, mengakibatkan pemerintah Indonesia mendukung gerakan

---

<sup>139</sup> Soemadi, *op. cit.*, hlm. 54.

<sup>140</sup> Wen Min Tjuen dan Wong Kee Chok adalah tokoh-tokoh komunis di Malaysia yang telah diusir dan lari ke Peking. Dari Peking kemudian dikirim ke Kalimantan Barat untuk membantu perjuangan Partai Komunis Serawak yang lari ke Kalimantan Barat, lihat SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm.182.

<sup>141</sup> Organ dari Serawak United People Party (SUPP), namun sudah dimasuki pengaruh komunis. *Ibid*, hlm. 182 dan Soemadi, *op. cit.*, hlm 57.

<sup>142</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm 233. Dalam Pembayun Sulistyorini, "Pemberontakan PGRS/ PARAKU di Kalimantan Barat, Jurnal Sejarah dan Budaya Kalimantan, edisi 03/2004, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Pontianak, hlm. 39.

<sup>143</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 182.

Azahari dari Brunei dan kelompok Yap Chung Ho dari Serawak. Pada tanggal 2 Desember 1963 Soebandrio, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Pertama/ Menteri Luar Negeri dan KOPERDASAN (Komando Pertahanan Daerah Perbatasan), datang ke Kalimantan Barat. Dalam rapat-rapat umum di Pontianak dan daerah-daerah sepanjang pertahanan dalam rangka kampanye konfrontasi anti Malaysia, secara demonstratif Soebandrio telah memperkenalkan Azahari kepada khalayak ramai.<sup>144</sup>

Sebagai tindak lanjut kerja sama Azahari (Brunei), Kelompok Yap Chung Ho (Sarawak) dan Soebandrio (Indonesia) diadakanlah pertemuan di Sintang untuk menggariskan kerja sama untuk mengadakan gerakan menentang Federasi Malaysia dengan basis kekuatan di Kalimantan Barat. Pada kesempatan itulah muncul gagasan untuk membentuk suatu pasukan bersenjata yang akan mendukung gerakan “baru” anti Malaysia.

Setelah pertemuan pertama di Sintang, kemudian diadakan pertemuan lanjutan yang dilaksanakan di Bogor. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Pertama Soebandrio, Njoto, Soeroto, Perdana Menteri NNKU Azahari dan kelompok Yap Chung Ho. Dalam pertemuan itu telah diputuskan untuk membentuk pasukan bersenjata yang akan berkedudukan di perbatasan Kalimantan Barat (Asuangsang di sebelah Utara Sambas).<sup>145</sup>

Tindak lanjut dari kesepakatan di Bogor, Soebandrio dengan BPI (Badan Pusat Intelijen) Indonesia, membantu melatih 10 (sepuluh) orang anak buah Yap Chung Ho selama sebulan di Bogor. Sepuluh (10) orang yang telah dilatih oleh

---

<sup>144</sup> *Idem.*

<sup>145</sup> *Idem.*

BPI kemudian langsung dibawa ke Asuangsang untuk melatih 60 orang pasukan lagi. Dengan basis pasukan ini, kemudian oleh SUPP “pelarian” di Kalimantan Barat dibentuklah Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU) sebagai bagian dari TNKU.<sup>146</sup> Selain itu juga memasukkan anggota-anggota PGRS yang dipimpin Saleh sebagai anggota BPI.<sup>147</sup> Dislokasi umum mereka adalah dari Pantai Barat sampai daerah Sungkung ditempati PGRS dan dari Sungkung sampai Benua Martinus di sebelah Timur ditempati PARAKU.<sup>148</sup>

Kesimpulan pada bab II ini adalah pembentukan Federasi Malaysia mendapat tanggapan yang pro dan kontra. Pihak yang secara langsung dirugikan atas pembentukan Federasi Malaysia melakukan perlawanan, yang ditandai dengan terbentuknya Negara Nasional Kalimantan Utara (NNKU) dan kemudian PGRS/PARAKU. Sedangkan di luar negeri, Indonesia dan Filipina sebagai penentang utama Federasi Malaysia kemudian mendukung gerakan anti Malaysia, yang berarti mendukung NNKU dan PGRS/PARAKU. Dengan demikian hipotesis pertama yang berbunyi “Kalau pembentukan Federasi Malaysia tidak memperhatikan aspirasi masyarakat Kalimantan Utara dan negara-negara tetangga (Indonesia dan Filipina), maka pihak yang menentang akan membentuk dan mendukung PGRS/PARAKU” dinyatakan terbukti..

---

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm 183. Selain itu juga, sebagai hasil persetujuan TNKU akan menyediakan senjata untuk PGRS/PARAKU.

<sup>147</sup> Soemadi, *op. cit.*, hlm. 57.

<sup>148</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm 183. Basis PGRS di Sungkung, Bengkayang dan Sajingan Hulu. Sedangkan PARAKU di wilayah Benua Martinus dan Badau, Kapuas Hulu.

## BAB III

### KEBIJAKAN PEMERINTAH RI TERHADAP PGRS/PARAKU DI KALIMANTAN BARAT 1963 – 1967

#### A. Gagalnya Perundingan Penyelesaian Masalah “Malaysia”

Reaksi Pemerintahan Soekarno dalam rangka menentang pembentukan Federasi Malaysia mendapat dukungan yang besar dari rakyat Indonesia. Banyak pendapat yang beredar bahwa pembentukan Malaysia merupakan suatu taktik saja untuk mengokohkan kembali kolonialisme di kawasan Asia Tenggara. Dengan sangat antusias, masyarakat mendukung upaya Presiden Soekarno untuk menggagalkan rencana itu. Dukungan yang paling kuat datang dari Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI telah mengancam rencana Inggris di Malaysia sebagai *”neo-colonialist attempt to prevent the people of the former British colonies from attaining ‘genuine national independence and freedom from imperialism’”*<sup>149</sup> [usaha neo-kolonialis untuk menghalangi rakyat bekas koloni Inggris memperoleh ‘kemerdekaan nasional dan kebebasan sejati dari imperialisme’]

Angkatan Darat Indonesia (ABRI-AD) juga mendukung sikap Presiden Soekarno dalam menentang pembentukan Federasi Malaysia. *”The Army feared that in light of the federation’s Chinese population, Malaysia could become a springboard for Communist China’s penetration of Indonesia through the Indonesian-Malaysian common borders”*<sup>150</sup> [ Angkatan Darat takut bahwa dengan adanya banyak warga keturunan Cina di dalam federasi, Malaysia akan menjadi

---

<sup>149</sup> Baskara T. Wardaya, *op. cit.* hlm. 367.

<sup>150</sup> *Idem*

batu loncatan bagi penetrasi Cina ke Indonesia melalui perbatasan Indonesia-Malaysia.]

Selain dari PKI dan Angkatan Darat, Presiden Soekarno atas nama Pemerintahan RI juga mendapat dukungan dari Filipina. Presiden Filipina Diosdado Macapagal mengklaim Sabah sebagai bagian dari wilayah negaranya atas dasar hubungan antara Filipina dan Sultan Sabah pada masa pra-kolonial. *"The Philippines also feared that the new federation could become a basis for communist penetration Malaysia's Chinese population and Indonesia's communist elements"*<sup>151</sup> [ Filipina juga takut bahwa federasi baru itu akan menjadi basis bagi tekanan komunis dari populasi Cina Malaysia dan elemen komunis Indonesia]. Meskipun demikian, Filipina tetap ingin bertindak bersama Indonesia, yang oleh banyak kalangan di negara itu dipandang sebagai calon negara kuat di Asia Tenggara pada masa datang, selain itu Indonesia juga dianggap bebas dari pengaruh kekuasaan kolonial Barat.<sup>152</sup>

Pada tanggal 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Soebandrio mengumumkan sikap resmi Pemerintahan Indonesia:

*"Now the President has decided that henceforth we shall pursue a policy of confrontation against Malaya. This does not mean that we are going to war. This is not necessary... I, too, consider it as normal that we have to adopt a policy of confrontation. What is to be regretted is that the confrontation policy has to be adopted against an Asian country, a neighboring country. We have always been pursuing a confrontation policy against colonialism and imperialism in all its manifestations. It is unfortunate that Malaya, too, has lent itself to become tools of colonialism and imperialism. That is why we are compelled to adopt a policy of confrontation."*<sup>153</sup>

---

<sup>151</sup> *Idem.*

<sup>152</sup> Periksa Pidato Presiden Philipina di KTT Manila, 30 Juli 1963. Departemen Penerangan RI, *op.cit.*, hlm. 33.

<sup>153</sup> Baskara T. Wardaya, *op. cit.* hlm. 368.

[Sekarang Presiden telah memutuskan kita akan menjalankan politik konfrontasi terhadap Malaya. Hal ini tidak berarti bahwa kita akan berperang. Tidak harus demikian... Saya pun merasa bahwa memang sudah seharusnya kita melancarkan politik konfrontasi. Yang perlu disesalkan adalah bahwa politik konfrontasi harus diterapkan terhadap sebuah negeri Asia, negeri tetangga kita sendiri. Selama ini kita selalu menjalankan politik konfrontasi, tetapi untuk melawan kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya. Ini tidak beruntung untuk Malaya yang membiarkan dirinya menjadi alat kolonialisme dan imperialisme. Itulah sebabnya kita terpaksa melancarkan politik konfrontasi.]

Pernyataan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, Soebandrio ini menjadi awal politik konfrontasi Indonesia atas Malaysia. Meskipun dalam perjalanan sejarah selanjutnya, politik konfrontasi Indonesia sempat "istirahat" selama masa perundingan damai.

Pada tanggal 13 Februari 1963 Presiden Soekarno mengeluarkan pernyataan yang senada dan semakin menegaskan sikap pemerintahan yang dipimpinnya: "*I Now declare officially that Indonesia opposes Malaysia... We are being encircled. We do not want to have neo-colonialism in our vicinity. We consider Malaysia an encirclement of the Indonesian Republic. Malaysia is the product of... neo-colonialism*"<sup>154</sup> [Saya sekarang menyatakan secara resmi Indonesia menentang Malaysia... Kami sedang dikepung. Kami tidak menginginkan neo-kolonialisme di lingkungan kami. Kami menganggap Malaysia hendak mengepung Republik Indonesia. Malaysia adalah produk... neo-kolonialisme.] Pada hari yang sama, Soebandrio mengingatkan bahwa "*if the formation of Malaysia were to be carried on under the present situation, physical clash would be unavoidable*"<sup>155</sup> [jika pembentukan Malaysia tetap dilanjutkan di dalam situasi sekarang, benturan fisik tidak akan terhindarkan.]

---

<sup>154</sup> *Ibid*, 369.

<sup>155</sup> *Idem*

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Indonesia Jenderal A.H. Nasution menyatakan bahwa Malaysia adalah sebuah ancaman militer bagi Indonesia. Menurutnya Federasi Malaysia akan menjadi basis dari negara-negara yang dulunya menguasai Asia Tenggara untuk kembali mendominasi. Merujuk pada dukungan yang diberikan Indonesia kepada kelompok anti Malaysia di Kalimantan Utara dia menyatakan “*Indonesia had no intention to take over northern Borneo territories, but at the same time would support any movement for self-determination and againts colonialism*”<sup>156</sup> [Indonesia tidak mempunyai niat untuk mencaplok wilayah-wilayah tersebut, tetapi pada saat yang sama akan membantu tiap gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan dan menentang kolonialisme.] Pernyataan ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Indonesia akan mendukung dan menyokong segala bentuk gerakan yang menentang Malaysia, termasuk di kemudian hari mendukung PGRS/PARAKU.

Pada bulan Mei 1963, Indonesia, Filipina dan Malaka setuju untuk bertemu dan mengadakan serangkaian pembicaraan mengenai masalah Malaysia. Indonesia sendiri tampaknya bersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut secara diplomasi. Suatu putaran pembicaraan antara wakil-wakil dari ketiga negara itu segera diadakan di Manila, dan pada tanggal 10 Juni mereka mengumumkan dibentuknya Maphilindo, singkatan dari Malaysia, Filipina dan Indonesia. Mapihilindo didirikan sebagai sebuah alternatif solusi bagi masalah Malaysia.<sup>157</sup>

---

<sup>156</sup> *Idem*

<sup>157</sup> *Ibid*, 384-385. Dalam Hidayat Mukmin, *op. cit.*, hlm. 94., disebutkan tanggal 7 Juni dan 11 Juni 1963 telah diadakan pertemuan antara Deputy PM/Menlu Tun Abdul Razak, Menlu Soebandrio

Pembicaraan Manila segera disusul dengan sebuah pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri oleh para pemimpin ketiga negara peserta. Di dalam pertemuan tingkat tinggi ini, yang berlangsung antara tanggal 30 Juli dan 5 Agustus 1963, Presiden Indonesia Soekarno, Presiden Filipina Diosdado Macapagal dan Perdana Menteri Malaka Tunku Abdul Rahman mendukung pendirian Maphilindo. Secara bersama-sama mereka meminta PBB untuk menyelenggarakan sebuah jajak pendapat di Sabah dan Serawak guna memastikan apakah rakyat kedua wilayah tersebut mau bergabung dengan Federasi Malaysia atau tidak. Keputusan KTT di Manila tersebut menghasilkan Persetujuan Manila atau Manila *Accord* tanggal 31 Juli 1963.<sup>158</sup> Namun demikian, jajak pendapat tidak akan diadakan di Brunei, sebab pada Juli 1963 wilayah tersebut telah memutuskan untuk tidak bergabung dengan federasi.<sup>159</sup>

Sebagai tanggapan atas permintaan pertemuan tingkat tinggi di Manila. Sekretaris Jenderal PBB U Thant bersedia memfasilitasi jajak pendapat tersebut dan membentuk Misi Michelmore<sup>160</sup>, sesuai dengan nama ketuanya yang berasal dari Amerika Serikat. Misi Michelmore bertugas untuk mencari tahu apakah rakyat kedua wilayah itu benar-benar mau bergabung ke dalam Federasi Malaysia atau tidak. Misi tersebut tiba di Kalimantan pada tanggal 15 Agustus 1963, namun

---

dan Menlu Pelaez dengan hasil mendukung Maphilindo dan harus diadakannya pertemuan pada tingkat Kepala Negara.

<sup>158</sup> Baskara T. Wardaya, *op.cit.*, 386. Konferensi tingkat tinggi antara Pemimpin Negara Indonesia, Malaysia dan Filipina berhasil mempopulerkan pernyataan "Masalah Asia diselesaikan oleh Bangsa Asia". Lihat juga Departemen Penerangan RI, *op.cit.*, hlm. 33, 43, 53, kumpulan pidato Presiden Macapagal dan Presiden Soekarno di KTT Manila tersebut.

<sup>159</sup> Baskara T. Wardaya, *op.cit.*, 386.

<sup>160</sup> Misi diketuai oleh Laurence Michelmore (Amerika Serikat) dengan anggota-anggota: George Janicek (Cekoslovakia), George Howard (Argentina), Neville Kanakaratne (Ceylon), Kenneth Danzie (Ghana), Ishad Bagai (Pakistan), Jasushi Akashi (Jepang), Abdul Dajani (Yordania) dan Jose Machado (Brazil). Lihat Hidayat Mukmin, *op.cit.*, hlm. 95. Periksa juga Departemen Penerangan RI, *op.cit.*, hlm. 59.

perbedaan pendapat antara para anggotanya dan perwakilan Maphilindo membuat tertundanya pelaksanaan jajak pendapat hingga tanggal 26 Agustus 1963.<sup>161</sup>

Dalam jajak pendapat itu, para anggota misi berbicara dengan pemimpin-pemimpin kelompok agama, etnis dan buruh, para pejabat pemerintahan, para pemimpin politik, serta para kepala suku di Sabah dan Sarawak. Semua perwakilan diminta pendapatnya tentang federasi yang akan dibentuk. Setelah merampungkan proses jajak pendapat, misi PBB menemukan bahwa mayoritas rakyat yang diwawancarai “*favored the merger of the two territories with Malaya and Singapore in the Malaysia Federation*”<sup>162</sup> [memilih untuk menggabungkan kedua wilayah mereka dengan Malaka dan Singapura dalam Federasi Malaysia.]

Pada tanggal 14 September 1963, Sekretaris Jenderal PBB, U Thant mengumumkan hasil jajak pendapat yang telah dilakukan Misi Michelmore:

*“that the majority of the peoples of Sabah (North Borneo) and Sarawak, have given serious and thoughtful consideration to their future, and to the implications for them of participation in a Federation of Malaysia. I believe that the majority of them have concluded that they wish to bring their dependent status to an end and to realize their independence through freely chosen association with other people in their region with whom they feel ties of ethnic association, heritage, language, religion, culture, economic relationship and ideals and objective”*<sup>163</sup>

[bahwa sebagian besar rakyat Sabah (Kalimantan Utara) dan Serawak telah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh dan secara bijaksana masa depan mereka, berikut segala konsekuensi bila mereka bergabung dengan Federasi Malaysia. Saya yakin bahwa mayoritas dari mereka telah memutuskan untuk mengakhiri status mereka sebagai koloni, dan mewujudkan kemerdekaan mereka melalui sebuah asosiasi yang dengan bebas mereka pilih dengan masyarakat lain di kawasan itu, yang mereka percayai memiliki ikatan etnis, hubungan sejarah, bahasa, agama, budaya, ekonomi, serta cita-cita dan tujuan yang sama dengan yang mereka pilih.]

---

<sup>161</sup> Baskara T. Wardaya, *op.cit.*, hlm. 388.

<sup>162</sup> *Idem*

<sup>163</sup> *Ibid*, hlm 389.

Pemerintah Indonesia dan juga Pemerintahan Filipina menolak hasil jajak pendapat tersebut. Jakarta mengeluh bahwa waktu yang digunakan untuk mengadakan jajak pendapat tersebut terlalu singkat. Selain itu penolakan Indonesia dan Filipina diakibatkan pengamat dari kedua negara<sup>164</sup> tersebut hanya bisa mengamati sebagian dari proses jajak pendapat karena adanya kesulitan yang diciptakan penguasa Inggris. Indonesia mencurigai adanya intrik-intrik Inggris, terlebih ketika pada tanggal 29 Agustus 1963 Tunku Abdul Rahman sudah mengumumkan Federasi Malaysia akan didirikan pada tanggal 16 September. Tunku Abdul Rahman menyatakan bahwa federasi baru itu *“would be established on that day whether or not the result of the U.N. survey indicated that the people of Serawak and Sabah wanted to join the federation”*<sup>165</sup> [akan tetap diresmikan pada tanggal itu terlepas dari apakah hasil jajak pendapat yang diselenggarakan PBB menunjukkan bahwa rakyat Serawak dan Sabah ingin bergabung ke dalamnya atau tidak.]

Dengan didasari pernyataan terbuka Tunku Abdul Rahman dan kesulitan-kesulitan yang didapat para pengamat Indonesia di Serawak dan Sabah, Indonesia kemudian mengambil sikap. Pada tanggal 15 September 1963 kabinet Indonesia bertemu dan menyatakan bahwa pembentukan Malaysia tidak sah dan tidak dapat diterima secara resmi. Pada hari yang sama presiden Soekarno juga menyatakan

---

<sup>164</sup> Jajak pendapat yang dilakukan Misi Michelmores juga dihadiri para peninjau dari Indonesia, Malaysia dan Filipina. Dari Indonesia adalah Nugroho, Otto Abdulrahman, Teuku Hasan dan Rudi Gonta. Dari Malaysia adalah Zaiton Ibrahim, Athi Nahappan, Yakup Latief, dan Mohammad Zahir. Dari Filipina adalah Benito M. Bautista, Melquiades Iabanez, Vicente Muyoo dan Ramon Barrios. Lihat Hidayat Mukmin, *op.cit.*, hlm. 95.

<sup>165</sup> Baskara T. Wardaya, *op.cit.*, hlm 389.

pendapatnya “*I have seen the Dutch play it... Interview head men of tribes. Interview local officials. Interview people while soldier with bayonet stand by. What do you expect? No, no, no. I will not accept it. I will accept a real test but not this one*”<sup>166</sup> [Saya telah menyaksikan Belanda bermain seperti ini... menanyai kepala-kepala suku, menanyai para pejabat lokal. Menanyai orang sementara serdadu-serdadu bersenjatakan bayonet siap sedia. Apa yang anda harapkan? Tidak, tidak, tidak. Saya tidak dapat menerima yang ini. Saya hanya akan menerima pengujian yang senyatanya, tapi bukan yang satu ini]

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mempermasalahkan jumlah personil yang ditugaskan untuk menjalankan misi terlalu kecil untuk wilayah seluas Sabah dan Sarawak. Menurut Presiden Soekarno Inggris menunda-nunda pemberian visa bagi para pengamat dari Indonesia dan Filipina. Kemudian memanfaatkan penundaan tersebut untuk mempengaruhi opini publik di Sabah dan Sarawak. Jones, Duta Besar Amerika untuk Indonesia, mengakui bahwa Menteri Inggris untuk Urusan Persemakmuran, Duncan Sandys “*had determined to make it as difficult as possible for the Indonesians to observe anything*”<sup>167</sup> [telah bertekad sebisa mungkin mempersulit pengamat dari Indonesia supaya tidak bisa mengamati apapun.]

Meskipun ada penolakan yang tegas dari Indonesia dan Filipina terhadap hasil jajak pendapat PBB. Pada tanggal 16 September 1963 pemerintah Malaka dan Inggris secara bersama-sama menyatakan berdirinya Federasi Malaysia.

---

<sup>166</sup> *Ibid.*, hlm 390. Periksa juga *Aide Memoire* dari Peninjau-Peninjau Indonesia pada Misi PBB untuk Malaysia di Sarawak dan Sabah, dalam Departemen Penerangan RI, *op.cit.*, hlm. 105-117. Penolakan Filipina terhadap jajak pendapat juga dapat dilihat di *Aide Memoire* dari Peninjau-Peninjau Indonesia pada Misi PBB untuk Malaysia di Sarawak dan Sabah, *ibid.*, hlm. 118-136.

<sup>167</sup> *Idem.*

Federasi itu terdiri dari Malaka, Singapura, Sabah dan Sarawak. Tunku Abdul Rahman yang menjabat sebagai Perdana Menteri Malaka, dinyatakan sebagai Perdana Menteri Federasi Malaysia. Ibukota Malaka, Kuala Lumpur, menjadi ibukota Malaysia.<sup>168</sup>

Dua hari sebelum pengumuman resmi terbentuknya Malaysia atau pada tanggal 14 September 1963, Amerika Serikat telah menyatakan dukungannya terhadap Federasi tersebut. Untuk menjustifikasi dukungannya ini Pemerintahan Kennedy mengatakan bahwa “*the federation was not a new state but merely an enlargement of an existing one, namely Malaya*” [federasi bukanlah sebuah negara baru tapi pengembangan dari yang sudah ada, yang disebut Malaka.] Duta Besar Amerika Serikat untuk Malaka, Charles F. Baldwin diperintahkan untuk tetap tinggal di Kuala Lumpur dan diangkat menjadi Duta Besar A.S. untuk Federasi Malaysia.<sup>169</sup>

Ini tampaknya merupakan penghinaan besar bagi Indonesia. PKI membawa para anggotanya turun ke jalan-jalan dalam demonstrasi besar-besaran menentang Malaysia. Kedutaan besar Inggris dan sebanyak 21 rumah stafnya di Jakarta dibakar habis. Kedutaan besar Malaya diserang, sebagai balasan, kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur juga mendapat serangan. Pada tanggal 17 September 1963, Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dan dalam waktu empat hari Indonesia memutuskan semua hubungan dengan Malaysia dan Singapura, yang menyangkut hampir setengah dari ekspor Indonesia. Pada tanggal 25 September 1963, Soekarno mengumumkan bahwa dia akan “ganyang Malaysia”.<sup>170</sup>

---

<sup>168</sup> *Idem.*

<sup>169</sup> *Ibid*, hlm 391.

<sup>170</sup> M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 539. Lihat juga Hidayat Mukmin, *op.cit.*, hlm. 96.

Pengumuman pembentukan Federasi Malaysia yang kemudian disambut dengan reaksi keras Indonesia, telah menghancurkan harapan yang masih tersisa akan adanya solusi damai bagi masalah Malaysia. Indonesia merasa terhina dengan adanya keputusan Pemerintah Malaka dan Inggris tersebut. Di kemudian hari, reaksi Indonesia akan menjadi sebuah aksi politis yang melibatkan seluruh komponen bangsa, berupa penggerakan massa sukarelawan dan dukungan terhadap organisasi penentang Malaysia kemudian disebut Konfrontasi Malaysia.

Pada tanggal 16 Maret 1964 di Istana Negara Jakarta, Presiden Soekarno mengeluarkan komando mengenai pendaftaran dan pengerahan sukarelawan atau sukarelawati dalam rangka konfrontasi terhadap Malaysia. Tanggal 18 Maret komando tersebut langsung dijalankan oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi (KOTI), dengan mengeluarkan surat pengumuman No.1 Tahun 1964. Surat pengumuman No.1 Tahun 1964 tersebut berisi mekanisme pendaftaran sukarelawan atau sukarelawati.<sup>171</sup>

Setelah mengeluarkan komando pengerahan sukarelawan, pada tanggal 21 Maret 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Instruksi Presiden No.03/KOTI/Tahun 1964 yang berisi tentang: kebijaksanaan umum serta pelaksanaan pengerahan sukarelawan atau sukarelawati.<sup>172</sup> Atas dasar Instruksi Presiden No.03/KOTI/Tahun 1964, pada tanggal 25 Maret 1964 Letjen Ahmad Yani mengeluarkan Instruksi Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No.04/KOTI/Tahun 1964 yang berisi pelaksanaan pengerahan sukarelawan atau

---

<sup>171</sup> Lihat "Surat Pengumuman Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No.1 Tahun 1964" Salinan pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

<sup>172</sup> Lihat salinan "Instruksi Presiden No.03/KOTI/Tahun 1964" dokumen Arsip Nasional RI, Jakarta.

sukarelawati.<sup>173</sup> Pada tanggal 27 April 1964 kembali Ahmad Yani mengeluarkan Instruksi Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No.07/KOTI/Tahun 1964 tentang kebijaksanaan pengerahan sukarelawan atau sukarelawati untuk tugas-tugas di bidang militer atau angkatan bersenjata.<sup>174</sup>

Pada tanggal 13 April 1964 diadakan apel besar untuk mendengarkan amanat Presiden Soekarno pada seluruh sukarelawan yang sudah mendaftarkan diri. Apel besar dilaksanakan di depan Istana Merdeka dan dihadiri satu (1) juta sukarelawan. Dalam amanatnya Soekarno juga menyatakan bahwa di seluruh Indonesia telah berkumpul 21 juta sukarelawan. “Lebih dari pada satu juta sukarelawan. Dan sebagai saya telah ketahui di seluruh Indonesia ini telah mencatatkan diri 21 juta sukarelawan untuk siap sedia menjalankan komando Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi mengganyang Malaysia.”<sup>175</sup>

Satu bulan kemudian tepatnya tanggal 3 Mei 1964 menjadi momen yang paling penting dalam perjalanan konfrontasi dengan Malaysia. Pada tanggal tersebut, bertempat di depan Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan Dwikora atau Dwi Komando Rakyat.

“Kami Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neo-kolonialis Malaysia... dengan ini kami perintahkan kepada dua puluh satu juta Sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri:

Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunei untuk mebubarkan negara boneka Malaysia.

---

<sup>173</sup> Lihat salinan “Instruksi Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No.04/KOTI/Tahun 1964” dokumen Arsip Nasional RI, Jakarta.

<sup>174</sup> Lihat salinan “Instruksi Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No.07/KOTI/Tahun 1964” dokumen Arsip Nasional RI, Jakarta.

<sup>175</sup> “Amanat PJM Presiden Sukarno Pada Appel Besar Sukarelawan Berhubung Dengan Konfrontasi Dengan Malaysia di Depan Istana Merdeka, Djakarta, 13 April 1964”, hlm.1, Arsip Nasional RI.

Semoga Rahmat dan Taufik Tuhan beserta kepada kita.  
Demikian Dwikora, saudara-saudara, maka, saudara-saudara, inilah Komando Dwikora yang saya berikan kepadamu sekalian.  
Kerjakan. Bismillah!”<sup>176</sup>

Dengan keluarnya Dwikora, politik konfrontasi dengan Malaysia mendapat legitimasi yang lebih kuat. Pengerahan sukarelawan dalam rangka mengganyang Malaysia disambut dengan antusias oleh warga negara Indonesia. Pada perjalanan sejarah selanjutnya gerakan sukarelawan Indonesia akan sulit dibedakan dengan para gerilyawan PGRS/PARAKU. Mereka sama-sama memperoleh pelatihan militer dari Tentara RI dan sama-sama diterjunkan di perbatasan.<sup>177</sup> Hal ini semakin kompleks ketika PKI memanfaatkan pengerahan sukarelawan untuk melatih para kadernya, yang kebanyakan dari etnis Tionghoa, sehingga akan sulit dibedakan yang mana PGRS/PARAKU, kader PKI dan kelompok yang tidak mengetahui tentang semua itu.

## **B. Politik Konfrontasi: Dukungan Terhadap PGRS/PARAKU 1963-1966**

Dalam pelaksanaan Dwi Komando Rakyat dan konfrontasi terhadap Malaysia, maka Pemerintah Republik Indonesia membentuk Komando Siaga (KOGA) yang berada langsung di bawah KOTI (Komando Operasi Tertinggi) yang dipimpin Presiden RI. Maka dalam pelaksanaan Dwikora baik secara politis maupun operasional, terdapat tiga unsur yang secara teoritis merupakan suatu gabungan tetapi dalam prakteknya terlepas satu sama lain.<sup>178</sup> Hal ini dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Dwikora.

---

<sup>176</sup> ”Amanat Komando/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Pada Appel Besar Sukarelawan Pengganjangan Malaysia di Depan Istana Merdeka, Djakarta, 3 Mei 1964.”, hlm.16, dokumen Arsip Nasional RI.

<sup>177</sup> Pembayun Sulistyorini, “Pemberontakan PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat, Jurnal Sejarah dan Budaya Kalimantan, edisi 03/2004, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Pontianak, hlm. 39.

<sup>178</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op.cit*, hlm.168.

Ketiga unsur tersebut adalah: pertama, KOTI yang membawahi semua unsur-unsur pelaksanaan Dwikora. Kedua, Komando Siaga yang kemudian bernama Komando Mandala Siaga sebagai komandan gabungan angkatan-angkatan, sebagai pelaksanaan operasional tugas-tugas Dwikora. Ketiga, Komando Daerah Militer secara teritorial dan operasional dalam hal ini untuk daerah Kalimantan Barat ialah Kodam XII/Tanjungpura.<sup>179</sup> Perlu ditambah juga peran Badan Pusat Intelijen yang dipimpin Dr. Soebandrio, yang pada kelanjutannya seringkali melakukan kegiatan-kegiatan intelijen dalam pelaksanaan Dwikora.

Setelah dinyatakan konfrontasi terhadap Malaysia, maka Pemerintah Republik Indonesia mulai mempersiapkan usaha-usaha peningkatan dibidang militer untuk mengimbangi situasi politik yang semakin meningkat. KOTI mulai melancarkan operasi intel<sup>180</sup> atau operasi “A” dan operasi “Lintas Bebas” untuk penyusupan gerilyawan ke daerah musuh dan pembentukan berbagai Komando Pertahanan. Hal ini juga dilakukan untuk mengimbangi pertahanan Tentara Inggris di daerah Singapura, Malaka dan Kalimantan Utara, yang melipatgandakan kekuatan perangnya dalam rangka menumpas gerakan Azahari.<sup>181</sup>

Meskipun demikian, dengan pembentukan KOGA, Komando Tertinggi tidak menghentikan ataupun mengintegrasikan operasi “A” dan operasi “Lintas

---

<sup>179</sup> *Idem*

<sup>180</sup> Dalam buku Tandjungpura Berjuang seringkali ditemukan ”operasi intel”, yang dimaksud adalah operasi intelijen atau operasi rahasia atau operasi mata-mata, dengan menyusupkan tentara untuk memperoleh informasi mengenai letak dan kekuatan musuh.

<sup>181</sup> *Idem*, menurut JAC Makie, seperti dikutip dari <http://muhlissuhaeri.blogspot.com> (edisi cetak di Borneo Tribune, 10 Februari 2008 dengan judul The Lost Generation 1), “ketika Malaysia baru merdeka ada 2.000 tentara Inggris dan Australia. Setelah Federasi terbentuk kekuatan militer dengan cepat ditambah menjadi 50.000”.

Bebas” yang telah dilakukan sebelumnya kepada KOGA, sehingga seolah-olah terjadi semacam dualisme pelaksanaan tugas. Oleh karena perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan dari operasi “A” yang dilaksanakan KOTI tak diketahui sama sekali oleh KOGA, maka Komando Siaga terpaksa harus menghadapi akibat-akibat seperti *counter move* dari Pasukan Inggris akibat penyusupan pasukan-pasukan operasi “A” ke daerah Malaysia.<sup>182</sup>

Dualisme kerja antara unsur-unsur pelaksana Dwikora sebenarnya tidak perlu terjadi. Mengingat pelaksanaan Dwikora juga menyangkut operasi militer, seharusnya cara kerja unsur-unsur pendukung Dwikora menggunakan sistem komando seperti yang digunakan militer. Namun, situasi dan kondisi politik dalam negeri Indonesia saat itu (1960-an) tidak memungkinkan untuk Presiden menyerahkan komando hanya kepada pihak militer saja. Sehingga presiden meletakkan orang-orang kepercayaannya di KOTI. Seperti Kepala Staf Gabungan I KOTI yang dipegang Dr. Soebandrio yang juga sebagai Ketua Badan Pusat Intelijen.<sup>183</sup> Dalam perjalanan sejarah selanjutnya dapat dilihat bagaimana BPI juga mengambil peran yang besar, terutama yang terkait dengan PGRS/PARAKU.

Sementara KOTI dan KOGA melakukan persiapan-persiapan rencana operasi, kegiatan-kegiatan operasi militer di Kalimantan Barat sudah dimulai sejak meletusnya perlawanan yang dipimpin Azahari di Kalimantan Utara, yang kemudian mendirikan Negara Nasional Kalimantan Utara. Sebagai tindakan keamanan terhadap proklamasi Azahari,<sup>184</sup> agar tidak terjadi hal-hal yang tidak

---

<sup>182</sup> *Ibid*, hlm. 169.

<sup>183</sup> Lihat SEMDAM XII/Tanjungpura, hlm. 169.

<sup>184</sup> Presiden Soekarno atas nama Pemerintahan Indonesia mendukung dan mengakui Negara Nasional Kalimantan Utara pimpinan Azahari. Sementara di sisi lain gerakan Azahari ini berhasil

diinginkan bagi kepentingan keamanan Indonesia, pada tanggal 31 Desember 1962 Pangdam XII/ Tanjungpura mengeluarkan PRIN OP No.03/12/1962 untuk mengadakan operasi intelijen, teritorial dan pengamanan daerah.<sup>185</sup>

Sepanjang tahun 1963 Kodam XII/Tanjungpura melakukan operasi teritorial dan pertahanan di wilayah Kalimantan Barat.<sup>186</sup> Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan di bidang politik dan diplomasi antara Indonesia dengan Malaysia yang semakin jauh dari kata damai. Pada tanggal 10 Oktober 1963, Pangdam XII/Tanjungpura telah memerintahkan untuk menyusun pertahanan dan keamanan perbatasan yang bersifat semesta. Perintah tersebut meliputi penempatan satuan-satuan tempur sepanjang daerah perbatasan dan pertahanan daerah-daerah Komando Distrik Militer.<sup>187</sup>

Operasi penumpasan terhadap NNKU yang dilakukan tentara Inggris membuat pasukan-pasukan TNKU melarikan diri ke wilayah Indonesia, tepatnya ke daerah Kalimantan Barat. Indonesia sendiri sebagai negara yang mengakui Negara Nasional Kalimantan Utara, memberi hak domisili kepada para pendukung NNKU di Jakarta dan Kalimantan Barat.<sup>188</sup> Pada selanjutnya kelompok Azahari akan bekerja sama dengan kelompok lain yang anti Malaysia dari Sarawak dan Indonesia. Kerja sama antara kelompok-kelompok ini kemudian akan membentuk Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU).

---

“dipatahkan” dalam waktu yang relatif cepat oleh pasukan Inggris di Kalimantan Utara. Lihat Bab II, terbentuknya PGRS/PARAKU.

<sup>185</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op.cit*, hlm.181.

<sup>186</sup> *Ibid*, hlm 182.

<sup>187</sup> *Idem*.

<sup>188</sup> *Idem*.

Dalam rangka meningkatkan volume operasi dan pertahanan daerah, maka Kodam XII/Tanjungpura telah menyusun suatu Rencana Operasi yang diberi nama Operasi Pamungkas. Sementara itu Komando Siaga sebagai komando pusat pelaksanaan Dwikora juga menyusun rencana operasi Djaladara yakni operasi untuk penggeseran pasukan ke *staging-areas*. Dalam pelaksanaan operasi Djaladara ini, pada bulan Desember 1964 Soepardjo sebagai Pangkopur IV/Mandau telah datang di Kalimantan Barat.<sup>189</sup> Dengan demikian di Kalimantan Barat sendiri terdapat semacam dua komando militer, yang satu dari Kodam XII/Tanjungpura selaku pemimpin daerah militer Kal-Bar dan Kopur IV/Mandau sebagai pelaksana komando tempur di lapangan yang berada di langsung di bawah Komando Siaga.

Selama pelaksanaan Operasi Lintas Bebas oleh Kodam XII/Tanjungpura sampai bulan Juni 1965 telah dilakukan peningkatan volume pengiriman pasukan gerilyawan ke daerah Serawak dan Kalimantan Utara. Pengerahan gerilyawan didukung dengan pengerahan pasukan dari Kopur IV/Mandau dan Kodam XII/Tanjungpura, ditambah dengan kekuatan sukarelawan tempur bekas unsur-unsur pelaksana operasi "A". Pelaksanaan operasi Lintas Bebas tersebut bersamaan dengan pelaksanaan operasi Djaladara (operasi pergeseran pasukan) dalam rangka persiapan ke arah suatu operasi serangan balasan terhadap *offensif* pasukan Malaysia dan Inggris.<sup>190</sup>

Setelah operasi Lintas Bebas dipegang oleh Kopur IV/Mandau di bawah pimpinan Soepardjo, maka operasi penyusupan ke daerah Kalimantan Utara

---

<sup>189</sup> *Ibid*, hlm. 187.

<sup>190</sup> *Ibid*, hlm. 188

ditujukan untuk membantu pelaksanaan operasi Siaga yaitu operasi membantu perjuangan Rakyat Kalimantan Utara di bawah TNKU, yang kemudian bekerja sama dengan gerilyawan Serawak yang terdiri dari etnis Cina dan partisipan komunis.<sup>191</sup>

Dualisme kerja antara KOTI, KOLAGA, Kodam dan BPI sebenarnya sudah akan diselesaikan dengan keluarnya keputusan Pangad tentang pengintegrasian wewenang semua bentuk operasi intel (operasi mata-mata/intelijen) dan teritorial di bawah Kodam XII/Tanjungpura pada bulan Desember 1963. Dengan Keputusan Pengad tersebut, operasi Lintas Bebas (perembesan gerilyawan ke daerah musuh) yang semula dilaksanakan oleh Pusat, sejak awal tahun 1964 akan dilaksanakan oleh Kodam XII/Tanjungpura. Namun, pelaksanaan operasi Lintas Bebas oleh Kopur (Komando Tempur) IV/Mandau baru dapat diserahterimakan pada bulan Juni 1965.<sup>192</sup>

Operasi pelaksanaan Dwikora yang dilaksanakan oleh Komando Siaga baru dapat dilaksanakan dengan agak baik setelah Komando Siaga pada bulan Maret 1965 diubah menjadi Komando Mandala Siaga dengan penempatan pasukan-pasukan dari Kopur II. Pada dasarnya komando pelaksana Operasi Dwikora di Kalimantan Barat berada di bawah KOLAGA baik secara organisatoris dan taktis. Sedangkan Kodam XII/Tanjungpura sebagai eselon komponen Angkatan Darat hanya berfungsi sebagai supporting unit dan operasi teritorial. Akan tetapi sebagai daerah basis kegiatan dan sebagai front terdepan, Kodam XII/Tanjungpura

---

<sup>191</sup> *Idem.*

<sup>192</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op.cit*, hlm. 187-188.

mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang lebih luas, tidak saja di bidang teritorial tetapi juga di bidang operasi militer.<sup>193</sup>

Demikianpun dalam pertahanan teritorial dan pengendalian sukarelawan-sukarelawan tempur, sukarelawan-sukarelawan serbaguna seperti guru, dokter, dan pembangunan, di mana pembinaan dan pembiayaannya berada di bawah tanggung jawab Kodam XII/Tanjungpura. Demikianlah keadaan tanggung jawab dan peranan yang dilaksanakan oleh Kodam XII/Tanjungpura dalam pelaksanaan Dwikora sampai meletusnya peristiwa G 30 S. Setelah normalisasi hubungan dengan Malaysia, tugas Kodam XII/Tanjungpura beralih dalam peranannya melaksanakan tugas operasi penumpasan gerombolan PGRS/PARAKU.<sup>194</sup>

Dibandingkan dengan konfrontasi di bidang politik dan ekonomi, konfrontasi di bidang militer mengambil skala yang lebih terbatas. Meskipun di atas dapat dilihat langkah-langkah yang diambil militer RI, namun tidak dilakukan dislokasi kesatuan militer secara besar-besaran di sepanjang perbatasan. Tentara Indonesia enggan melibatkan terlalu banyak pasukan di Kalimantan karena semakin besar kemungkinan terjadinya krisis di dalam negeri. Pemerintah Indonesia tampaknya ingin mengedepankan kekuatan para sukarelawan, yang pada saat Dwikora diumumkan tanggal 3 Mei 1964 sudah berjumlah 21 juta orang.<sup>195</sup>

---

<sup>193</sup> *Ibid*, hlm. 187

<sup>194</sup> *Idem*.

<sup>195</sup> Hidayat Mukmin, *op.cit.*, hlm. 97. M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 543. Mengenai jumlah sukarelawan yang 21 juta dan pengumuman Dwikora dapat dilihat juga pada Dokumen Arsip Nasional RI: "Amanat Komando/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Pada Appel Besar Sukarelawan Pengganjangan Malaysia di Depan Istana Merdeka, Djakarta, 3 Mei 1964."

Dalam rangka politik konfrontasi dengan Malaysia, Pemerintah Indonesia memobilisir kekuatan rakyat melalui strategi pembentukan pasukan sukarelawan (sukwan) yang terdiri dari putera-puteri Indonesia yang didatangkan dari seluruh pelosok tanah air. Perkembangannya anggota sukwan juga mengikutsertakan putera-puteri etnis Cina-Malaysia (Sarawak). Mereka dengan sukarela menggabungkan diri ke dalam tubuh sukwan-Indonesia. Mereka datang ke Kalimantan Barat beserta pimpinan-pimpinan mereka yaitu orang-orang Cina-Sarawak yang pernah mendapatkan latihan militer di RRC khususnya Peking. Mereka antara lain: Lim Yen Hwa, Yao Choong How, Wong Hon, Wong Kee Chok, Lay Chon dan Lay Pakah.<sup>196</sup>

Menurut Lie Sau Fat atau X. F. Asali, budayawan Tionghoa Kal-Bar dan saksi sejarah, ketika peristiwa Dwikora, banyak sukarelawan membantu perang dengan Malaysia. Mereka terdiri dari para pelarian dari Sarawak, yang pada umumnya etnis Tionghoa dan partisipan komunis. Kemudian ada juga sukarelawan yang berasal dari Singkawang, Bengkayang dan berbagai wilayah di Indonesia, yang terdiri dari berbagai etnis seperti Melayu, Dayak, dan Tionghoa di Indonesia.<sup>197</sup> Selain melakukan perang langsung dengan Malaysia, Indonesia juga merekrut kelompok yang menentang pembentukan Federasi Malaysia. Kelompok tersebut adalah kelompok NNKU dan TNKU pimpinan Azahari, serta kelompok SUPP yang melarikan diri ke Kal-Bar.<sup>198</sup>

---

<sup>196</sup> La Ode, M.D., *Tiga Muka Etnis Cina-Indonesia Fenomena di Kalimantan Barat*, Biograf Publishing, Yogyakarta, 1997, hlm. 117. Lihat juga Pembayun Sulistyorini, *op.cit.*, hlm. 39.

<sup>197</sup> Muhlis Suhaeri, "The Lost Generation (1)", *Borneo Tribune*, Minggu, 11 Februari 2008, tulisan dikutip dari blog pribadi penulis di alamat <http://muhlissuhaeri.blogspot.com> dengan isi yang sama seperti edisi cetak surat kabar Borneo Tribune.

<sup>198</sup> *Idem.*

Sebagai kelanjutannya Kodam Tanjungpura sebagai pelaksana Dwikora daerah Kalimantan Barat pada bulan Mei dan Juni 1964, memberikan latihan militer pada 28 orang sukarelawan dari SUPP (*Sarawak United People Party*) yang “lari” ke Kal-Bar. Selain itu Kodam Tandjungpura juga melatih para sukarelawan yang dikirim dari Jakarta. Latihan militer tersebut di lakukan di Dodiktif 18 – Tandjungpura di Bengkayang.<sup>199</sup> Seperti yang diungkapkan Letnan Kolonel Harsono Subardi, mantan Biro Intel POM Kodam XII Tanjungpura, “Saat itu, kita melatih PGRS/PARAKU untuk dipergunakan membantu memerdekakan Malaysia. Mereka dilatih oleh RPKAD di Bengkayang.”<sup>200</sup> Menurut Letkol Harsono Subardi PGRS kebanyakan orang Cina Sarawak, sedangkan PARAKU sebagian besar dari Sabah dan keduanya berideologi komunis. “Saat itu, RI memang jaman Orde Lama, dan Bung Karno tidak melarang ideologi komunis... PGRS punya koran, namanya *Lae Tung Po* isinya berbagai tema tentang gerakan PGRS.”<sup>201</sup>

Edward Tenlima, mantan Danlanud Singkawang 2, Bengkayang memberikan pernyataan di Surat Kabar Borneo Tribune “banyak sukarelawan datang dari Malaysia, dilatih secara kemiliteran di Sanggau Ledo, Bengkayang. Setelah itu mereka kembali ke Malaysia melakukan penyusupan. Sukarelawan itu

---

<sup>199</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op.cit.*, hlm 183 dan 185. Dalam Pembayun Sulistyorini, *op.cit.*, hlm.53, disebutkan: selama masa konfrontasi 85 orang dari Sarawak telah meyeberang ke Kalimantan Barat. Mereka pada umumnya termasuk dalam onderbouw SUPP.

<sup>200</sup> Muhlis Suhaeri, “The Lost Generation (1)”, *op.cit.*

<sup>201</sup> Muhlis Suhaeri, “The Lost Generation (2)”, *Borneo Tribune*, Senin, 11 Februari 2008, tulisan dikutip dari blog pribadi penulis dengan alamat <http://muhlissuhaeri.blogspot.com>

sebagian besar dari Cina Sarawak.”<sup>202</sup> Sarwono WHD, mantan Waasintel Kodam XII Tanjungpura memberikan kesaksian mengenai latihan militer yang diberikan Tentara RI kepada PGRS/PARAKU, “latihan tidak resmi, tentu saja supaya bisa perang. Latihan itu selama 15 hari. Senjata tidak diberikan Kodam. Senjata juga tidak lengkap. Maksudnya, tidak satu orang pegang satu senjata.”<sup>203</sup>

Kerja sama antara PGRS/PARAKU dengan Pemerintah Indonesia juga tampak dalam pengakuan Thong Fuk Long atau Tomidi, yang saat peristiwa diminta Tentara RI menjadi penerjemah para gerilyawan PGRS. “Pada akhir Desember 1963, ada 31 orang dari Sarawak datang ke Sanggau Ledo, mereka para pentolan PGRS.” Tomidi menerjemahkan perkataan gerilyawan PGRS sebagai berikut “kami mendapat persetujuan dari Pemerintah RI, untuk memerdekakan Sabah dan Sarawak. Pemerintah minta etnis Cina untuk membantu. Kalau bukan etnis Cina, siapa lagi yang bantu.”<sup>204</sup>

Selama periode 1963-1965 gerilyawan PGRS/PARAKU memanfaatkan waktu untuk ”membina” rakyat perbatasan yang berada di wilayah kekuasaan hukum Indonesia. Tujuan penyerangan PGRS/PARAKU dan para sukarelawan diarahkan kepada negara Malaysia terutama Sarawak di Malaysia Timur. Target perjuangannya adalah untuk mengobarkan semangat perlawanan rakyat terhadap pemerintah Federasi Malaysia dan merebut Kota Kuching sebagai Ibukota wilayah Sarawak. Agar tujuan itu tercapai, mereka membentuk basis-basis strategis di Distrik Sempadi/Matan, Lundu, Nonok, Bau, Sibul, Binatang dan

---

<sup>202</sup> *Idem.*

<sup>203</sup> *Idem.*

<sup>204</sup> *Idem.*

Semanggang, serta melakukan penyerangan-penyerangan terhadap pos-pos Tentara Diraja Malaysia.<sup>205</sup>

Sepanjang perbatasan Indonesia digunakan sebagai basis konsolidasi dan *training centre* bagi personilnya. Dengan demikian, apabila gerilyawan PGRS/PARAKU didesak oleh Pasukan Diraja Malaysia maka mereka mundur ke wilayah Indonesia. Jika mereka melakukan pendekatan kepada Rakyat Indonesia di pedalaman Kalimantan Barat kemudian didesak oleh TNI mereka mundur ke wilayah Malaysia dan menyusun siasat-siasat baru untuk penyerangan berikutnya.<sup>206</sup>

Menurut Sarwono WHD, mantan Waasintel Kodam XII Tanjungpura, para anggota PGRS/PARAKU menjalani hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Pihak Kodam selaku pelaksana Dwikora tidak mengurus keperluan para gerilyawan tersebut. Sepengetahuan Sarwono, yang mengurus para gerilawan PGRS/PARAKU adalah Biro Pusat Intelijen (BPI)<sup>207</sup> yang dipimpin Dr. Soebandrio, Wakil Perdana Menteri I, merangkap Menteri Luar Negeri.<sup>208</sup>

Masih menurut Sarwono BPI saat itu bergerak sendiri dan tidak mengikutsertakan Kodam, namun Kodam tetap harus diberitahu mengenai gerakan intelijen. Peran Kodam bagi intelijen adalah memberikan bahan dan informasi untuk bergerak, misalnya dalam bentuk latihan yang bekerja sama

---

<sup>205</sup> Pembayun Sulistyorini, *op.cit.*, hlm. 54.

<sup>206</sup> *Ibid.*, hlm. 54-55.

<sup>207</sup> Menurut Sarwono, mantan Waasintel Kodam XII Tanjungpura, BPI pada masa konfrontasi bermarkas di garasi rumah orang di jalan Gajah Mada, Pontianak. Tetapi Sarwono lupa alamatnya. Lihat *Lost Generation* (2), Borneo Tribune, Senin 11 Februari 2008.

<sup>208</sup> *Idem.*

dengan intelijen. Selain itu BPI mendirikan barak-barak di sepanjang perbatasan Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Putusibau, Benua Martinus hingga Badau. "Kalau yang lewat orang PGRS/PARAKU mereka yang pakai. Kalau tentara Indonesia yang lewat, ya mereka yang pakai."<sup>209</sup>

Hubungan kerja antara Badan Pusat Intelijen (BPI) dengan Angkatan Bersenjata Indonesia memang seperti berjalan sendiri-sendiri. Dalam Politik Dwikora atau yang dikenal dengan Politik Ganyang Malaysia hal tersebut sangat tampak. Pengerahan tentara Indonesia di perbatasan dan kontak-kontak yang terjadi dengan Tentara Diraja Malaysia selalu dilihat sebagai gerakan dari tentara Indonesia. Padahal di sisi lain, PGRS/PARAKU yang didukung Badan Pusat Intelijen (BPI) juga melakukan kontak-kontak senjata dengan pihak Malaysia. Gerakan yang sebenarnya berbeda antara Angkatan Bersenjata Indonesia dan PGRS/PARAKU secara langsung dilihat sebagai gerakan dari Indonesia karena posisi munculnya gerakan memang dari wilayah Indonesia.

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang mendukung gerakan PGRS/PARAKU melalui dinas intelijen seperti BPI, membuat "kisah" PGRS/PARAKU tidak menjadi konsumsi publik pada tahun 1963-1965 (sebelum G 30 S). Masyarakat umum, yang tidak berada langsung di perbatasan Indonesia – Malaysia tidak mengerti mengenai praksis langsung dari Politik Ganyang Malaysia. Masyarakat hanya mengetahui adanya gejolak di perbatasan. Hal ini seperti yang diuraikan L.H. Kadir, saksi sejarah, mantan Wakil Gubernur Kal-Bar 2003-2008, pada masa konfrontasi bekerja sebagai pegawai negeri di Putusibau (1963-1965) dan Mahasiswa APDN (1965-1968).

---

<sup>209</sup> *Idem.*

“Sekitar tahun 1963-1964 tidak ada pernyataan dukungan Indonesia terhadap PGRS/PARAKU. Masyarakat hanya tahu bahwa ada pergolakan rakyat di perbatasan. Setahu saya setelah peristiwa G 30 S baru ada di koran berita tentang PGRS/PARAKU. Sebelum itu yang dikenal sukwan... Sewaktu masih di Putusibau, saya pernah mengantar sukwan dari Putusibau untuk berlatih di perbatasan. Saya dengan *speed* ke Semitau diperintah Dandim Hartono supaya mengantar. Orang-orang yang saya antar Cina semua waktu itu. Mereka bawa senjata, ada pula *amoi-amoi*, banyak perempuan. Ada juga dokter dua orang, mereka latihan di Badau.”<sup>210</sup>

Sejak bulan Januari 1965 sampai menjelang meletusnya G30S, kegiatan infiltrasi dan pertempuran ke Malaysia meningkat sehingga rakyat perbatasan di kedua belah pihak sangat terpengaruh oleh kegiatan tersebut. Pasca G30S situasi belum mempengaruhi PGRS/PARAKU, karena pemerintah belum membubarkan PKI. Situasi komando di Kalimantan Barat masih belum jelas. Satu-satunya komando yang diberikan oleh Pangdam XII/Tanjungpura adalah tetap di pos masing-masing dan mempertinggi kewaspadaan. Situasi demikian ternyata dimanfaatkan PGRS/ PARAKU untuk konsolidasi kekuatan, di mana banyak simpatisan PKI yang bergabung karena situasi politik yang semakin menekan PKI.<sup>211</sup>

### **C. Penumpasan PGRS/PARAKU oleh Pemerintah Orde Baru 1966-1967**

Pada bulan Januari 1964, atas prakarsa Jaksa Agung Robert Kennedy, diadakan dua kali pertemuan antara dirinya dan Soekarno untuk menyelesaikan persoalan Malaysia. Pertemuan pertama berlangsung di Tokyo, ketika dilakukan perundingan puncak antara Soekarno dan Abdul Rahman. Pertemuan kedua di Jakarta pada tanggal 25 Januari 1964. Walaupun sempat menelorkan perintah penghentian tembak menembak, tapi tidak dapat menemukan penyelesaian yang

<sup>210</sup> Wawancara langsung dengan penulis pada hari Minggu, 20 Juni 2008 sekitar pukul 17.00 Wib lokasi di kediaman L.H. Kadir, jalan M.T. Haryono No. 40 Pontianak, Kalimantan Barat.

<sup>211</sup> Pembayun Sulistyorini, *op.cit.*, hlm. 56.

dapat diterima secara baik oleh kedua belah pihak, yaitu Soekarno dan Abdul Rahman.<sup>212</sup>

Kegagalan pertemuan pada bulan Januari tersebut, mendorong Menteri Luar Negeri Thailand Thanat Khoman untuk memprakarsai pertemuan lebih lanjut di Bangkok. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri ketiga negara yaitu Soebandrio, Abdul Razak dan Lopez, berlangsung antara tanggal 6-10 Februari 1964. Pertemuan hanya menghasilkan kesepakatan agar semua pihak kembali ke semangat musyawarah Maphilindo dan menyetujui Thanat Khoman menjadi pengawas pelaksanaan gencatan senjata.<sup>213</sup>

Sebulan kemudian, pada tanggal 3 dan 6 Maret diadakan lagi pertemuan kedua di Bangkok, namun juga gagal mencapai kesepakatan. Usaha perdamaian terakhir yang dilaksanakan sebelum peralihan kekuasaan di Indonesia, ialah Pertemuan Puncak antara Soekarno, Abdul Rahman dan Macapagal di Tokyo bulan Juni 1964. Pertemuan yang berlangsung sehari ini berakhir dengan ketetapan untuk membentuk sebuah komisi yang terdiri dari negara-negara Asia-Afrika (*Afro-Asia Conciliation*). Kesepakatan ini juga gagal dan setelah itu tidak lagi terdengar usaha lain untuk menyelesaikan masalah “Malaysia” dengan diplomasi. Akibatnya konfrontasi berlangsung terus.<sup>214</sup>

Seperti yang pernah penulis ungkapkan sebelumnya, bahwa ada kelompok-kelompok dalam tubuh Angkatan Bersenjata maupun sipil di Indonesia yang menginginkan konfrontasi berakhir. Mereka yang masuk ke dalam kelompok ini

---

<sup>212</sup> Hidayat Mukmin, *op.cit.*, hlm. 106-107.

<sup>213</sup> *Ibid.*, hlm. 107

<sup>214</sup> *Idem.*

dapat disebutkan: Soeharto, Kemal Idris, Ali Moertopo, L.B. Moerdani, Yoga Soegomo dan A. Rachman Ramli. Sedangkan dari pihak sipil ada Adam Malik dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.<sup>215</sup> Dari pihak Malaysia ada pula kelompok yang juga menginginkan berakhirnya konfrontasi, mereka adalah Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (1969-1970) Tan Sri Muhamad Ghazali bin Shafie dan staf Kementerian Luar Negeri Muhamad Sulong.<sup>216</sup>

Menurut Hidayat Mukmin ada tiga faktor yang mendorong penyelesaian konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Pertama, faktor internal dari Federasi Malaysia, adanya perpecahan di dalam Federasi yang mengakibatkan Brunei dan kemudian Singapura melepaskan diri. Kedua, dari internal Indonesia di mana terjadi pergantian kekuasaan yang didasari peristiwa 30 September 1965. Ketiga, adanya upaya sungguh-sungguh dari kedua pihak untuk menyelesaikan konfrontasi tanpa menggunakan mediasi pihak ketiga.<sup>217</sup> Dengan perkembangan historiografi yang pesat di Indonesia pasca Orde Baru, sulit untuk mengatakan berakhirnya konfrontasi tanpa campur tangan pihak asing. Beberapa penulisan sejarah terbaru menunjukkan adanya campur tangan pihak asing selama proses pergantian kekuasaan di Indonesia.

Secara khusus bagi Indonesia, alasan-alasan di atas harus ditambah dengan alasan ekonomis dan politis. Secara ekonomi, di mana pun juga perang membutuhkan biaya yang tinggi. Sulit bagi Indonesia yang pemerintah dan

---

<sup>215</sup> Lihat *ibid*, hlm. 114, 129 dan 130.

<sup>216</sup> Lihat *ibid*, hlm. 114.

<sup>217</sup> *Ibid*, hlm. 108.

rakyatnya sedang dalam ekonomi lemah, dapat menjalankan perang dengan berhasil.<sup>218</sup> Meskipun faktanya Indonesia memiliki armada militer yang kuat dari kerja samanya dengan Uni Soviet.<sup>219</sup> Sedangkan secara politis, terdapatnya kelompok-kelompok di Indonesia yang jalan politiknya berseberangan dengan politik Nasakom Soekarno. Kelompok-kelompok ini memang mengidentikkan politik konfrontasi sebagai politik Soekarno yang didukung PKI. Dengan melemahkan kekuasaan Soekarno Pasca G30S, mereka pun menginginkan berakhirnya politik konfrontasi.

Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966 diadakan perundingan antara Menteri Luar Negeri RI Adam Malik dan Menlu Malaysia Tun Abdul Razak di Bangkok atas bantuan Menteri Luar Negeri Thailand Thanat Khoman. Perundingan yang kemudian dikenal dengan *Bangkok Talks* menghasilkan pertukaran surat-surat yang memuat prinsip-prinsip untuk suatu perjanjian bagi penyelesaian persoalan Malaysia.<sup>220</sup>

Sebagai kelanjutan dari perundingan Bangkok, pada tanggal 13-14 Juni 1966 telah datang misi perekonomian Malaysia di bawah pimpinan Tun Gozali Sjafie. Pada tanggal 17 Juli 1966 Indonesia mengirim juga *fact finding mission* ke Singapura. Puncak dari semua perundingan itu adalah ditandatanganinya suatu persetujuan antara Indonesia dan Malaysia untuk normalisasi hubungan antara kedua negara di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan itu dikenal dengan *Jakarta Accord*.<sup>221</sup>

---

<sup>218</sup> Lihat G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm.119. Hidayat Mukmin, *op.cit.*, hlm. 113.

<sup>219</sup> G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm.124.

<sup>220</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op.cit.*, hlm. 194.

<sup>221</sup> *Idem.*

## **PERSETUJUAN UNTUK NORMALISASI HUBUNGAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA<sup>222</sup>**

Menyadari keperluan adanya hubungan-hubungan yang erat dan bersahabat antara Indonesia dan Malaysia dan untuk menciptakan suatu suasana yang baik bagi kerjasama antara kedua negara, dengan dijiwai Persetujuan Manila serta rasa persaudaraan antara kedua bangsa yang mempunyai ikatan sejarah dan kebudayaan sejak jaman purbakala, maka memutuskan untuk mengadakan suatu perjanjian guna menormalisasi hubungan-hubungan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Malaysia dan untuk maksud ini menunjuk sebagai wakil-wakil berkuasa penuh mereka:

Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Yang Mulia Adam Malik, Menteri Utama Bidang Politik/ Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

Untuk Pemerintah Malaysia: Yang Mulia Tun Abdul Razak bin Dato Husein, Wakil Perdana Menteri Malaysia;

yang setelah memeriksa surat kepercayaan masing-masing dan mendapatkan-nya benar dan dalam bentuk semestinya, menyetujui sebagai berikut:

### Pasal 1

Pemerintah Malaysia, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan antara kedua negara yang timbul karena dibentuknya Malaysia, menyetujui untuk memberikan kesempatan kepada Rakyat Sabah dan Serawak, yang langsung berkepentingan, untuk menegaskan lagi, secepat mungkin, secara bebas dan demokratis melalui pemilihan umum, keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia.

### Pasal 2

Pemerintah Republik Indonesia, dari keinginannya yang sungguh-sungguh untuk mengadakan kerja sama dan persahabatan yang erat antara Indonesia dan Malaysia, menyetujui dan Pemerintah Malaysia menerima baik, bahwa hubungan diplomatik antara kedua negara segera diadakan, dan bahwa mereka akan mengadakan pertukaran perwakilan diplomatik secepat mungkin.

### Pasal 3

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia menyetujui, bahwa, berhubung dengan yang tertera di atas, tindakan-tindakan bermusuhan antara kedua negara segera dihentikan.

### Pasal 4

Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal penanda tangannya,

---

<sup>222</sup> *Ibid*, hlm. 194.

Untuk menyaksikannya, maka yang bertanda tangan di bawah ini yang dikuasakan oleh pemerintahannya masing-masing telah menanda tangani perjanjian ini.

Dibuat di Jakarta dalam rangkap dua, tanggal sebelas Agustus 1966.

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

ttd.

ADAM MALIK

Untuk Pemerintah Persekutuan Malaysia

ttd.

TUN ABDUL RAZAK BIN DATO HUSSEIN

Persetujuan Normalisasi Hubungan kedua negara ditandatangani pada pukul 11.00 waktu Indonesia Bagian Barat atau pukul 12.00 waktu Malaysia, di Ruang Pancasila Gedung Departemen Luar Negeri Pejambon. Hadir dalam acara tersebut dari pihak Malaysia adalah Deputi Perdana Menteri/Menteri Pertahanan Razak, Ghazali, beberapa pejabat Kementerian Luar Negeri dan dari Angkatan Bersenjata Malaysia. Sedangkan di pihak Indonesia turut hadir Ketua Presidium Kabinet Ampera Soeharto, Ali Moertopo. L.B. Moerdani, beberapa pejabat Kementerian Luar Negeri dan beberapa perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.<sup>223</sup>

Jakarta *Accord* merupakan suatu landasan berupa persetujuan bersama untuk normalisasi hubungan antara kedua negara dan landasan itu masih perlu dikembangkan. Konfrontasi sebenarnya baru selesai setelah ada pengakuan terhadap Malaysia seperti yang tertuang dalam pasal 1 Jakarta *Accord*. Segala sesuatu yang tercantum dalam Jakarta *Accord* hanya dapat dilaksanakan apabila tidak ada kegiatan-kegiatan permusuhan lagi antara kedua negara.

---

<sup>223</sup> Hidayat Mukmin, *op.cit.*, hlm. 140.

Menanggapi isi dari Jakarta *Accord*, maka KOLAGA mengeluarkan instruksi dengan radiogram tanggal 10 Agustus 1966 No. TSR-26/1966 kepada semua Komando Bawahan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan operasi. Langkah selanjutnya yang diambil oleh Kopur IV/Mandau, adalah mengadakan seruan agar sukarelawan-sularelawan yang tergabung dalam PGRS/PARAKU supaya segera mengadakan konsolidasi di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Ternyata yang mengikuti seruan tersebut hanya 99 orang, sedangkan sejumlah 739 orang membangkang.<sup>224</sup>

Akibat dari pembangkangan 739 gerilyawan PGRS/PARAKU tersebut, maka Kopur IV/Mandau melancarkan gerakan Operasi Tertib I dan Operasi Tertib II ke daerah-daerah seperti: Gunung Sentawi/Sempatung *complex*, Sungkung *complex*, Melantjau *complex*, dan Benua Martinus *complex*. Gerakan Operasi Tertib I dilaksanakan tanggal 1 Oktober 1966 sampai Desember 1966. Sedangkan Operasi Tertib II dilaksanakan sejak Januari 1967 sampai dengan Maret 1967. Pelaksana penuh Operasi Tertib I dan Tertib II adalah Kopur IV/Mandau dan langsung berada di bawah Kolaga. Sebagai hasil dari Operasi Tertib tersebut, Kopur IV/Mandau dapat menghancurkan lima puluh persen (50%) kekuatan dan senjata gerilyawan PGRS/PARAKU.<sup>225</sup>

Setelah Peristiwa G 30 S dan kemudian keluarnya Supersemar, kekuatan komunisme berada dalam status sangat terancam. Di berbagai wilayah di Indonesia dilakukan pembersihan terhadap orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang dicurigai terlibat Gerakan 30 September. PKI dan komunisme dilarang, demikian pula dengan ajaran Marxisme-Leninisme. Untuk

---

<sup>224</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op.cit.*, hlm. 235.

<sup>225</sup> *Ibid*, hlm. 243.

menindaklanjuti maksud tersebut, maka pemerintah Indonesia melakukan tindakan-tindakan pembersihan melalui alat-alat kekuasaan negara, dalam kasus di Kalimantan Barat adalah Kodam XII/ Tanjungpura.<sup>226</sup>

Dalam rangka pembubaran KOLAGA, maka tugas-tugas operasi penertiban PGRS/PARAKU diserahkan kepada Kodam XII/Tanjungpura dan seluruh kekuatan Kopur IV/Mandau ditarik ke kesatuan semula. Pada saat Operasi Tertib sedang berlangsung, Kodam XII/Tanjungpura pada umumnya tidak banyak mendapat keterangan mengenai data-data situasi PGRS/PARAKU, karena wewenang operasi berada di tangan Kopur IV/Mandau.<sup>227</sup> Pada waktu itu Kodam XII/Tanjungpura berfungsi sebagai *supporting* unit saja.

Periode peralihan ini dapat dikatakan periode yang *vacum* di dalam kontrol dan komando militer di Kalimantan Barat. Dalam periode peralihan ini PGRS/PARAKU berada di dalam keadaan yang di luar kontrol dari Pemerintah RI, yang diwakili militer Indonesia. Sehingga PGRS/PARAKU mendapat peluang untuk konsolidasi dan merekrut anggota baru di kalangan penduduk, terutama etnis Tionghoa. Sebagai akibatnya PGRS/PARAKU dapat mengembangkan organ teritorialnya sampai ke Singkawang dan Pontianak.<sup>228</sup>

Saat itu para anggota-anggota PKI Kalimantan Barat yang menjadi buronan Pemerintah RI mencoba menyelamatkan dirinya. Mereka kemudian bergabung dengan PGRS yang juga didominasi orang-orang komunis dan membentuk pasukan bersenjata yang dinamakan Pasukan Bara. Pasukan ini terdiri

---

<sup>226</sup> Pembayun Sulistyorini, *op.cit.*, hlm.62.

<sup>227</sup> *Idem.*

<sup>228</sup> *Idem.*

dari 60 orang PGRS dan 90 orang anggota PKI, sehingga berjumlah 150 orang, yang dipimpin S.A. Sofyan dari PKI dan Hwang dari PGRS. Pasukan Bara diambil dari nama sebuah bukit di Kabupaten Sambas, di mana mereka menyusun kekuatan.<sup>229</sup> Pada tahun 1966-1967 sedikitnya 500 ribu orang Tionghoa melarikan diri. Mereka bersarang di gua-gua Bukit Pandareng, 20 kilo meter dari Bengkayang. Dari posisi inilah di kemudian hari kelompok PGRS/PARAKU menyerang gudang senjata Angkatan Udara Republik Indonesia di Pangkalan Udara Sanggau Ledo.<sup>230</sup>

Pada tanggal 17 Februari 1967 keluar Surat Rahasia Pangkolaga No.12-33/1967 yang ditujukan kepada Kodam XII/Tanjungpura tentang pelaksanaan “*Security Arrangement on the Border Regions*”. Surat tersebut memuat: pertama, penyusunan dan pembentukan Komando Perbatasan. Kedua, pengendalian operasional langsung dibebankan kepada Koandakal Cq Kodam XII/Tanjungpura. Hal ini berarti, wewenang pengendalian operasional diberikan kepada penguasa daerah pertahanan yang bersangkutan yaitu Kodam XII/Tanjungpura. Sebagai konsekuensinya, maka Kodam Tanjungpura harus melakukan pembersihan terhadap PGRS/PARAKU.<sup>231</sup>

Untuk menanggulangi semua keadaan dalam rangka menumpas PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat, Kodam XII/Tanjungpura melancarkan rentetan gerakan operasi yang dikenal dengan Operasi Sapu Bersih. Dalam perjalanannya Operasi Sapu Bersih dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu: Operasi Sapu

---

<sup>229</sup> *Ibid*, hlm. 245.

<sup>230</sup> “Perkongsiian Tionghoa dan Sarang PGRS-PARAKU”, *Kalimantan Review*, No.47/Juli, *Institute Dayakologi Research and Development*, Pontianak, 1999, hlm. 28.

<sup>231</sup> Pembayun Sulistyorini, *op.cit.*, hlm.63.

Bersih I (April 1967-Juli 1967), Operasi Sapu Bersih II (Agustus 1967-Februari 1969) dan Operasi Sapu Bersih III (Maret 1969-Desember 1969).<sup>232</sup>

## 1. Operasi Sapu Bersih I

Sesuai dengan Surat Keputusan Pangdam XII/Tanjungpura – Panghanda Kalimantan Barat No. Kep-001/02/1967 tanggal 8 Februari 1967 tentang Operasi Sapu Bersih terhadap Gerombolan PGRS/PARKU, maka Pangdam XII/Tanjungpura Brigadir Jenderal Ryacudu mengeluarkan Perintah Operasi tanggal 15 Maret 1967 tentang Rencana Operasi Sapu Bersih Satu.<sup>233</sup> Sejalan dengan kebijaksanaan operasionil yang dilakukan oleh Kodam XII/ Tanjungpura, maka pihak Malaysia juga mengadakan operasi di perbatasan Serawak, yang dilancarkan oleh Brigade III Malaysia. Di pihak Malaysia yang dipimpin oleh Brigadir Ungku Nazarudin kekuatan berkisar sebanyak lima (5) Jon (Batalion). Sedangkan dari Indonesia yang pimpinannya berada pada Kodam XII/Tanjungpura (termasuk Kodim 1201, 1202, 1204, 1205, 1206) dibagi atas tiga (3) Sektor (disebut juga COP).<sup>234</sup>

Gerakan operasi dimulai pada tanggal 15 Maret 1967 yang ditandai dengan gerakan pergeseran pasukan menuju daerah Gunung Sentawi dan Batu Beti. Pada permulaan operasi belum terjadi kontak antara Tentara Indonesia dan gerilyawan PGRS/PARAKU. Pada bulan Mei 1967 terjadi gerakan PGRS/PARAKU dalam bentuk penghadangan terhadap lalu lintas logistik Tentara RI. Dengan adanya penghadangan tersebut maka mulai diadakan pengejaran terhadap gerilyawan PGRS/PARAKU.<sup>235</sup>

---

<sup>232</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op.cit.*, hlm. 244.

<sup>233</sup> *Ibid*, hlm. 248.

<sup>234</sup> Soemadi, *op.cit.*, hlm. 87.

<sup>235</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op.cit.*, hlm. 255..

Dalam pelaksanaan Operasi Sapu Bersih I, ternyata masih terdapat berbagai kesulitan dan belum dapat mencapai hasil yang memuaskan. Bahkan terdapat pasukan yang gugur sebanyak 29 orang. Faktor-faktor penyebab keadaan yang dialami pada tahap pertama disebabkan masih kurangnya tenaga tempur untuk menggempur PGRS/PARAKU. Selain itu pihak PGRS/PARAKU lebih mengenal keadaan medan dan dapat menarik simpati kaum pribumi yaitu suku Dayak setempat.<sup>236</sup> Dalam Tandjungpura Berdjuang ditambahkan gerombolan PGRS/PARAKU sangat mudah memencar dan menyusup ke dalam masyarakat untuk menghilangkan diri dari pengejaran. Hal itu disebabkan masyarakat dan kampung-kampung Tionghoa tersebar luas sampai daerah pedalaman seluruh Kalimantan Barat.<sup>237</sup>

Ada suatu taktik dalam perang gerilya, pencegahan biasanya dilakukan di hutan. Di hutan biasanya tentara berjalan berpencar, tujuannya ketika ada penyergapan bisa menghindar. Di daerah terbuka, seperti di sawah tidak bisa dilakukan penyergapan, karena tentara jalannya merapat dan berkumpul. Teori ini dibalik oleh PGRS/PARAKU, yang menyerang ketika tentara berjalan di sawah. Tentara tidak siap dan tidak menduga akan diserang. Karenanya banyak tentara Indonesia terbunuh di persawahan Bengkayang. Bahkan, sekitar 37 tentara dari Siliwangi meninggal semua.<sup>238</sup>

Penyerbuan PGRS/PARAKU di Sanggau Ledo tanggal 16 Juli 1967 yang dipimpin Wong Hon, The Wa Su dan Sofyan terhadap Pangkalan Udara (Lanu)

---

<sup>236</sup> Soemadi, *op.cit.*, hlm. 87.

<sup>237</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op.cit.*, hlm. 256.

<sup>238</sup> Muhlis Suhaeri, "The Lost Generation (3)", *Borneo Tribune*, Selasa, 12 Februari 2008, tulisan dikutip dari blog pribadi penulis dengan alamat <http://muhlissuhaeri.blogspot.com>

AURI, Singkawang, merupakan pukulan telak bagi tentara Indonesia. Pada peristiwa tersebut PGRS/PARAKU berhasil merampas senjata sejumlah 150 pucuk.<sup>239</sup> Dalam Tandjungpura Berdjung disebutkan bahwa PGRS/PARAKU berhasil melarikan: 56 pucuk G3 semi otomatis, 51 pucuk LE, 1 LMG, 2 bren Madsen kaliber 7,62, 2 pusuk mortis 6 inch, 51 buah granat tangan, 120 buah bayonet G3 dan LE, 20 peti peluru dari berbagai ukuran.<sup>240</sup>

Sebagai akibat penyerangan tersebut tiga prajurit dan satu pegawai sipil tewas. Mereka adalah: Sersan U. Sudirman, Pratu U. Suwardi, Prada U. Awas Sutiono dan pegawai sipil Mardjuki. Pada penyerangan terhadap gudang senjata AURI di Sanggau Ledo tersebut, ternyata PGRS/PARAKU meninggalkan surat kepada pihak Tentara AURI yang berbunyi: “Kami Pindjam Sendjata Untuk Melawan Imperialis Inggris Malaysia.”<sup>241</sup>

Setelah secara nasional dirasakan ancaman bahaya yang bisa timbul dari PGRS/PARAKU, pemerintah kemudian memberi perhatian serius. Pada tanggal 26-28 Juli 1967 Presiden Soeharto memimpin rapat para Penguasa Daerah/Pangdam se- Indonesia di Istana Negara, yang dihadiri pula oleh Pangdam XII/Tanjungpura.<sup>242</sup> Sebagai kristalisasi peristiwa Lanu Singkawang, pemerintah pusat mengirimkan pasukan-pasukan bantuan ke Kodam XII/Tanjungpura, serta dukungan biaya operasi. Dengan datangnya bantuan pasukan dari pusat, maka Panglima Kodam XII/ Tanjungpura yang baru Brigadir Jenderal A.J. Winoto

---

<sup>239</sup> Soemadi, *op.cit.*, hlm. 87.

<sup>240</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op.cit.*, hlm.258.

<sup>241</sup> *Ibid*, hlm. 258.

<sup>242</sup> Soemadi, *op.cit.*, hlm. 87.

menyusun rencana operasi yang lebih terarah. Rencana operasi tersebut kemudian diterapkan dalam Operasi Sapu Bersih II.<sup>243</sup>

## 2. Operasi Sapu Bersih II

Dalam operasi gelombang kedua (Operasi Sapu Bersih II) kesatuan-kesatuan tempur Kodam XII/Tanjungpura telah diperkuat dengan RPKAD, Siliwangi, Kopasgat AURI, dan KKO. Operasi Sapu Bersih II menghasilkan secara lebih memuaskan, dibanding dengan operasi-operasi sebelumnya. Operasi Sapu bersih II ini ternyata memakan waktu kurang lebih dua (2) tahun yaitu Agustus 1967 hingga Februari 1969.<sup>244</sup>

Selama periode bulan Agustus-Desember 1967 kegiatan operasi militer dan kontak pertempuran dengan PGRS/PARAKU meningkat, dibandingkan Operasi Sapu Bersih I. Selama bulan Agustus 1967 terjadi 15 kali kontak senjata dengan gerilyawan PGRS/PARAKU. Selama bulan Oktober juga terjadi kontak senjata 15 kali. Konsentrasi PGRS/PARAKU pertama kali di sekitar Sanggau Ledo, kemudian mulai berpindah ke arah selatan yaitu Bengkayang, Merebuk dan sekitarnya.<sup>245</sup>

Pada tanggal 14 Oktober 1967 terjadi peristiwa yang kemudian banyak membantu gerakan Tentara Indonesia untuk menumpas PGRS/PARAKU. Peristiwa itu adalah gerakan rakyat Suku Dayak melawan para anggota PGRS/PARAKU, yang mengakibatkan mengungsinya ribuan penduduk

---

<sup>243</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op.cit.*, hlm.260.

<sup>244</sup> Soemadi, *op.cit.*, hlm. 87.

<sup>245</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op.cit.*, hlm.270.

Tionghoa<sup>246</sup> dari daerah pedalaman ke kota-kota. Setelah gerakan Suku Dayak terhadap PGRS/PARAKU, maka kegiatan-kegiatan PGRS/PARAKU mulai menurun intensitasnya. Tekanan-tekanan Pasukan Indonesia menyebabkan PGRS/PARAKU semakin terjepit. Putusnya jalur logistik dengan mengungsinya ribuan orang Tionghoa menyebabkan banyak anggota PGRS/PARAKU yang menyerahkan diri. Pada tanggal 28 Oktober 1967 Panglima Yahya dari PGRS bersama 44 orang pengikutnya menyerah kepada KI A JON 328/ Siliwangi di Seluas.<sup>247</sup>

Dalam bulan November konak senjata semakin menurun sekitar delapan (8) kali kontak. Pada tanggal 2 November 1967 pasukan Ton 1 KI A 328/SLW pimpinan Pelda Otong berhasil menewaskan 60 orang PGRS/PARAKU dengan barang bukti 10 buah senjata lantak serta sejumlah besar beras. Bulan Desember menjadi kegagalan bagi PGRS/PARAKU. Beberapa kelompok PGRS/PARAKU tidak dapat bertahan terus menerus karena mendapat tekanan dan daerah suplai mereka dapat direbut dan dihancurkan Tentara Indonesia. Pukulan dari gerakan Suku Dayak telah melenyapkan daerah teritorial PGRS/PARAKU.<sup>248</sup>

### 3. Gerakan Suku Dayak Terhadap PGRS/PARAKU

Pihak militer Indonesia sudah melakukan berbagai operasi militer, tetapi PGRS/PARAKU masih saja tetap ada dan melakukan aktifitas. Dalam

---

<sup>246</sup> Dalam Tandjungpura Berdjung, *idem*, hlm. 277, disebutkan 50.000 orang Tionghoa mengungsi dan 250 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Menurut Tyhie Dju Khian atau Petrus yang diperolehnya dari badan dunia yang menangani pengungsi saat kejadian, ada 3.000 orang meninggal dan 70.000 mengungsi, lihat Muhlissuhaeri, "The Lost Generation (10)", *Borneo Tribune*, Selasa, 19 Februari 2008, tulisan dikutip dari blog pribadi penulis dengan alamat <http://muhlissuhaeri.blogspot.com>

<sup>247</sup> *Ibid*, hlm. 271.

<sup>248</sup> *Idem*.

memandang masalah ini perlu dilihat posisi PGRS/PARAKU berdasarkan wilayah operasinya yang berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Bila PGRS/PARAKU didesak oleh Tentara Malaysia, maka mereka menyingkir ke Indonesia dan melakukan konsolidasi kembali, dan bila PGRS/PARAKU didesak oleh Tentara Indonesia, mereka akan ke Malaysia dan melakukan konsolidasi di sana.<sup>249</sup> Selain itu para gerilyawan PGRS/PARAKU lebih menguasai medan di pedalaman Kalimantan, sedangkan pasukan dari Kodam XII/ Tanjungpura masih dalam tahap peralihan dan penyesuaian setelah “ditinggal” KOLAGA dan Kopur VI/Mandau.

Operasi-operasi militer yang dilakukan Tentara RI ternyata belum mampu melumpuhkan semua kekuatan PGRS/PARAKU. Pihak tentara Indonesia merasa kesulitan untuk menemukan lokasi persembunyian para gerilyawan PGRS/PARAKU. Seringkali tentara Indonesia mendapat informasi mengenai letak persembunyian PGRS/PARAKU, namun ketika dilakukan penyerangan, di lokasi sudah tidak ada lagi anggota PGRS/PARAKU. Salah satu kunci yang bisa membuat PGRS/PARAKU bertahan dalam menghadapi serangan Militer Indonesia adalah logistik yang mencukupi. Pihak Militer Indonesia mencurigai adanya kerja sama antara pedagang-pedagang etnis Tionghoa dengan gerilyawan PGRS/PARAKU. Sehingga salah satu cara untuk mengisolasi PGRS/PARAKU adalah dengan memutuskan suplai logistik tersebut.<sup>250</sup>

---

<sup>249</sup> Pembayun Sulistyorini, *op.cit.*, hlm. 55. Lihat juga La Ode, *op.cit.*, hlm. 116-118.

<sup>250</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, hlm. 274. Soemadi, *op.cit.*, hlm.91, Lihat juga Muhlis Suhaeri, “The Lost Generation (5)”, *Borneo Tribune*, Kamis, 14 Februari 2008, tulisan dikutip dari blog pribadi penulis dengan alamat <http://muhlissuhaeri.blogspot.com>

Pada saat yang bersamaan, mulai muncul pembunuhan terhadap beberapa orang Dayak. Isu yang bermunculan bahwa orang-orang Dayak ini dibunuh oleh PGRS/PARAKU, karena orang Dayak tidak mau lagi membantu PGRS/PARAKU. Setelah terjadi beberapa pembunuhan berikutnya dengan puncak pembunuhan terhadap Tumenggung Dayak Garanese, maka orang Dayak mulai “gerah”. Menurut buku Tandjungpura Berjuang beberapa puluh pemuka suku Dayak telah datang ke Pontianak untuk meminta pendapat dari Residen J.C. Oevang Oeray, yang dipandang sebagai salah seorang pemuka Suku Dayak. Oleh Oevang Oeray diberikan tiga pokok persoalan yaitu:

- a. PGRS dan PARAKU adalah komunis, komunis tidak beragama, orang Dayak adalah orang yang beragama, karenanya orang Dayak tidak bisa hidup bersama komunis. Jadi PGRS dan PARAKU harus diganyang.
- b. PGRS dan PARAKU mengganggu keamanan yang berakibat juga keamanan orang-orang Dayak terganggu dalam mencari kehidupannya sehari-hari. Untuk mencari kemajuan, perlu adanya ketenangan dan keamanan. Karena PGRS dan PARAKU mengganggu keamanan, maka harus diganyang.
- c. Dalam PGRS dan PARAKU mengganggu keamanan orang suku Dayak maka mau tidak mau harus juga terseret-seret yang akan menimbulkan korban waktu dan jiwa. Dari pada korban waktu pasif, lebih baik korban waktu aktif dan turut mengganyang PGRS dan PARAKU.<sup>251</sup>

Ketiga pernyataan di atas juga terdapat dalam buku Peranan Kalimantan Barat Menghadapi Ancaman Subversif Komunisme karya Drs. Soemadi, namun menurut Soemadi beberapa pemuka Suku Dayak telah didatangi oleh Pangdam XII/ Tanjungpura dan mereka mendapat petunjuk dari Pangdam berupa tiga pernyataan di atas. Hal berbeda juga diungkapkan L.H. Kadir dalam wawancara dengan penulis “Setelah satu minggu di Pontianak, di RRI (Radio Republik

---

<sup>251</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op.cit.*, hlm. 274.

Indonesia) saya dengar ada pengumuman mengatasnamakan JC. Oevang Oeray yang sudah mengakhiri masa jabatannya menjadi Gubernur Kalbar tahun 1966. RRI stasiun Pontianak mengumumkan bahwa J.C. Oevang Oeray menyatakan perang terhadap PGRS/PARAKU.”<sup>252</sup>

Meskipun demikian ketiga sumber tersebut sepakat, sejak dikeluarkan pernyataan tersebut, maka kelompok-kelompok suku Dayak mulai bergerak untuk membasmi PGRS/PARAKU yang identik dengan etnis Tionghoa. Namun, yang menjadi permasalahan siapakah konseptor yang mengeluarkan pernyataan yang mendorong terjadinya konflik rasial yang sangat memilukan dalam sejarah HAM di Indonesia. Meskipun demikian permasalahan siapakah yang menjadi konseptor gerakan Suku Dayak terhadap PGRS/PARAKU perlu diadakan penelitian lebih lanjut dan tidak dibahas dalam penelitian ini.

Dalam wawancara Muhlis Suhaeri dengan Letkol (Pur) H. Zaenal Arifin, mantan Komandan Batalyon 402 Sintang, yang dimuat di Borneo Tribune terungkap ada peran intelijen dalam peristiwa pembasmian PGRS/PARAKU, yang identik dengan Tionghoa, oleh Suku Dayak. Dalam wawancaranya Zaenal mengakui perlu adanya pemutusan suplai logistik untuk menumpas PGRS/PARAKU “...Kenyataannya mereka (orang Tionghoa) memang membantu. Tanpa bantuan, tak mungkin PGRS/PARAKU bertahan lama...”<sup>253</sup> Zaenal kemudian bercerita bagaimana cara memutuskan logistik dan memindahkan masyarakat Tionghoa dari pedalaman. “Caranya menciptakan supaya orang Dayak melawan Cina. Ini ada suatu cara yang tidak bisa saya sebutkan, karena saya tidak

<sup>252</sup> Mengenai hal ini lihat Soemadi, *op.cit.*, hlm. 93 dan transkrip wawancara penulis dengan L.H. Kadir tanggal 20 Juni 2008.

<sup>253</sup> Muhlis Suhaeri, “The Lost Generation (5), *op.cit.*

tahu. Ini dari Kodam... Caranya tidak tahu, karena ini operasi intelijen. Dan bukan bidang saya menjelaskannya.”<sup>254</sup>

Gerakan Suku Dayak dalam membasmi PGRS/PARAKU ternyata memiliki keuntungan jika dilihat dari sudut pandang militer. Menurut Tandjungpura Berdjuang ada beberapa akibat dari gerakan Suku Dayak tersebut: (1) Dapat dihancurkannya basis suplai PGRS/PARAKU; (2) Massa PGRS/PARAKU yang tersebar di daerah pedalaman menjadi hilang dan terputusnya hubungan antara kelompok yang satu dan lainnya; (3) Berkurangnya logistik PGRS/PARAKU akibat bergabungnya partisipan PGRS/PARAKU yang melarikan diri dari gerakan Suku Dayak dan putusnya suplai logistik; (4) PGRS/PARAKU terpaksa mengkonsentrasikan kekuatan dan akibatnya mudah dipukul oleh Tentara Indonesia.<sup>255</sup>

Sejak terjadinya peristiwa gerakan Suku Dayak dalam menumpas PGRS/PARAKU, maka secara teratur PGRS/PARAKU dapat dilumpuhkan oleh Tentara Indonesia. Perjalanan sejarah penumpasan PGRS/PARAKU sebenarnya masih terus berlanjut hingga tahun 1972. Setelah Operasi Sapu Bersih II kemudian masih dilanjutkan dengan Operasi Sapu Bersih III dan operasi-operasi pemulihan. Namun, secara garis besar kekalahan PGRS/PARAKU sudah dimulai sejak terjadinya gerakan Suku Dayak tersebut. Gerakan Suku Dayak terhadap PGRS/PARAKU menjadi penutup dari rangkaian Kebijakan Pemerintah RI terhadap PGRS/PARAKU.

Kesimpulan dari bab III ini adalah sikap Pemerintah RI pada Orde Lama yang menentang pembentukan Federasi Malaysia menyebabkan keluarnya

---

<sup>254</sup> *Idem.*

<sup>255</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op.cit.*, hlm.278-279.

kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung PGRS/PARAKU. Sedangkan sikap Pemerintah RI pada masa Orde Baru mendukung dan menerima berdirinya Federasi Malaysia yang menyebabkan kebijakan-kebijakan pemerintah menentang PGRS/PARAKU. Dengan demikian hipotesis kedua yang isinya: “a. Kalau Pemerintah Orde Lama menentang pembentukan Federasi Malaysia, maka Pemerintah Orde Lama akan mendukung PGRS/PARAKU; b. Kalau Pemerintah Orde Baru menerima berdirinya Federasi Malaysia, maka Pemerintah Orde Baru akan menentang PGRS/PARAKU” dinyatakan terbukti..



## BAB IV

### PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH RI TERHADAP PGRS/ PARAKU DI KALIMANTAN BARAT 1963 – 1967

#### A. Sukarelawan dan Gerilyawan: Lahan Konsolidasi PKI

Kebijakan Pemerintah RI pada masa Orde Lama yang mendukung aktivitas PGRS/PARAKU, membuat PGRS/PARAKU dapat tumbuh dan berkembang. Situasi yang kondusif di dalam tubuh PGRS/PARAKU memungkinkan untuk melakukan konsolidasi dan memperbesar kekuatannya dalam rangka mencapai tujuan menggagalkan Federasi Malaysia. Dukungan dari Pemerintah Indonesia berupa bantuan sukarelawan menjadi menambah daya gedor PGRS/PARAKU dalam melawan Pasukan Diraja Malaysia. Dalam hal ini peran PKI sangat besar sekali dalam mendukung politik konfrontasi dan PGRS/PARAKU.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa PKI merupakan pendukung terkuat politik konfrontasi dengan Malaysia. Angkatan Darat RI pada awalnya turut mendukung kebijakan konfrontasi, namun suara tersebut tidak bulat. Beberapa kelompok di dalam AD berusaha berdamai dengan Malaysia tanpa diketahui Presiden Soekarno.<sup>256</sup> Sementara PKI tidak perlu diragukan lagi, secara bulat mendukung politik konfrontasi terhadap Malaysia.

Ternyata pengganyangan Malaysia menguntungkan PKI yang menggunakan situasi politik tersebut untuk memberikan latihan militer kepada banyak aktifis Partai Komunis Indonesia. Bahkan dengan alasan politik konfrontasi, PKI akan mencoba pembentukan angkatan V (lima) dari buruh dan

---

<sup>256</sup> Lihat Hidayat Mukmin, *op. cit.*, hlm. 114, 129 dan 130. Lihat juga M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 544.

tani yang dipersenjatai. Angkatan Darat dalam hal ini berada di sisi yang berlawanan. AD menganggap angkatan kelima merupakan usaha komunis untuk menguasai angkatan bersenjata. Rencana ini sudah menjadi problema tersendiri di kalangan pemerintahan RI. Terutama sejak Chou En Lai menyatakan akan menyediakan bantuan berupa 100.000 pucuk senjata api kepada Indonesia untuk membentuk angkatan kelima.<sup>257</sup>

Dengan latar belakang tersebut berbagai penelitian tentang PGRS/PARAKU yang dilakukan sebelum ini, selalu mengatakan bahwa PGRS/PARAKU merupakan gerakan komunis yang terencana di bawah kendali Tiongkok, dengan tujuan mengkomuniskan negara-negara di Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan bergabungnya sejumlah tokoh dari Partai Komunis Serawak dan Partai Komunis Indonesia, termasuk juga tokoh-tokoh Partai Komunis Serawak yang mendapat latihan militer di Tiongkok. Para tokoh tersebut antara lain Lim Yen Hwa, Yao Choong How, Wong Hon, Wong Kee Chok, Lay Chon dan Lay Pakah.<sup>258</sup>

Fakta tersebut juga diperkuat dengan adanya garis perjuangan Partai Komunis Serawak yang berisi: 1) Partai Komunis Serawak bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan Partai Komunis Indonesia, serta Negara Nasional Kalimantan Utara; 2) menghimpun kekuatan revolusioner dan mempererat hubungan dengan suku Dayak; 3) membuat basis perjuangan di perbatasan Sarawak dan Kalimantan Barat dengan berjuang terus dan mempertajam ajaran

---

<sup>257</sup> G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 119, M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 543, Hidayat Mukmin, *op. cit.*, hlm. 98.

<sup>258</sup> Pembayun Sulistyorini, *op. cit.*, hlm. 39

Mao.<sup>259</sup> Dengan demikian menjadi jelas bahwa gerakan komunis memang sudah masuk dan berkembang di antara para gerilyawan yang menentang Federasi Malaysia di daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak-Malaysia.

Meskipun demikian, cara pandang berbeda penulis gunakan dalam memahami fenomena PGRS/PARAKU pada periode 1963-1967. Penulis mencoba melihat PGRS/PARAKU sebagai suatu gerakan sosial yang dilakukan pihak-pihak yang anti terhadap pembentukan Malaysia. Dengan teori gerakan sosial, penulis mencoba melihat PGRS/PARAKU sebagai peristiwa pada masanya, peristiwa dengan konteks jamannya. Nilai benar dan salah harus dilihat sesuai konteks jaman di mana peristiwa itu terjadi. Dalam hal PGRS/PARAKU, harus dilihat bahwa mereka terbentuk pada masa Presiden Soekarno berkuasa dan mereka ditumpas pada saat Soeharto berkuasa.

Salah satu bagian dari teori gerakan sosial yang dikemukakan Sydney Tarrow menyatakan bahwa “ketegangan politik (gerakan sosial) mengalami peningkatan ketika para pelaku perubahan mendapatkan dukungan sumber daya eksternal untuk keluar dari masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan.”<sup>260</sup> Atas dasar teori tersebut, dapat dipahami bahwa sebuah gerakan sosial akan selalu berusaha mencari dukungan eksternal untuk mencapai tujuannya. Hal yang sama berlaku bagi PGRS/PARAKU yang bekerja sama dengan kelompok komunis, sebab kelompok komunislah yang sangat serius terhadap tujuan menggagalkan Malaysia dan mengusir Inggris. Lebih tepat jika PGRS/PARAKU disebut sebagai

---

<sup>259</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 233

<sup>260</sup> Abdul Wahib Situmorang, *op. cit.*, hlm.5.

gerakan yang bekerja sama dengan kelompok komunis, daripada mengatakan PGRS/ PARAKU sebagai gerakan komunis itu sendiri.

Pada perjalanan selanjutnya PGRS/PARAKU memang identik dengan orang-orang Tionghoa dan komunis. Hal itu disebabkan politik pengerahan sukarelawan oleh Pemerintah RI, berhasil dimanfaatkan PKI untuk memperluas pengaruhnya dan menggalang kekuatan dalam rangka usaha pembentukan angkatan kelima. PKI mengirimkan para partisipan partainya untuk mengikuti pengerahan sukarelawan dan kemudian mendapat pelatihan militer. Pada saat itu sangat sulit untuk melakukan identifikasi golongan terhadap para sukarelawan, karena pendaftaran sukarelawan diikuti oleh semua golongan di Indonesia.

Politik konfrontasi terhadap Malaysia yang diikuti kebijakan pengerahan sukarelawan dalam rangka Dwikora, membawa angin segar bagi PGRS/PARAKU. PGRS/PARAKU mendapat tambahan bantuan dalam perang terhadap Malaysia. Ternyata PKI juga berhasil memanfaatkan momentum ini untuk mengkonsolidasi kekuatannya. Para tokoh PKI Kalimantan Barat dan pendukungnya bergabung dengan tokoh-tokoh komunis dari Sarawak di dalam PGRS/PARAKU Tetapi tetap saja PGRS/PARAKU tidak dapat disebut memperjuangkan komunisme internasional.

Pada saat penyerbuan PGRS/PARAKU di Sanggau Ledo tanggal 16 Juli 1967 terhadap Pangkalan Udara (Lanu) AURI, Singkawang, ternyata PGRS/PARAKU meninggalkan surat kepada pihak Tentara AURI yang berbunyi: “Kami Pindjam Sendjata Untuk Melawan Imperialis Inggris Malaysia.<sup>261</sup>” Hal ini

---

<sup>261</sup> *Ibid*, hlm. 258.

membuktikan bahwa sebenarnya tujuan utama PGRS/PARAKU adalah untuk menggagalkan Federasi Malaysia. Bila selanjutnya PGRS/PARAKU identik dengan komunisme adalah dikarenakan kemenangan komunis, dalam hal ini PKI, melakukan konsolidasi dan memanfaatkan momentum di sekitar PGRS/PARAKU.

Kebijakan Pemerintah Orde Lama terhadap PGRS/PARAKU didasarkan pada politik luar negeri yang anti kolonialisme dan imperialisme. Pemerintah Soekarno menganggap PGRS/PARAKU sebagai bentuk perjuangan terhadap imperialisme Inggris dengan membonceng Federasi Malaysia. Dengan keluarnya Dwikora, maka gerakan PGRS/PARAKU menjadi legal bagi Pemerintah RI. Bahkan Pemerintah RI mengerahkan sukarelawan dalam rangka membantu perjuangan PGRS/PARAKU untuk menggagalkan Federasi Malaysia. Ternyata kebijakan Pemerintah Soekarno saat itu menguntungkan salah satu kekuatan politik di Indonesia, yaitu PKI. Partai pimpinan D.N.Aidit tersebut mampu memanfaatkan momentum konfrontasi Malaysia untuk melebarkan pengaruhnya, termasuk juga dalam organisasi PGRS/PARAKU.

### **B. Pembantaian dan Pengungsian Etnis Tionghoa**

Setelah dilakukan normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang ditandai dengan Jakarta *Accord*, maka dukungan Pemerintah Indonesia terhadap PGRS/PARAKU berakhir. Menanggapi isi dari Jakarta *Accord*, maka KOLAGA mengeluarkan instruksi dengan radiogram tanggal 10 Agustus 1966 No.TSR-26/1966 kepada semua Komando Bawahan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan operasi. Langkah selanjutnya yang diambil oleh Kopur

IV/Mandau, adalah mengadakan seruan agar sukarelawan-sularelawan yang tergabung dalam PGRS/PARAKU supaya segera mengadakan konsolidasi di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Ternyata yang mengikuti seruan tersebut hanya 99 orang, sedangkan sejumlah 739 orang membangkang.<sup>262</sup>

Akibat dari pembangkangan 739 gerilyawan PGRS/PARAKU tersebut, maka Kopur IV/Mandau melancarkan gerakan Operasi Tertib I dan Operasi Tertib II ke daerah-daerah seperti: Gunung Sentawi/Sempatung *complex*, Sungkung *complex*, Melantjau *complex*, dan Benua Martinus *complex*. Gerakan Operasi Tertib I dilaksanakan tanggal 1 Oktober 1966 sampai Desember 1966. Sedangkan Operasi Tertib II dilaksanakan sejak Januari 1967 sampai dengan Maret 1967. Pelaksana penuh Operasi Tertib I dan Tertib II adalah Kopur IV/Mandau dan langsung berada di bawah Kolaga. Sebagai hasil dari Operasi Tertib tersebut, Kopur IV/Mandau dapat menghancurkan lima puluh persen (50%) kekuatan dan senjata gerilyawan PGRS/PARAKU.<sup>263</sup>

Setelah terjadi pengalihan kekuasaan dari Kopur IV/Mandau kepada Kodam XII/Tanjungpura, maka Kodam XII/Tanjungpura melancarkan rentetan gerakan operasi yang dikenal dengan Operasi Sapu Bersih. Dalam perjalanannya Operasi Sapu Bersih dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu: Operasi Sapu Bersih I (April 1967-Juli 1967), Operasi Sapu Bersih II (Agustus 1967-Februari 1969) dan Operasi Sapu Bersih III (Maret 1969-Desember 1969).<sup>264</sup>

Operasi-operasi militer yang dilakukan Tentara RI ternyata belum mampu melumpuhkan semua kekuatan PGRS/PARAKU. Dalam perjalanan selanjutnya

---

<sup>262</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 235.

<sup>263</sup> *Ibid*, hlm. 243.

<sup>264</sup> *Ibid*, hlm. 244.

pihak militer menggandeng suku Dayak untuk melumpuhkan kekuatan dari PGRS/ PARAKU. Gerakan pembasmian terhadap PGRS/PARAKU dikenal dengan sebutan “Demonstrasi Suku Dayak”. Gerakan ini kemudian menyebar luas menjadi luapan emosi etnis Dayak, hingga upacara “mangkok merah”<sup>265</sup> pun diadakan. Gerakan yang dilakukan suku Dayak ini kemudian menjadi sentimen rasial dengan mengidentikkan etnis Tionghoa sebagai anggota PGRS/PARAKU. Masyarakat dari etnis Tionghoa tanpa pandang “bulu” menjadi korban dari gerakan demonstrasi.

Gerakan ini mengakibatkan pengungsian besar-besaran yang dilakukan oleh etnis Tionghoa menuju ke Kota Pontianak. Pengungsian ini tidak saja menimbulkan masalah di kota-kota penampungan dan derita psikis yang dialami keluarga korban pembantaian oleh etnis Dayak tersebut. Namun juga, sirkulasi perdagangan di daerah pedalaman Kalimantan Barat menjadi lumpuh. Memang akibatnya juga dirasakan oleh gerilyawan PGRS/PARAKU yang menjadi terisolasi dari suplai logistik.

Dilihat dari sudut ekonomi dan sosial akibat yang dapat dirasakan adalah sebagai berikut: (1) Putusnya aliran perdagangan yang semula dilakukan oleh pedagang-pedagang Tionghoa, maka muncul problema bagaimana mengalirkan lalu lintas perdagangan dari dan ke pedalaman; (2) Kebun dan ladang yang ditinggalkan pemiliknya menjadi terlantar yang berakibat turunnya produksi

---

<sup>265</sup> Upacara adat yang merupakan ajakan (solidaritas) perang, berupa sesajen yang diletakkan di mangkok dan diedarkan dari kampung ke kampung. Bagi kampung/orang yang menerimanya wajib mengirimkan perwakilannya untuk berperang. Bagi masyarakat umum Mangkok Merah juga dapat dijadikan ukuran bahwa konflik/perang yang terjadi merupakan perang besar, yang membutuhkan solidaritas lintas sub-suku Dayak.

beberapa jenis komoditi Kalimantan Barat; (3) Arus pengungsi yang mengalir ke kota-kota merupakan beban yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat.<sup>266</sup>

### C. Permasalahan Daerah Operasi Militer Selama Masa Konfrontasi

Kebijakan terhadap PGRS/PARAKU selama Pemerintahan Soekarno maupun Pemerintahan Soeharto tetap menempatkan daerah perbatasan di Kalimantan Barat sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Masyarakat di daerah perbatasan yang sebagian besar dihuni oleh etnis Dayak diarahkan untuk menjadi sukarelawan. Walaupun tidak semua masyarakat perbatasan diberdayakan oleh militer, namun pengaruhnya tetap dirasakan oleh masyarakat setempat. Masyarakat yang ditinggalkan oleh kepala keluarga ataupun kerabat laki-laki akan lebih sulit mengolah tanah dan kebun mereka.

Permasalahan Kalimantan Barat saat menjadi Daerah Operasi Militer pernah dimuat di majalah Kalimantan Review No. 49 Desember 1999. Beberapa reportase langsung dilakukan wartawan Kalimantan Review. Salah satu pengalaman menyedihkan dialami Dewa, saat konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia:

“Rumah betang delapan pintu miliknya hancur berantakan dihantam hujan peluru tentara Gurka dari Inggris. Rumah itu dijadikan tentara Indonesia markas perlindungan. Istrinya tergeletak, kepingnya bolong dan tangan kirinya buntung diterjang peluru. Di pintu rumah betang lainnya, dua ibu dan seorang anak terkapar tewas. Sejak pembantaian itu, kami tidak tinggal di rumah betang lagi.”<sup>267</sup>

Selama masa penumpasan terhadap PGRS/PARAKU masyarakat daerah perbatasan juga mendapat pengaruhnya. Masyarakat perbatasan yang sebenarnya

---

<sup>266</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm.280..

<sup>267</sup> .....“Menguak Tabir PGRS/PARAKU”, *Kalimantan Review*, No. 49/September, Pontianak, Institute Dayakologi Research and Development, 1999, hlm.8.

tidak mengetahui urusan politik diharuskan memilih berpihak kepada militer Indonesia atau kepada PGRS/PARAKU. Jika masyarakat perbatasan tidak membantu militer dalam menumpas PGRS/PARAKU maka akan dianggap mendukung PGRS/PARAKU. Namun, bila masyarakat perbatasan membantu militer RI, maka akan dianggap musuh oleh PGRS/PARAKU. Situasi dan kondisi demikian sangat dilematik bagi masyarakat perbatasan yang sebagian tidak paham dengan politik, sehingga kehidupan mereka sangat tertekan dan menderita.

Pengalaman pahit pernah dialami Baleng, warga kampung Batu Hitam. Saat operasi penumpasan PGRS/PARAKU dia bekerja sebagai penunjuk jalan tentara RI mencari anggota PGRS/PARAKU. Namun, Baleng tidak berhasil menemukan persembunyian PGRS/PARAKU, diapun diikat dan digebuki. Bahkan Baleng dihukum dengan hukuman *tuil* yaitu sebatang kayu yang dimasukkan di antara kedua pangkal paha kemudian kedua ujung kayu diinjak. Tidak tahan dengan siksaan tersebut, Baleng dan ketiga temannya Gorus, Kalongkong dan Salang kemudian mengaku sebagai anggota PGRS. Dengan muka babak belur mereka dibawa ke Sakura dan hingga sekarang tidak pernah kembali ke kampung halamannya.<sup>268</sup>

Stepanus Bukuk, 67 tahun (pada tahun 1999), pernah ditodong pistol ketika mengantar tentara dengan perahu. Saat itu dia dikira mata-mata PGRS/PARAKU. Di kampung Aruk, Pasukan RPKAD menyiksa Nyarok, Satong, Asoi, Acun dengan strum dan menghabisi Nganun. Robertus Tatang, 62 tahun (pada tahun

---

<sup>268</sup> *Idem.*

1999) hampir mati di tangan Pasukan Kujang. "Daripada mati disiksa, lebih baik mati tenggelam", kisahnya. Dia selamat karena menyelam ke Sungai Batanan.<sup>269</sup>

Permasalahan DOM di Kalimantan Barat saat penumpasan PGRS/PARAKU diutarakan Hendrik Putera, mantan Danton Pasukan Sukarelawan Komando Nasional (KONAS), "Pasukan datang dengan penuh curiga, padahal warga tidak tahu apa itu PKI dan PGRS." Hal serupa dituturkan Ciprianus Gidot, 74 tahun (pada tahun 1999):

"Warga tak boleh ke rumah warga lain, tak boleh berkumpul lebih dari tiga orang, sejak pukul 18.00 tak boleh keluar rumah. Rakyat yang dicurigai ditangkap, dipukuli, direndam, disetrum dan disiksa oleh pasukan penyapu PGRS... Waktu itu kami sangat takut. Makan tak kenyang, tidur tak nyenyak, mandi tak basah... Malam hari pasukan RI berkeliaran di kolong dan sekitar rumah penduduk mengintip apa yang dilakukan dan dibicarakan warga."<sup>270</sup>

Demikian pula berdasarkan penuturan Durani, 79 tahun, kepada wartawan Borneo Tribune Muhlis Suhaeri

"Setiap desa diwajibkan mengirim warganya. Bahkan setiap rumah harus ada satu orang yang menjadi wakil, untuk membantu tugas tentara. Kalau orang tua di rumah tak bisa berangkat, anaknya mewakili. Tiap kepala kampung wajib mengirim warganya... Mereka bertugas sebagai pemandu dan penunjuk jalan. Juga wajib menjadi pembawa barang. Sekali bawa sekitar 30 kilogram. Tak hanya itu, mereka juga harus ikut menumpas PGRS/PARAKU. Masyarakat membawa tombak dan mandau."<sup>271</sup>

Dengan semakin melemahnya kekuatan PGRS/PARAKU pasca gerakan Suku Dayak 1967 tugas-tugas yang diemban masyarakat sipil semakin berkurang. Masyarakat pedalaman kembali ke rutinitas awalnya mengerjakan kebun dan ladang. Saat-saat di mana Kalimantan Barat menjadi Daerah Operasi Militer yang

---

<sup>269</sup> *Ibid*, hlm. 8-9.

<sup>270</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>271</sup> Muhlis Suhaeri, "The Lost Generation (6)", *Borneo Tribune*, Jumat, 15 Februari 2008, tulisan dikutip dari blog pribadi penulis dengan alamat <http://muhlissuhaeri.blogspot.com>

ikut menguras tenaga dan jiwa masyarakat pedalaman sangat ingin dilupakan masyarakat pedalaman. Seperti yang dikatakan L.H. Kadir saat diwawancarai oleh penulis "Dengan tidak dijadikan Daerah Operasi Militer rakyat menjadi sangat senang. Dampak dari DOM itu memang macam-macam. Kita harus bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari tapi juga harus bantu tentara. Kesan setelah tidak DOM masyarakat sudah sangat senang."<sup>272</sup>

Kesimpulan dari bab IV ini adalah PGRS/PARAKU berhasil bertahan dan terus melakukan perlawanan terhadap Federasi Malaysia karena dukungan yang diberikan Pemerintah RI, bahkan PGRS/PARAKU berhasil mendapat suntikan tenaga dengan bekerja sama dengan PKI. Sedangkan pada masa Pemerintahan Orde Baru PGRS/PARAKU tidak lagi didukung, bahkan ditentang keberadaannya, sehingga diselenggarakan berbagai operasi militer untuk menumpasnya. Dengan demikian hipotesis yang ketiga yaitu: "a. Kalau kebijakan Pemerintah Orde Lama mendukung PGRS/PARAKU, maka PGRS/PARAKU akan bertahan dalam perjuangannya menentang Federasi Malaysia; b. Kalau kebijakan Pemerintah Orde Baru menentang PGRS/PARAKU, maka PGRS/PARAKU akan ditumpas karena mengancam integritas Pemerintah Republik Indonesia" dinyatakan terbukti..

---

<sup>272</sup> Wawancara langsung dengan penulis pada hari Minggu, 20 Juni 2008 sekitar pukul 17.00 Wib lokasi di kediaman L.H. Kadir, jalan M.T. Haryono No. 40 Pontianak, Kalimantan Barat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian yang berjudul Kebijakan Pemerintah RI Terhadap PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat 1963-1967 memaparkan tiga permasalahan pokok yaitu: 1. Latar belakang terbentuknya PGRS/PARAKU; 2. Sikap dan kebijakan Pemerintah RI terhadap PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat 1963-1967; 3. Pengaruh kebijakan Pemerintah RI terhadap PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat 1963-1967.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut ditarik hipotesis yaitu: 1. Kalau pembentukan Federasi Malaysia tidak memperhatikan aspirasi masyarakat Kalimantan Utara dan negara – negara tetangga (Indonesia dan Filipina), maka pihak yang menentang akan membentuk dan mendukung PGRS/PARAKU. 2. Kalau Pemerintah Orde Lama menentang pembentukan Federasi Malaysia, maka Pemerintah Orde Lama akan mendukung PGRS/PARAKU. Kalau Pemerintah Orde Baru menerima berdirinya Federasi Malaysia, maka Pemerintahan Orde Baru akan menentang PGRS/PARAKU; 3. Kalau kebijakan pemerintahan Orde Lama mendukung PGRS/PARAKU, maka PGRS/PARAKU akan bertahan dalam perjuangannya menentang Federasi Malaysia. Kalau kebijakan pemerintahan Orde Baru menentang PGRS/PARAKU, maka PGRS/PARAKU akan ditumpas karena mengancam integritas Pemerintahan Republik Indonesia.

Kesimpulan yang didapat penulis melalui penelitian adalah sebagai berikut:

1. Terbentuknya Pasukan Gerilya Rakyat Serawak/Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS/PARAKU) merupakan kristalisasi dari gerakan kelompok-kelompok yang menentang pembentukan Federasi Malaysia. Pihak yang secara langsung dirugikan atas pembentukan Federasi Malaysia melakukan perlawanan, yang ditandai dengan terbentuknya Negara Nasional Kalimantan Utara (NNKU) dan kemudian PGRS/PARAKU. Sedangkan di luar negeri, Indonesia dan Filipina sebagai penentang utama Federasi Malaysia kemudian mendukung gerakan anti Malaysia, yang berarti mendukung NNKU dan PGRS/PARAKU.

2. Sikap Pemerintah RI pada Orde Lama yang menentang pembentukan Federasi Malaysia menyebabkan keluarnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung PGRS/PARAKU. Kebijakan Pemerintah Orde Lama dalam rangka mendukung PGRS/PARAKU dilaksanakan oleh Badan Pusat Intelijen pimpinan Dr. Soebandrio. Selain itu juga Pemerintah Soekarno mengorganisir sukarelawan di seluruh Indonesia untuk dikerahkan dalam "Ganyang Malaysia".

Sikap Pemerintah Orde Baru sangat bertolak-belakang dengan Orde Lama. Pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani Persetujuan Untuk Normalisasi Hubungan Antara Republik Indonesia dan Malaysia, yang dikenal dengan Jakarta *Accord*. Dengan demikian konflik antara Indonesia-Malaysia berakhir. Namun, PGRS/PARAKU tidak mengakui persetujuan tersebut dan tetap

menolak pembentukan Federasi Malaysia. Akibatnya Pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan untuk menumpas gerakan PGRS/PARAKU.

3. PGRS/PARAKU berhasil bertahan dan terus melakukan perlawanan terhadap Federasi Malaysia karena dukungan yang diberikan Pemerintah Indonesia, bahkan PGRS/PARAKU berhasil mendapat suntikan tenaga dengan bekerja sama dengan PKI dan terbantu dengan pengerahan para sukarelawan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pada masa Orde Baru, gerakan PGRS/PARAKU tidak diakui di Malaysia dan di Indonesia. Operasi-operasi penumpasan yang dilakukan Tentara Indonesia, seperti Operasi Sapu Bersih dan Operasi Tertib berhasil melumpuhkan sebagian kekuatan PGRS/PARAKU. Puncaknya ketika terjadi gerakan Suku Dayak, yang pada awalnya ditujukan untuk menumpas PGRS/PARAKU, namun meluas menjadi kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa.

Dari kesimpulan diatas maka dinyatakan dengan ini hipotesis terbukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ankersmit, F. R. 1987.  
*Refleksi Tentang Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Bambang Purwanto 2006.  
*Gagalnya Historiografi Indonesia Sentris?!*. Yogyakarta: Ombak.
- Bambang Purwanto, & Asvi, W. A. 2005.  
*Menggugat Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Baskara T. Wardaya. 2007.  
*Cold War Shadow: United States Policy Toward Indonesia 1953-1963*,  
Yogyakarta: Galang Press.
- Basri. 2006.  
*Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Restu Agung.
- Departemen Penerangan RI. 1964.  
*Gelora Konfrontasi Menggajang Malaysia*. Jakarta: Departemen  
Penerangan.
- Dudung Abdurahman. 2007.  
*Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media..
- Fadilah Putra dkk. 2006.  
*Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan  
Gerakan Sosial di Indonesia*. Malang: Averroes.
- Gollick J.M. 1967.  
*Malaysia and its Neighbours*. New York: Barnes & Noble Inc.
- Helius Sjamsudin. 2007.  
*Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Hidayat Mukmin. 1991.  
*TNI Dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi  
Indonesia-Malaysia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- SEMDAM XII/Tanjungpura. 1970.  
*Tanjungpura Berjuang*, Pontinak: Kodam XII Tanjungpura.
- Kuntowijoyo. 2001.  
*Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Benteng Budaya.

- La Ode, M.D. 1997  
*Tiga Muka Etnis Cina–Indonesia Fenomena di Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Biograf Publishing.
- Mabes ABRI. 1995.  
*Bahaya Laten Komunisme di Indonesia*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.
- Machrus Effendy. 1995.  
*Penghancuran PGRS-PARAKU dan PKI di Kalimantan Barat*. Jakarta: P.T. Dian Kemilau.
- Miriam Budiardjo. 2005.  
*Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Moedjanto, G. 1988.  
*Indonesia Abad ke-20*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ongkili, James P. 1985.  
*Nation-Building in Malaysia 1946-1974*. Singapura: Oxford University Press.
- Panggabean, M. 1993.  
*Berjuang dan Mengabdikan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pruitt, Dean, G. & Jeffrey, Z. Rubin. 2004.  
*Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raho, Bernard. 2007.  
*Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ricklef, M.C. 2005.  
*Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Situmorang, Abdul Wahib. 2007.  
*Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemadi. 1974.  
*Peranan Kalimantan Barat Dalam Menghadapi Subversi Komunis Asia Tenggara*. Pontianak: Yayasan Tanjungpura.
- Sumadi Suryabrata. 1983.  
*Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.

**MAJALAH**

Pembayun Sulistyorini. 2004.

“Pemberontakan PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat”. *Jurnal Sejarah dan Budaya Kalimantan*, edisi 03/2004. Pontianak: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Halaman 39.

.....1999.

“Perkongasian Tionghoa dan Sarang PGRS-PARAKU”. *Kalimantan Review*. No. 47/Juli. Pontianak: Institute Dayakologi Research and Development. Halaman 28.

.....1999

“Menguak Tabir PGRS/PARAKU”. *Kalimantan Review*. No.49/September. Pontianak: Institute Dayakologi Research and Development. Halaman 8.

**SURAT KABAR**

Muhlis Suhaeri, 2008

“The Lost Generation (1)”. *Borneo Tribune*. Minggu. 10 Februari 2008.

\_\_\_\_\_, 2008

“The Lost Generation (2)”. *Borneo Tribune*. Senin. 11 Februari 2008.

\_\_\_\_\_, 2008

“The Lost Generation (3)”. *Borneo Tribune*. Selasa. 12 Februari 2008.

\_\_\_\_\_, 2008

“The Lost Generation (5)”. *Borneo Tribune*. Kamis. 14 Februari 2008.

\_\_\_\_\_, 2008

“The Lost Generation (6)”. *Borneo Tribune*. Jumat. 15 Februari 2008.

\_\_\_\_\_, 2008

“The Lost Generation (10)”. *Borneo Tribune*. Selasa. 19 Februari 2008.

**INTERNET**

Muhlis Suhaeri. “The Lost Generation”. <http://muhlissuhaeri.blogspot.com>

DISPEN TNI-Angkatan Udara. “Peran Pangkalan Udara Supadio Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia”. <http://www.tni-au.mil.au>

## **DOKUMEN**

Amanat PJM Presiden Soekarno Pada Appel Besar Sukarelawan Berhubung Dengan Konfrontasi Dengan Malaysia Di Depan Istana Merdeka, Djakarta, 13 April 1964.

Amanat Komando Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Pada Appel Besar Sukarelawan Pengganjangan Malaysia Di Depan Istana Merdeka, Djakarta, 3 Mei 1964.

Pengumuman Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No:1 Tahun 1964 tanggal 18 Maret 1964

Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No: 03/ KOTI/ Tahun 1964 tanggal 21 Maret 1964.

Instruksi Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No: 04/ KOTI/ Tahun 1964 tanggal 25 Maret 1964.

Instruksi Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No: 07/ KOTI/ Tahun 1964.

## **WAWANCARA**

Wawancara langsung dengan L.H. Kadir, pada hari Minggu, 20 Juni 2008 pukul 17.00 Wib lokasi di kediaman L.H. Kadir, jalan M.T. Haryono No. 40 Pontianak, Kalimantan Barat.

**PERINTAH PRESIDEN/ PANGLIMA TERTINGGI/  
PEMIMPIN BESAR REVOLUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**Penghentian Tembak Menembak antara Inggris/ apa yang dinamakan  
“Malaysia” dengan Indonesia**

- I. Berdasarkan pembitjaraan jang telah saja adakan dengan beberapa Ngarawan Asing, dapat diambil kesimpulan, bahwa persoalan apa yang dinamakan “Malaysia”, oleh semua fihka dapat diselesaikan melalui djalan musjawarah tanpa prasyarat atas dasar Persetudjuan Manila;
- II. Diperintahkan kepada segenap sukarelawan Warga-Negara Republik Indonesia jang sekarang berdjuang di daerah Kalimantan Utara membantu perdjungan kemerdekaan Kalimantan Utara dan anggota-anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia yang bertugas di daerah perbatasan dengan Kalimantan Utara, untuk:
  1. Menghentikan tembak menembak mulai tanggal 25 Djanuari 1964 Djam 00.01 Waktu Indonesia Bagian Barat;
  2. Tetap waspada dan tetap mengadakan pengamanan;
  3. Menjiapkan diri untuk menerima perintah lebih landjut guna tugas-tugas baru.
- III. Perintah selesai.

Djakarta, 23 Djanuari 1964

Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi  
Republik Indonesia

SOEKARNO

Sumber:

Dep. Pen., 1964, *Gelora Konfrontasi Mengganjang Malaysia*, Jakarta, halaman 70.

**PERSETUJUAN UNTUK NORMALISASI HUBUNGAN ANTARA  
REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA**

Menyadari keperluan adanya hubungan-hubungan yang erat dan bersahabat antara Indonesia dan Malaysia dan untuk menciptakan suatu suasana yang baik bagi kerjasama antara kedua negara, dengan dijiwai Persetujuan Manila serta rasa persaudaraan antara kedua bangsa yang mempunyai ikatan sejarah dan kebudayaan sejak jaman purbakala, maka memutuskan untuk mengadakan suatu perjanjian guna menormalisasi hubungan-hubungan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Malaysia dan untuk maksud ini menunjuk sebagai wakil-wakil berkuasa penuh mereka:

Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Yang Mulia Adam Malik, Menteri Utama Bidang Politik/ Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

Untuk Pemerintah Malaysia: Yang Mulia Tun Abdul Razak bin Dato Husein, Wakil Perdana Menteri Malaysia;  
yang setelah memeriksa surat kepercayaan masing-masing dan mendapatkannya benar dan dalam bentuk semestinya, menyetujui sebagai berikut:

**Pasal 1**

Pemerintah Malaysia, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan antara kedua negara yang timbul karena dibentuknya Malaysia, menyetujui untuk memberikan kesempatan kepada Rakyat Sabah dan Serawak, yang langsung berkepentingan, untuk menegaskan lagi, secepat mungkin, secara bebas dan demokratis melalui pemilihan umum, keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia.

**Pasal 2**

Pemerintah Republik Indonesia, dari keinginannya yang sungguh-sungguh untuk mengadakan kerja sama dan persahabatan yang erat antara Indonesia dan Malaysia, menyetujui dan Pemerintah Malaysia menerima baik, bahwa hubungan diplomatik antara kedua negara segera diadakan, dan bahwa mereka akan mengadakan pertukaran perwakilan diplomatik secepat mungkin.

**Pasal 3**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia menyetujui, bahwa, berhubung dengan yang tertera di atas, tindakan-tindakan bermusuhan antara kedua negara segera dihentikan.

#### **Pasal 4**

Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal penanda tangannannya,

Untuk menyaksikannya, maka yang bertanda tangan di bawah ini yang dikuasakan oleh pemerintahannya masing-masing telah menanda tangani perjanjian ini.

Dibuat di Jakarta dalam rangkap dua, tanggal sebelas Agustus 1966.

**Untuk Pemerintah Republik Indonesia**  
ttd.

**Adam Malik**

**Untuk Pemerintah Persekutuan Malaysia**  
ttd.

**Tun Abdul Razak Bin Dato Hussein**

Sumber:

Kodam XII Tanjungpura, 1970, *Tandjungpura Berdjuang*, Pontianak, halaman

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KOMANDO OPERASI TERTINGGI

S A L I N A N 133

## P E N G U M U M A N

### KEPALA STAF KOMANDO OPERASI TERTINGGI

NO: 1 TAHUN 1964.

Untuk melaksanakan Komando Paduka Jang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 16 Maret 1964 di Istana Negara Djakarta mengenai pendaftaran/pengerahan Sukarelawan/Sukarelawati dalam rangka menghadapi konfrontasi dengan apa jang dinamakan " Malaysia ", Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi mengumumkan sebagai berikut :

- I. Pertanggungjawaban dari pendaftaran/pengerahan Sukarelawan/Sukarelawati dalam rangka konfrontasi dengan apa jang dinamakan " Malaysia " ada pada Komando Operasi Tertinggi ;
- II. Pelaksanaan pendaftaran disalurkan melalui Front Nasional dengan ketentuan-ketentuan seperti dibawah ini :
  - a. Mereka jang ingin mendjadi Sukarelawan/Sukarelawati supaja mendaftarkan diri kepada organisasi/djawatan/instansinja masing-masing ;
  - b. Bagi mereka jang tidak tergabung pada salah satu organisasi/djawatan/instansi lainnja supaja mendaftarkan kepada Rukun Tetangga/Rukun Kampung ;
  - c. Organisasi/djawatan/instansi/Rukun Tetangga/Rukun Kampung jang telah menerima pendaftaran dari anggauta-anggautanja meneruskan daftar tersebut kepada Front Nasional Daerah ;
  - d. Front Nasional Daerah meneruskan daftar tersebut kepada Front Nasional Pusat dan Gubernur/K.D.H. sebagai Kepala-Markas Daerah Pertahanan Sipil ;
  - e. Front Nasional Pusat menjerahkan daftar Sukarelawan/Sukarelawati tersebut kepada Staf Komando Operasi Tertinggi dalam hal ini Ketua Gabungan III ;
  - f. Hal-hal jang harus dikemukakan pada waktu pendaftaran diri ialah :
    1. n a m a ,
    2. u m u r ,
    3. kelamin ,
    4. alamat ,
    5. djawatan/pekerdjaan ,
    6. keachlian ,

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 2 -

133.

- g. Pendaftaran sebagai Sukarelawan/Sukarelawati hanya dilakukan pada satu tempat (organisasi/djawatan/instansi dan lain-lain) ;
- h. Jang dimaksud dengan organisasi adalah organisasi-organisasi politik dan karyawan, sedangkan jang dimaksud instansi adalah instansi-instansi pemerintah dan swasta termasuk perusahaan-perusahaan ;
- i. Penerusan/laporan dari daftar tersebut dari Daerah ke Pusat supaja dilakukan satu minggu satu kali ;

III. Kebutuhan akan alat-alat untuk pendaftaran diserahkan kepada organisasi/djawatan/instansi/Rukun Tetangga/Rukun Kampung masing-masing ;

IV. Tjatur Tunggal Daerah dan Front Nasional Daerah (Pantja Tunggal) supaja membantu pelaksanaan pendaftaran tersebut ;

V. Kebidjaksanaan serta ketentuan-ketentuan selandjutnja mengenai pengerahan dan penggunaan Sukarelawan/Sukarelawati jang telah mendaftarkan diri akan diatur tersendiri oleh Komando Operasi Tertinggi ;

VI. S e l e s a i . -

Dikeluarkan di : Djakarta

Pada tanggal : 18 Maret 1964.

-----  
KOMANDO OPERASI TERTINGGI

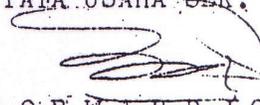
KEPALA STAF,

ttd.

A. Y A N I

LETNAN DJENDERAL TNI

Disalin kedua kalinya oleh :  
KARO TATA USAHA SEK. MPPR.,

  
S O E W A R D J O

KAPTEN INF NRP. 128390.

INSTRUKSI PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN  
BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/KOMANDO  
OPERASI TERTINGGI

NO: 03/KOTI/TAHUN--1964.-

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA  
REPUBLIK INDONESIA/KOMANDO OPERASI TERTINGGI,

Menimbang : 1. bahwa agar supaya pelaksanaan komando Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi mengenai pengerahan Sukarelawan/Sukarelawati dalam konfrontasi dengan apa yang dinamakan "Malaysia" dan ketahanan Revolusi Indonesia mendapatkan ke-dajgunaan yang sebesar-besarnya, perlu menggunakan badan-badan Pemerintah yang telah ada, bersama-sama dengan seluruh rakyat dibawah pimpinan langsung Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi;

2. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, perlu mengeluarkan instruksi tentang kebidjaksanaan umum serta pelaksanaan pengerahan Sukarelawan/Sukarelawati ;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1962;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 226 Tahun 1963  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.142 Tahun 1963 berhubung dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 148 Tahun 1963 ;  
4. Komando Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 16 Maret 1964 mengenai pembentukan gerakan Sukarelawan/Sukarelawati;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Instruksi tentang kebidjaksanaan umum serta pelaksanaan pengerahan Sukarelawan/Sukarelawati, sebagai berikut :

T. T U D J U A N :

Tudjuan pembentukan gerakan Sukarelawan/Sukarelawati sesuai dengan komando Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi adalah untuk mengerahkan dan mengikut sertakan seluruh kekuatan Nasional sesuai dengan djiwa dan napa Revolusi guna mensukseskan konfrontasi terhadap apa yang dinamakan "Malaysia" dan memupuk serta memperkuat ketahanan revolusi dalam rangka usaha mentjapai tudjuan Revolusi.

II. KEBIDJAKSANAAN.....

- 2 -

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

136

### II. KEBIDJAKSANAAN UMUM :

#### 1. Pengerahan Sukarelawan/Sukarelawati :

Pengerahan Sukarelawan/Sukarelawati ditunjukkan untuk :

- a. tugas-tugas dalam rangka konfrontasi dengan apa jang dinamakan "Malaysia" baik jang bersifat militer maupun jang bersifat non militer;
- b. tugas-tugas dalam rangka memperkuat dan memupuk ketahanan Revolusi diberbagai bidang.

#### 2. Kebidjaksanaan, Pimpinan, dan tanggung djawab ditingkat Pusat:

- a. Penentuan kebidjaksanaan, pimpinan dan tanggung djawab tertinggi mengenai pengerahan Sukarelawan/Sukarelawati berada pada Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi.
- b. Pembinaan dan pengurusan sehari-hari dari pelaksanaan pengerahan Sukarelawan/Sukarelawati dilakukan oleh Staf Komando Operasi Tertinggi Ketua Gabungan - 3.

#### 3. Kebidjaksanaan, pimpinan dan pertanggung djawab di Daerah:

- a. Kebidjaksanaan, pimpinan dan pertanggung djawab di Daerah dalam melaksanakan kebidjaksanaan dan perintah - perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi berada pada Gubernur/Kepala Daerah.-
- b. Gubernur/Kepala Daerah dalam menetapkan kebidjaksanaan dan dalam melakukan pimpinan di Daerah untuk melaksanakan kebidjaksanaan dan Perintah-perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi mengadakan musjawarah dengan dan dibantu oleh Pantja Tunggal.
- c. Apabila pada suatu daerah oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi ditetapkan pedjabat lain daripada Gubernur/Kepala Daerah sebagai penguasa di Daerah, maka kebidjaksanaan, pimpinan dan pertanggung djawab di Daerah tersebut seperti jang dimaksud dalam huruf a dan b berada pada penguasa jang bersangkutan.

### III. PELAKSANAAN :

#### 1. Matjam-matjam kegiatan :

Pengerahan Sukarelawan/Sukarelawati dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan :

- a. pendaftaran,
- b. pensiap-siagaan jang meliputi klasifikasi, pemanggilan/seleksi, latihan.
- c. penggunaan/penugasan.

#### 2. Pendaftaran :

Dilakukan sesuai dengan Pengumuman Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No. 1 tahun 1964.

#### 3. Klasifikasi :

Agar supaja dalam pensiap-siagaan Sukarelawan/Sukarelawati dapat diperoleh kedaja-gunaan jang sebesar-besarnja, perlu ditentukan klasifikasi menurut kebutuhan dalam :

##### a. masalah penugasannya :

1. tuga .....

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 3 -

137

1. tugas militer.
2. tugas dalam rangka pertahanan sipil.
3. tugas pembangunan dalam rangka memupuk dan memperkuat ketahanan Revolusi.

b. asal/lingkungan bekerdja semula :

1. anggota Angkatan Bersendjata;
2. pegawai Negeri;
3. pegawai/buruh swasta;
4. peladjar dan manasiswa;
5. mereka jang tidak termasuk dalam salah satu golongan diatas.

c. lingkungan ke "achlian"/pengalaman:

1. anggota Angkatan Bersendjata (achli bertempur);
2. sardjana;
3. karyawan seperti tukang-tukang diberbagai bidang;
4. mereka jang tidak mempunjai ke "achlian"/pengalaman tertentu.

4. Pelaksanaan pensiap-siagaan :

- a. Pelaksanaan kegiatan pensiap-siagaan (klasifikasi pemanjangan dan seleksi - latihan dan sebagainya dilakukan di Daerah, dibawah pimpinan Gubernur/Kepala Daerah/Penguasa jang bersangkutan berdasarkan ketentuan-ketentuan Staf Komando Operasi Tertinggi Ketua Gabungan 3.
- b. Penjelenggaraan administrasi dari kegiatan pensiap-siagaan dilakukan oleh Kepala Daerah Pertahanan Sipil dengan bantuan instansi-instansi didaerah menurut kebutuhan serta mengindahkan petunjuk-petunjuk teknis dari Kepala Pusat Pertahanan Sipil, Panglima-Panglima Angkatan atau Instansi-instansi lainnja sesuai dengan masalah penugasannja.-

5. Penggunaan Sukarelawan/Sukarelawati :

- a. Penggunaan Sukarelawan/Sukarelawati dilakukan menurut kebutuhan jang ditentukan oleh Staf Komando Operasi Tertinggi Ketua Gabungan 3 setelah mengadakan koordinasi dengan Ketua-ketua Gabungan serta instansi-instansi ditingkat Pusat lainnja jang bersangkutan, berdasarkan kebidjaksanaan/perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik-Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi.
- b. Gubernur/Kepala Daerah/Penguasa jang bersangkutan setelah mengadakan musjawarah dengan Pantja Tunggal dapat menggunakan Sukarelawan/Sukarelawati untuk melakukan tugas-tugas tertentu didaerahnja, setelah memperoleh persetujuan dari Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi.

IV. KEDUDUKAN HUKUM SUKARELAWAN/SUKARELAWATI :

Kedudukan hukum Sukarelawan/Sukarelawati akan diatur tersendiri.

V. PEMBIAJAAN :

1. Pembiajaan daripada pensiap-siagaan dan penggunaan Sukarelawan/Sukarelawati untuk tugas-tugas combat dalam rangka konfrontasi dengan apa jang dinamakan "Malaysia" dibebankan kepada Komando Operasi Tertinggi.
2. Pembiajaan daripada pensiap-siagaan dan penggunaan Sukarelawan/Sukarelawati untuk tugas-tugas lainnja pada prinsipnja diserahkan kepada Swadaja Daerah masing-masing.-

VI. P E N U T U P .

.....

VI. P E N U T U P :

1. Hal-hal lain jang belum ditentukan dalam instruksi ini tan diatur didalam instruksi/petundjuk tersendiri.
2. Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkannja.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 21 Maret 1966

=====

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BENDJI  
REPUBLIK INDONESIA/KOMANDO OPERASI TERTINGGI,

t.t.d.

S U K A R N O.

Instruksi ini ditudjukan kepada :

1. Presidium Kabinet Kerdja;
2. Semua Menteri Koordinator.
3. Semua Menteri;
4. Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi;
5. Semua Gubernur/Kepala Daerah;
6. Semua Kepala Kepolisian Komisariat;
7. Semua Panglima Daerah Militer/Panglima Daerah Maritim/  
Panglima Komando Regional Udara;
8. Semua Djaksa Tinggi/Kepala Kedjaksanaan Propinsi;
9. Semua Ketua Front Nasional Daerah;
10. Sekretaris Umum Dewan Pertahanan Nasional;
11. Sekretaris Umum Musjawarah Pembantu Pimppnan Revolusi;
12. Kepala Pusat Pertahanan Sipil.

Disalin sesuai dengan aslinja

KOMANDO OPERASI TERTINGGI

ASS. SEKRETARIS,

Tjap/ttd.

BAMBANG SUTRISNO

KAPTEN. INF. NRP. 204066.

Disalin jang kedua kalinja

KARO T.U. SEK. M.P.T.R.

S O E W A R D J O

KAPTEN INF NRP. 128390

I N S T R U K S I  
KETALA STAF KOMANDO OPERASI TERTINGGI  
No. 04/KOTT TAHUN 1964.

- Menimbang : Ferlu segera mengeluarkan instruksi pelaksanaan dari Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 3 Tahun 1964 mengenai Kebidjaksanaan dan pelaksanaan pengerahan Sukarelawan/Sukarelawati;
- Mengingat : Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 3 Tahun 1964;

MENGINSTRUKSIKAN :

Sebagai berikut :

I. KLASIFIKASI :

1. Gubernur/Kepala Daerah segera mengadakan klasifikasi atas dasar daftar-daftar Sukarelawan/Sukarelawati yang telah masuk pada Gubernur/Kepala Daerah sebagai Kepala Markas Daerah Pertahanan Sipil;
2. Klasifikasi diarahkan untuk mengadakan pembagian tugas-tugas untuk keperluan :
  - a. Militer,
  - b. Pertahanan Sipil,
  - c. Pembangunan,berdasarkan :
  - a. Asal/Lingkungan bekerdja semula,
  - b. Lingkungan keahlian/pengalaman,seperti yang diuraikan dalam huruf b dan c angka 3 Bab III Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1964;
3. Pelaksanaan klasifikasi dilakukan oleh Markas Daerah Pertahanan Sipil;
4. Hasil klasifikasi supaya setcepat-tcepatnja dilaporkan kepada Staf Komando Operasi Tertinggi Ketua Gabungan 3;
5. Biaya klasifikasi dibebankan kepada anggaran belanda routine dari Pusat Pertahanan Sipil;

II. SELEKSI :

1. Gubernur/Kepala Daerah setelah mengadakan musjawarah dengan Pantja Tunggal membentuk panitia seleksi yang anggota-anggotanya terdiri dari Wakil-wakil Instansi tertentu yang dianggap perlu dan diketuai oleh Kepala Staf Markas Daerah Pertahanan Sipil;
  - a. Mengadakan perentjanaan mengenai penggunaan Sukarelawan/Sukarelawati yang diperlukan untuk tugas-tugas didaerah dan yang untuk tugas-tugas keluar Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan Komando Operasi Tertinggi;
  - b. Mengadakan seleksi fisik dan mental daripada Sukarelawan/Sukarelawati yang akan dikerahkan sesuai kebutuhan dan keachliannya;
2. Pelaksanaan seleksi untuk Sukarelawan/Sukarelawati yang akan ditugaskan keluar Dati I dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Komando Operasi Tertinggi;
3. Biaya seleksi untuk keperluan pada angka 2 dibebankan kepada Komando Operasi Tertinggi;

III. L A T I H A N :

A. Latihan Dasar Kemiliteran :

1. Kepada setiap Sukarelawan/Sukarelawati yang telah mendaftarkan diri, pada prinsipnya segera diberikan latihan dasar kemiliteran;
2. Penjelenggaraan latihan dilakukan ditiap ketjamatan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tertjatum dalam Instruksi WAMPA HAN/KAM No.III/A/93/63 tanggal 5 September 1963;
3. Biaya latihan diusahakan dari kemampuan Daerah;

B. Latihan Khusus :

1. Kepada Sukarelawan/Sukarelawati dapat diberikan latihan-latihan khusus menurut bidang penugasannya;
2. Pelaksanaan latihan khusus ini dilakukan oleh :
  - a. KODAM/KODAMAR/KORUD bagi mereka yang akan ditugaskan dibidang militer;
  - b. Pusat pertahanan Sipil/Markas Daerah Pertahanan Sipil bagi mereka yang akan ditugaskan dalam rangka Pertahanan Sipil;

- 3 -

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- c. Djawatan/Instansi yang bersangkutan, bagi mereka yang akan ditugaskan dibidang pembangunan, apabila dipandang perlu;
3. Biaya-biaya latihan khusus yang diperlukan akan diatur sesuai dengan ketentuan angka V Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1964:
- IV. Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : D J A K A R T A  
Pada tanggal : 25 Maret 1964.

=====

KOMANDO OPERASI TERTINGGI  
KEPALA STAF

ttd

AMMAD YANI  
LETNAN DJEMBRAL TNI

Instruksi ini ditunjukkan kepada :

1. Semua Gubernur/Kepala Daerah;
2. Semua Panglima Daerah Militer/Maritim/Regional Udara;
3. Semua Kepala Polisi Komisariat;
4. Semua Djaksa Tinggi/Kepala Kedjaksaan Propinsi;
5. Semua Ketua Gabungan dan Seksi STAF KOTI;
6. Semua Ka. Ma. HANSIP;
7. Semua Ketua Front Nasional Daerah;

T e m b u s a n :

1. J.M. Para Wakil Perdana Menteri/Anggota Presidium;
2. J.M. Para Menteri Koordinator;
3. J.M. Para Menteri;
4. Jth. Sekretaris Umum DEFERTAN.
5. Jth. Sekretaris Umum M.F.P.R.;
6. Jth. Kepala Pusat Pertahanan Sipil;
7. A r s i p .-

-----  
-/Ks.-

Disalin sesuai dengan aslinja  
Pa. Sekretariat

ttd.

( KOSALIH GAMDAWIDJAJA ).

Kapten NRF. 312663.

Salinan yang ke II sesuai dengan bunjinja  
oleh,

KARO TATA USAHA SEK. M.F.P.R.,

  
S O T W A R D J O  
KAPTEN INF.NRF.128390.

INSTRUKSI KEPALA STAF KOMANDO OPERASI TERTINGGI  
NO. 07 /KOTI/TAHUN 1964.

KEPALA STAF KOMANDO OPERASI TERTINGGI,

Menimbang : bahwa perlu segera mengeluarkan instruksi mengenai kebijaksanaan pengerahan/penggunaan Sukarelawan/Sukarelawati dalam rangka konfrontasi terhadap apa jang dinamakan "Malaysia", khusus untuk kebutuhan tugas-tugas dibidang Angkatan Bersendjata.

Mengingat : 1. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No.03/KOTI/TAHUN 1964;  
 2. Instruksi Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No. 04/KOTI/TAHUN 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : INSTRUKSI TENTANG KEBIDJAKSANAAN Pengerahan/Penggunaan SUKARELAWAN/SUKARELAWATI UNTUK TUGAS-TUGAS DIBIDANG MILITER/ANGKATAN BERSENDJATA, sebagai berikut :

1. Untuk keperluan perbantuan militer/Angkatan Bersendjata, setiap Daerah Tingkat I/Propinsi supaya mensiapkan sukarelawan untuk sewaktu-waktu dapat ditugaskan membantu angkatan Bersendjata di Daerah perbatasan sedjumlah daftar terlampir, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1.1. Memenuhi syarat sebagaimana norma jang berlaku untuk penerimaan anggota Wadhib Militer jang diutamakan pada pensjaratan :

- a. batas umur;
- b. pendidikan;
- c. kondisi/kesehatan badan,

1.2; Diambil dari sumber tenaga-tenaga :

- a. bukan pegawai negeri jang masih aktif, ketjua-li ada idzin dari atasannya;
- b. bukan mahasiswa/peladjar jang masih kuliah/beladjar;
- c. sedapat mungkin jang pernah mendapatkan latihan kemiliteran.

2. Pelaksanaan :

2.1. Klasifikasi dan seleksi dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Instruksi Presiden/Panglima

Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No.03/KOTI/TAHUN 1964, Instruksi Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No.04/KOTI/TAHUN 1964 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut pada No. 1 diatas.

- 2.2. Latihan Dasar Kemiliteran dilakukan didaerah masing-masing (DATI I) yang dipertanggung djawabkan pada Departemen Angkatan Darat ex KODAM-KODAM yang bersangkutan, dibantu oleh lain-lain Angkatan setempat.
- 2.3. Latihan teknis kemiliteran landjutan dilakukan oleh Angkatan-Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian sesuai dengan bidang tugas yang akan diberikan.

3. Pembiajaan :

Seluruh biaja persiapan-siagaan dibebankan pada KOTI ex G-VI dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk keperluan klasifikasi dan seleksi disalurkan melalui Kepala Daerah/Ketua Pantja Tunggal.
- b. untuk keperluan latihan kemiliteran disalurkan melalui Departemen Angkatan yang bersangkutan.
- c. index tiap orang akan ditetapkan tersendiri.

4. Penggunaan/Pengerahan :

Setelah selesai latihan tetap siap sedia didaerah masing-masing untuk menunggu perintah penggunaan/pemberangkatan dari Komando Operasi Tertinggi (on call).

5. Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 April 1964.

KOMANDO OPERASI TERTINGGI  
KEPALA STAF,

Tjap/ttd.

A. Y A N I

LETNAN DJENDERAL TNI.

Disalin sesuai dengan aslinja oleh  
KARO TATA USAHA SEKRET. HPIR,

S O E W A R D J O

KAPTEN INF. NIP. 128390.

S A L I N A N

LAMPIRAN INSTRUKSI KEPALA STAF KOMANDO OPERASI  
TERTINGGI NO. 07 /KOTI/TAHUN 1964.

DAFTAR DJUMLAH SUKARELAWAN UNTUK KEPERLUAN  
PERBANTUAN MILITER/ANGKATAN BERSENDJATA DI  
TIAP-TIAP DAERAH TINGKAT I :

Daerah Istimewa Atjeh	: 200 orang
Daerah Istimewa Utara	: 500 orang
Daerah Istimewa Barat	: 200 orang
Daerah Daratan	: 100 orang
Daerah Istimewa	: 100 orang
Daerah Istimewa Selatan	: 200 orang
Daerah Istimewa	: 100 orang
Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya	: 500 orang
Daerah Istimewa Barat	: 500 orang
Daerah Istimewa Tengah	: 500 orang
Daerah Istimewa Jogjakarta	: 200 orang
Daerah Istimewa Timur	: 500 orang
Daerah Istimewa Barat	: 200 orang
Daerah Istimewa Tengah	: 100 orang
Daerah Istimewa Selatan	: 200 orang
Daerah Istimewa Timur	: 200 orang
Daerah Istimewa Utara	: 200 orang
Daerah Istimewa Tengah	: 100 orang
Daerah Istimewa Selatan	: 200 orang
Daerah Istimewa Tenggara	: 100 orang
Daerah Istimewa	: 100 orang
Daerah Istimewa	: 200 orang
Daerah Istimewa Tenggara Barat	: 100 orang
Daerah Istimewa Tenggara Timur	: 100 orang
Daerah Istimewa Barat	: 100 orang

D J U M L A H

5.200 orang

Nara sumber: L.H. Kadir

Waktu: Minggu, 20 Juni 2008 sekitar pukul 17.00

Tempat: Kediaman L.H. Kadir, Jalan M.T. Haryono No. 40, Pontianak,  
Kalimantan Barat.

Jabatan: Wakil Gubernur Kal-Bar periode 2003-2008.

Pengungsi lebih 100 ribu (akibat kerusuhan etnis Dayak-Tionghoa), kalau ada terdata tapi tidak valid juga.

Habis pergolakan saya diajak Pak Jelani ke Senakin masih ada mayat-mayat di pasar dan sawah-sawah.

Saya 1961 tamat SMEA, pertengahan 1961 masuk KDC selesai 1963. Selesai diangkat menjadi pegawai ke putusibau. Tahun 1965 Desember masuk APDN selesai 1968.

Pada tahun 1967 sedang Kuliah Kerja di Samalantan. Seharusnya tiga bulan tapi dua bulan ditarik lagi (kembali ke kampus atau kota), tanggal 7 atau 6 November ditarik semua tanpa penjelasan apa-apa. Itu diindikasikan orang-orang atas sudah tahu, satu minggu setelah itu terjadi peristiwa pembantaian itu (kerusuhan etnis) tanggal 14 November sekitar itu.

Situasi saat itu mencekam, orang-orang tidak berani berjalan. Pada suatu hari Camat Samalantan, ketika saya ke Bengkayang, hari Jumat atau Sabtu diajak pulang ke Bengkayang. Tiga hari sebelum itu di Bukit Van Dereng dicegat sama PGRS tapi hanya minta rokok saja, habis itu hilang lagi, itu tahun 1965. Orang-orang Tionghoa biasa-biasa saja, mereka tidak takut, mereka ke ladang juga, *noreh* karet juga tidak apa-apa.

Masyarakat tahu PGRS/PARAKU?

Pada 1963-1964 belum tahu, yang orang tahu sukwan (sukarelawan) dari Indonesia. Saya pernah mengantar dari putusibau sukwan untuk berlatih di perbatasan. Saya dengan *speed* ke Semitau diperintah Dandim Hartono supaya mengantar. Orang-orang yang saya antar Cina semua waktu itu. Mereka bawa senjata, ada pula *amoi-amoi*, banyak perempuan, “bagus-bagus” pula, putih-putih, ada juga dokter dua orang, mereka latihan di Badau. Waktu itu belum PGRS/PARAKU, masih konfrontasi saat itu.

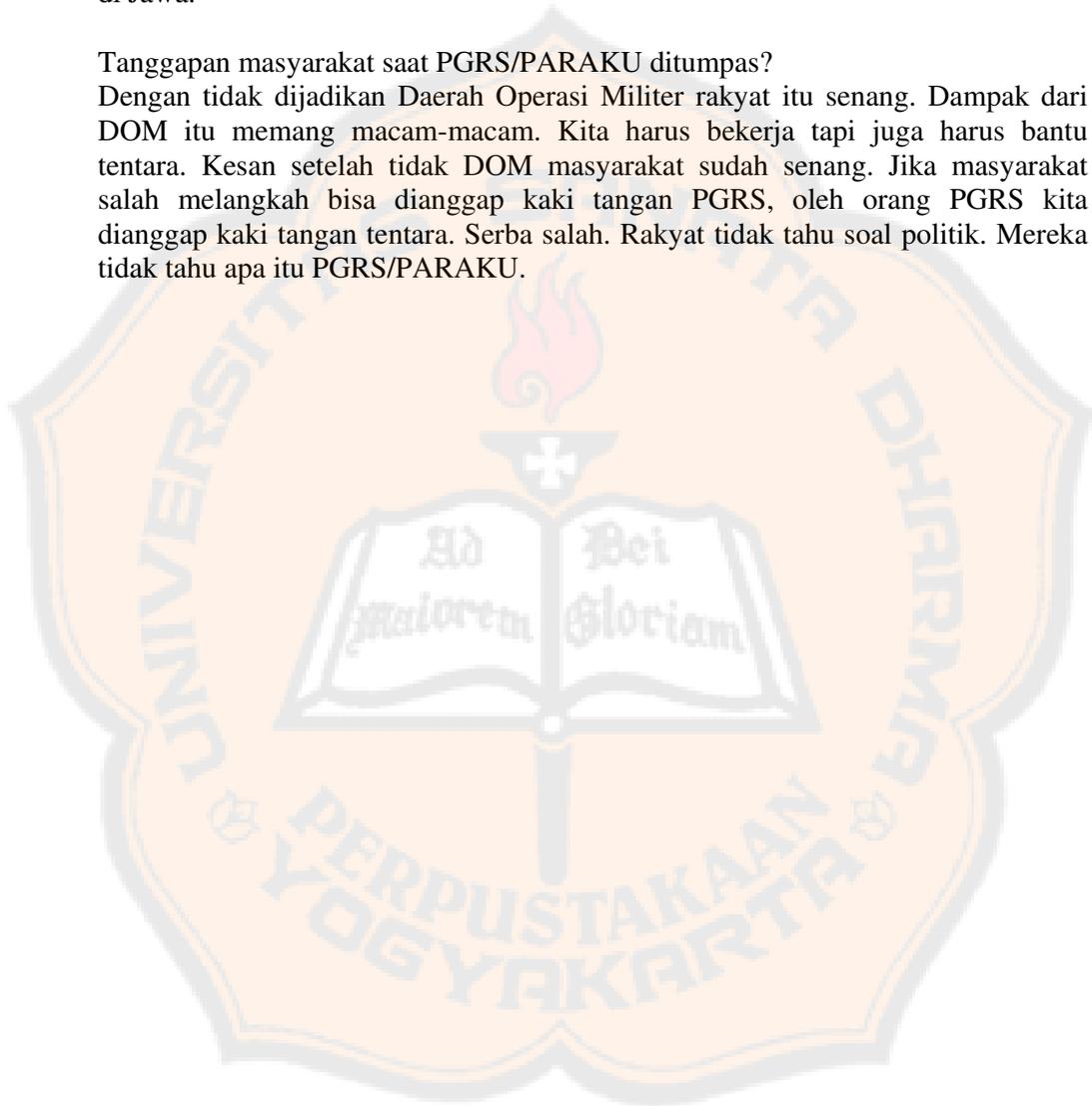
Masyarakat tahu PGRS setelah G30S, sebelumnya sukwan sudah dibentuk sebelum itu. Sebelum G30S tidak ada pernyataan dukungan terhadap PGRS/PARAKU, hanya tahu bahwa ada pergolakan rakyat di perbatasan. Setahu saya setelah G30S baru ada di koran PGRS/PARAKU. Sebelum itu yang dikenal sukwan. Abang saya, Lawik, ikut berlatih tapi belum sempat dikirim, Pak Sukajanting juga.

PKI di Kalbar hanya satu kursi? Di mana massanya?

Kita berbicara setelah tahun 1959. Sebelum itu PKI tidak besar. Tapi setelah itu berkembang secara nasional dan internasional, di sini ada semacam PTI (Persatuan Tani Indonesia), Barisan Rakyat, macam-macam. Cukup berkembang, kita tidak bisa mengukur karena belum ada pemilu lagi. Hampir samalah dengan di Jawa.

Tanggapan masyarakat saat PGRS/PARAKU ditumpas?

Dengan tidak dijadikan Daerah Operasi Militer rakyat itu senang. Dampak dari DOM itu memang macam-macam. Kita harus bekerja tapi juga harus bantu tentara. Kesan setelah tidak DOM masyarakat sudah senang. Jika masyarakat salah melangkah bisa dianggap kaki tangan PGRS, oleh orang PGRS kita dianggap kaki tangan tentara. Serba salah. Rakyat tidak tahu soal politik. Mereka tidak tahu apa itu PGRS/PARAKU.



# SITUASI P.G.R.S. - PARAKU

1966-1967



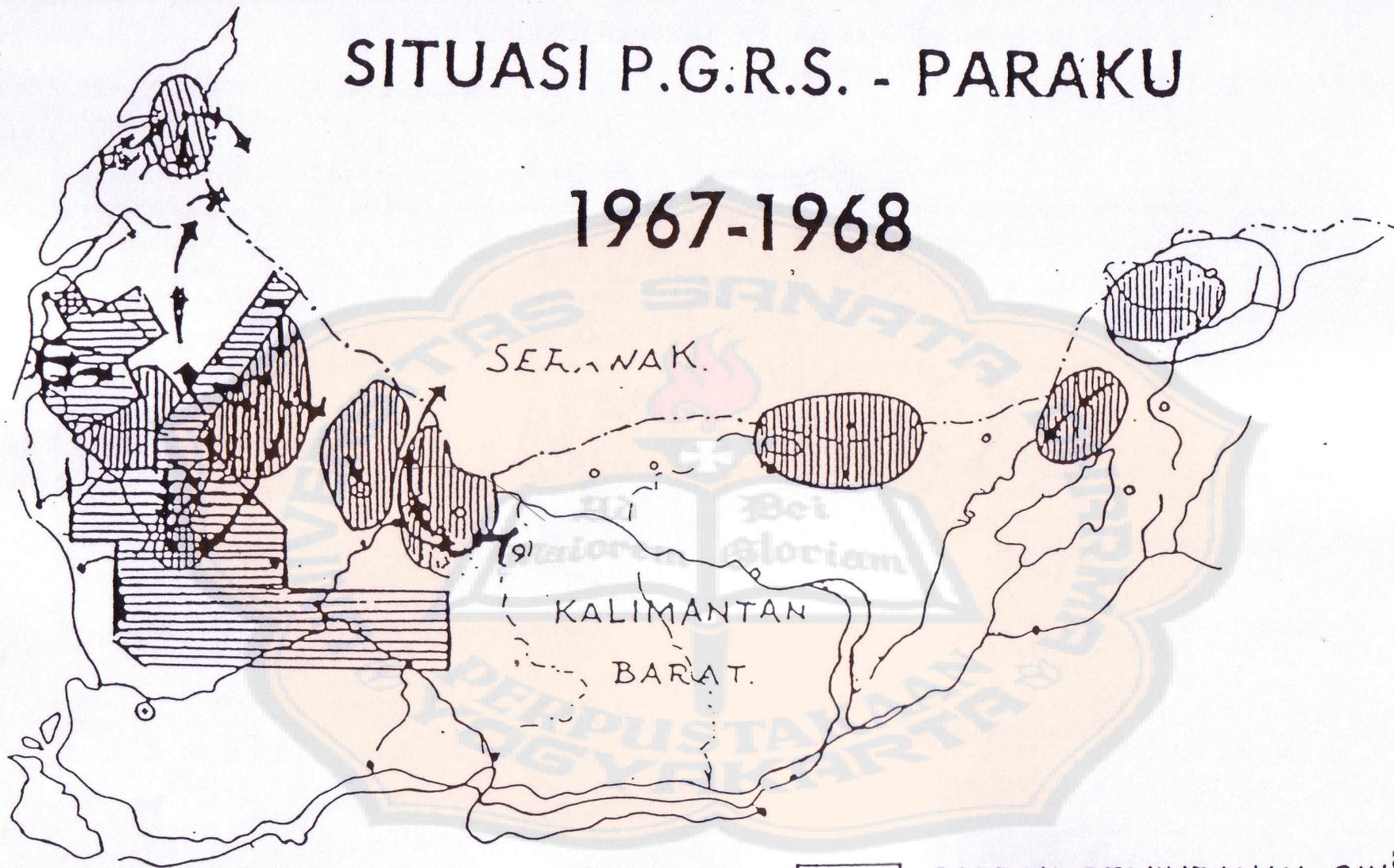
KEDAR : 1 : 1.000.000.

KALIMANTAN-BARAT

177

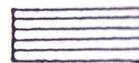
# SITUASI P.G.R.S. - PARAKU

## 1967-1968



SERANAK.

KALIMANTAN  
BARAT.

 = DAERAH PEMINDAHAN CINA.

148

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SILABUS PENDIDIKAN SEJARAH

Nama Sekolah : SMA Negeri Tirto Adhi Suryo  
 Program : Ilmu Pengetahuan Sosial  
 Mata Pelajaran : Sejarah  
 Kelas/Semester : XII/ Semester satu (ganjil)  
 Standar Kompetensi : 1. Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.

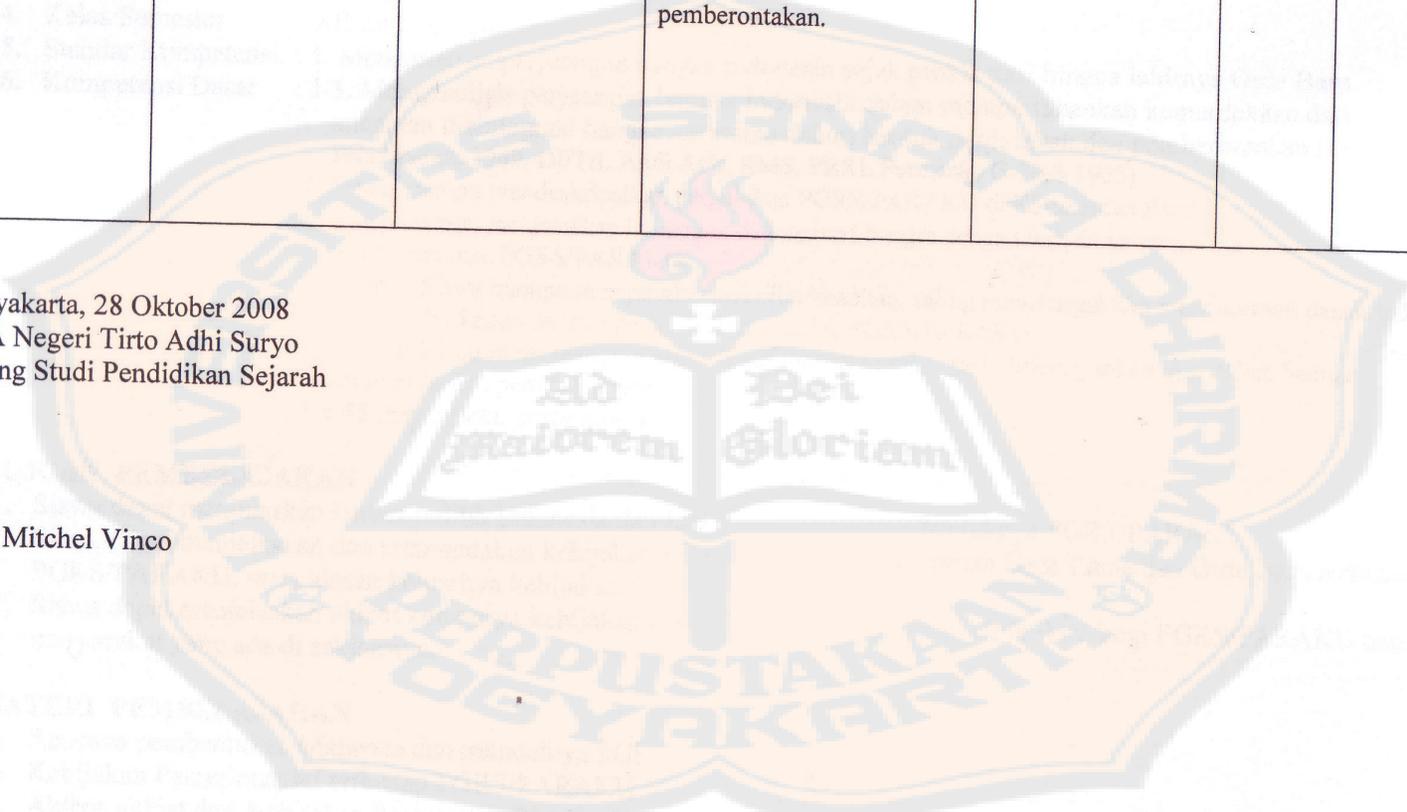
KOMPETENSI DASAR	MATERI POKOK/PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	INDIKATOR	PENILAIAN	ALOKASI WAKTU	SUMBER
<ul style="list-style-type: none"> <li>1.3. Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, Andi Azis, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S 1965).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Siswa mampu mendeskripsikan pergolakan PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat.</li> <li>1. b. Siswa mampu menjelaskan hubungan disintegrasi bangsa dengan terjadinya pergolakan dan pemberontakan PGRS/PARAKU.</li> <li>1. c. Afektif: Siswa mampu mengungkapkan nilai keadilan, saling menghargai dan menghormati dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian masalah PGRS/PARAKU.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Portofolio (<i>portfolio</i>) a. bentuk: makalah b. alat: skala nilai</li> <li>2. Unjuk kerja (<i>performance</i>) a. bentuk: presentasi b. alat: skala nilai</li> <li>3. Tertulis (<i>paper &amp; pen</i>) a. bentuk: jawaban singkat dan uraian b. alat: tes</li> <li>4. Sikap a. bentuk: observasi b. alat: skala sikap</li> </ul>	1 x 45	<p>Soemadi. 1974. <i>Peranan Kalimantan Barat Dalam Menghadapi Subversi Komunis Asia Tenggara</i>. Pontianak: Yayasan Tanjungpura.</p> <p>Muhlis Suhaeri. "The Lost Generation". <a href="http://muhlissuhaeri.blogspot.com">http://muhlissuhaeri.blogspot.com</a></p>

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

			<ul style="list-style-type: none"><li>• 1. d. Afektif: Siswa dapat menerapkan ide pluralitas guna mencegah disintegrasi bangsa dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan.</li></ul>			
--	--	--	---	--	--	--

Yogyakarta, 28 Oktober 2008  
SMA Negeri Tirto Adhi Suryo  
Bidang Studi Pendidikan Sejarah

M.S. Mitchel Vinco



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)

1. Nama Sekolah : SMA Negeri Tirto Adhi Suryo
2. Program : Ilmu Pengetahuan Sosial
3. Mata Pelajaran : Sejarah
4. Kelas/Semester : XII/Satu (ganjil)
5. Standar Kompetensi : 1. Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.
6. Kompetensi Dasar : 1.3. Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, Andi Azis, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S 1965)
7. Indikator :
  1. Siswa mampu mendeskripsikan pergolakan PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat.
  2. Siswa mampu menjelaskan hubungan disintegrasi bangsa dengan terjadinya pergolakan dan pemberontakan PGRS/PARAKU.
  3. Afektif: Siswa mampu mengungkapkan nilai keadilan, saling menghargai dan menghormati dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian masalah PGRS/PARAKU.
  4. Afektif: Siswa dapat menerapkan ide pluralitas guna mencegah disintegrasi bangsa dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan.
8. Alokasi Waktu : 1 x 45 menit (satu pertemuan)

### A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat menjelaskan situasi politik Indonesia dan Malaysia di sekitar terbentuknya PGRS/PARAKU.
2. Siswa dapat menjelaskan dan membedakan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru terhadap PGRS/PARAKU, serta alasan keluarnya kebijakan tersebut.
3. Siswa dapat menjelaskan akibat keluarnya kebijakan Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru bagi PGRS/PARAKU dan masyarakat yang ada di sekitarnya.

### B. MATERI PEMBELAJARAN

1. Rencana pembentukan Malaysia dan munculnya PGRS/PARAKU.
2. Kebijakan Pemerintah RI terhadap PGRS/PARAKU 1963-1967.
3. Akibat-akibat dari Kebijakan Pemerintah RI terhadap PGRS/PARAKU dan masyarakat di sekitarnya.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## C. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN

Pendekatan : *Cooperative Learning* (CL)

Metode : Dua Tinggal Dua Tamu (*Two Stay Two Stray*)

## D. KEGIATAN PEMBELAJARAN

JENIS KEGIATAN	WAKTU (MENIT)
<b>1. KEGIATAN AWAL</b> 1) Memberi apersepsi dan tanya jawab singkat mengenai sejarah PGRS/PARAKU. 2) Menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. 3) Menyampaikan metode yang akan digunakan hari ini yaitu bertukar pasangan/ <i>two stay two stray</i> .	→ 10
<b>2. KEGIATAN INTI</b> 1) Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari empat siswa dalam tiap kelompok. 3) Guru memberikan soal yang bersifat analisis, dan setiap kelompok berdiskusi untuk menjawabnya. 4) Setelah selesai, dua siswa dari tiap kelompok bertamu ke kelompok lainnya. Dua siswa yang tinggal bertugas menerima tamu, berdiskusi dan bertukar informasi secara lisan. 5) Semua tamu kemudian kembali ke kelompoknya dan melaporkan temuan dari kelompok lain. 6) Setiap kelompok berdiskusi kembali dan merevisi jawaban sebelumnya. Hasil kerja diserahkan ke guru. 7) Guru mengambil beberapa sampel jawaban untuk dibacakan dan membahas yang dianggap penting.	→ 30 (diskusi+bertamu)
<b>3. PENUTUP</b> 1) Guru bersama siswa meninjau kembali pelajaran yang baru dipelajari, dan membuat rencana tentang pertemuan berikutnya. 2) Bersama-sama melakukan refleksi tentang pembelajaran pada hari ini.	→ 5

## E. SUMBER BELAJAR

- Soemadi. 1974. *Peranan Kalimantan Barat Dalam Menghadapi Subversi Komunis Asia Tenggara*. Pontianak: Yayasan Tanjungpura.
- Pembayun Sulistyorini. 2004. "Pemberontakan PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat". *Jurnal Sejarah dan Budaya Kalimantan*, edisi 03/2004. Pontianak: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Halaman 39.
- Muhlissuhaeri. "*The Lost Generation*". <http://muhlissuhaeri.blogspot.com>

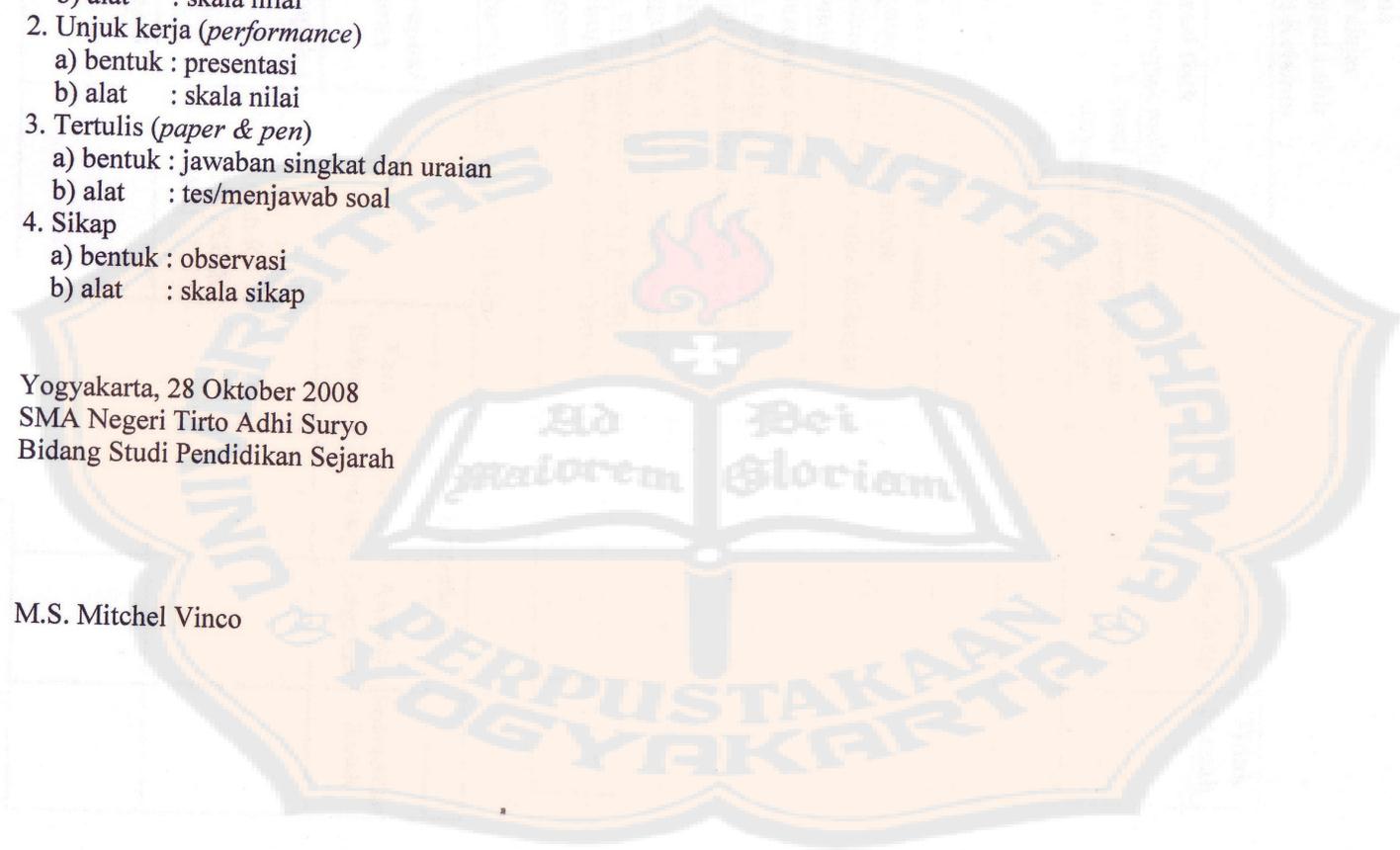
## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### F. PENILAIAN

1. Portofolio (*portfolio*)
  - a) bentuk : makalah
  - b) alat : skala nilai
2. Unjuk kerja (*performance*)
  - a) bentuk : presentasi
  - b) alat : skala nilai
3. Tertulis (*paper & pen*)
  - a) bentuk : jawaban singkat dan uraian
  - b) alat : tes/menjawab soal
4. Sikap
  - a) bentuk : observasi
  - b) alat : skala sikap

Yogyakarta, 28 Oktober 2008  
SMA Negeri Tirto Adhi Suryo  
Bidang Studi Pendidikan Sejarah

M.S. Mitchel Vinco



**Instrumen/alat penilaian unjuk kerja (*performance*)**

1. Biodata Siswa

- a. Nama :
- b. No Pelajar :
- c. Tanggal Lahir :
- d. Jenis Kelamin :

	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
<b>1. Ekspresi fisik</b>			
a. Berdiri tegak melihat penonton.			
b. Merubah ekspresi wajah sesuai dengan perubahan pernyataan yang disajikan			
c. Mata melihat kepada penonton			
<b>2. Ekspresi suara</b>			
a. Berbicara dengan jelas			
b. Nada suara berubah-ubah sesuai pernyataan yang ditekankan			
c. Berbicara cukup keras untuk didengar penonton			
<b>3. Kemampuan berbahasa</b>			
a. Tidak mengulang-ulang pernyataan			
b. Memilih kata-kata yang tepat untuk menegaskan arti			
c. Menggunakan kalimat yang lengkap untuk mengutarakan suatu pikiran			
d. Menyimpulkan pokok-pokok pikiran yang penting			

**Instrumen/alat penilaian portofolio**

No	Kelompok/ Nama	Materi	Kriteria			
			Tata Bahasa	Sudut Pandang	Analisa Gagasan	Sistematika Ilmiah
1.	Kelompok 1 a. b. c. d.	Kebijakan Pemerintah RI Terhadap PGRS/ PARAKU				
2.	Kelompok 2 a. b. c.					

**Instrumen/alat penilaian sikap**

No.	Nama	Perilaku				Nilai	Keterangan
		Bekerja Sama	Berinisiatif	Penuh Perhatian	Bekerja Sistematis		
1.							
2.							
3.							

**Instrumen/alat penilaian tertulis (tes)**

1. Berikanlah pendapat anda! Mengapa rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tanggapan pro dan kontra dari dalam negeri PTM, Sarawak, Brunei dan Sabah?
2. Mengapa Pemerintah RI (Orde Lama) menolak rencana pembentukan Federasi Malaysia?
3. Bagaimana kebijakan Pemerintah RI pada Orde Lama terhadap PGRS/PARAKU?
4. Mengapa kebijakan Pemerintah Orde Baru terhadap PGRS/PARAKU berbeda dengan kebijakan Orde Lama?
5. Jelaskan pengaruh penerapan Daerah Operasi Militer di Kalimantan Barat saat peristiwa PGRS/PARAKU!